



2019

Model Penyaluran dan Pencairan Dana PIP



MODEL PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA PROGRAM INDONESIA PINTAR



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PUSAT PENELITIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2019**

Model Penyaluran dan Pencairan Dana Program Indonesia Pintar

Tim Penyusun :

Dr. Herlinawati

Dra. Ida Kintamani Dewi Hermawan, M.Sc.

Sisca Fujianita, S.Pd.

Kaisar Julizar, S.Sos.

ISBN : 978-602-0792-24-8

Penyunting :

Dr. Subijanto, M.Ed.

Siska Lismayanti, M.Si.

Ir. Yendri Wirda, M.Si.

Desain Sampul dan Isi:

Genardi Atmadiredja, M.Sn.

Penerbit :

Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Redaksi :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung E Lantai 19

Jalan Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta 10270

Telp. +6221-5736365

Faks. +6221-5741664

Website: <https://puslitjakdikbud.kemdikbud.go.id>

Email: puslitjakbud@kemdikbud.go.id

Cetakan pertama, Juli 2019

PERNYATAAN HAK CIPTA

© Puslitjakdikbud/Copyright@2019

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA SAMBUTAN

Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2019 telah menerbitkan Buku Hasil Penelitian. Penerbitan buku hasil penelitian ini dimaksudkan untuk menyebarluaskan hasil penelitian kepada berbagai pihak yang berkepentingan dan sebagai salah satu upaya untuk memberikan manfaat yang lebih luas dan wujud akuntabilitas publik.

Melalui buku ini diharapkan agar diketahui model alternatif penyaluran dan pencairan dana Program Indonesia Pintar (PIP). Hasil penelitian ini telah disajikan di berbagai kesempatan secara terbatas, sesuai dengan kebutuhannya. Buku ini sangat terbuka untuk mendapatkan masukan dan saran dari berbagai pihak. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi para pengambil kebijakan dan referensi bagi pemangku kepentingan lainnya dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan kebudayaan.

Akhirnya, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya penerbitan buku hasil penelitian ini.

Jakarta, Juli 2019

Kepala Pusat,



Muktiono Waspodo

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga tim peneliti dapat menyelesaikan laporan penelitian yang berjudul Kajian Model Penyaluran dan Pencairan Dana Program Indonesia Pintar (PIP).

Dalam penyusunan laporan penelitian banyak pihak yang telah memberikan bimbingan, petunjuk dan motivasi, serta dukungan kepada tim peneliti, sehingga berhasil menyelesaikan laporan penelitian ini. Oleh karena itu, diharapkan hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan rekomendasi kebijakan.

Pada kesempatan ini, kami tim peneliti dengan tulus dan ikhlas menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi masukan dalam penyusunan laporan penelitian ini. Semoga dengan adanya hasil dari temuan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kepada pihak terkait untuk melakukan langkah-langkah strategis terkait permasalahan yang ada selama ini dalam penyaluran dan pencairan dana PIP.

Laporan ini tentu saja masih banyak kekurangannya, untuk itu, saran untuk perbaikan dari Bapak/Ibu sangat kami harapkan, guna penyempurnaan laporan ini lebih lanjut. Demikian, atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, Desember 2018

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	20
C. Tujuan.....	22
D. Hasil yang Diharapkan	20
E. Ruang Lingkup	20
2 TINJAUAN PUSTAKA	24
A. Program Indonesia Pintar.....	24
B. Penyaluran dan Pencairan Dana PIP.....	28
C. Hasil Penelitian Terdahulu	31
3 METODOLOGI	38
A. Pendekatan Kajian.....	38
B. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel.....	38
C. Teknik Pengumpulan Data.....	42
D. Analisis Data.....	44
4 TEMUAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Implementasi PIP di Lokasi Daerah Kajian.....	46
B. Model Penyaluran dan Pencairan Dana PIP	94

5	SIMPULAN DAN OPSI KEBIJAKAN.....	132
	A. Simpulan.....	132
	B. Opsi Kebijakan.....	135
	DAFTAR PUSTAKA.....	139

1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

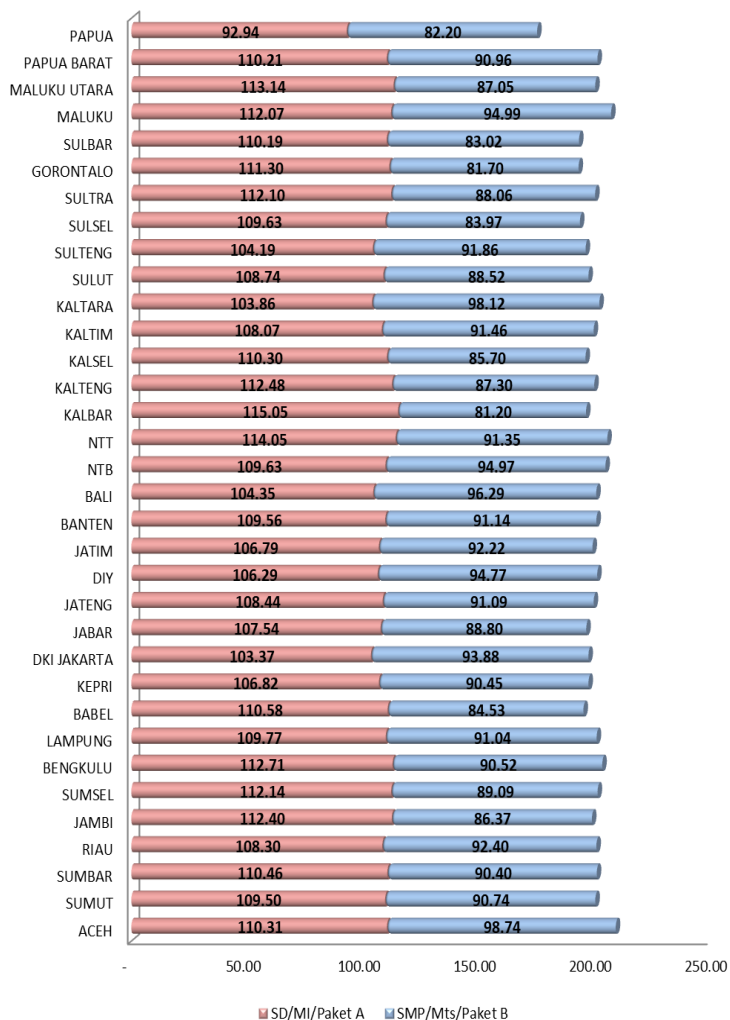
Secara umum perluasan akses dan peningkatan pemerataan pendidikan di Indonesia masih menjadi masalah utama, terutama bagi masyarakat miskin maupun masyarakat di daerah terpencil. Prinsip dasar pemerataan ini sangat penting guna memberikan kesempatan bagi semua golongan masyarakat, untuk memperoleh pelayanan pendidikan yang baik. Selama ini, yang bisa menikmati pendidikan tinggi yaitu orang-orang yang berasal dari keluarga kelas menengah. (Djam'an Satori dan Aan Komariah, 2010).

Organisasi Pendidikan, Keilmuan dan Kebudayaan PBB (*United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization/UNESCO*, 2016) menyoroti tingginya kesenjangan akses pendidikan antara siswa kaya dan miskin di Indonesia. Berdasarkan Laporan Pemantauan Pendidikan Global, atau *Global Education Monitoring* (GEM) UNESCO 2016, hanya ada dua negara dari 90 negara berpenghasilan rendah yang anak

usia sekolahnya dapat mengakses pendidikan sampai ke jenjang SMA. Selebihnya, jenjang pendidikan SMA hanya dapat diakses oleh anak usia sekolah yang rata-rata berasal dari kalangan ekonomi menengah ke atas.

Indonesia masuk dalam golongan yang kesenjangan pendidikannya cukup tinggi. Anak usia sekolah yang berasal dari kalangan ekonomi bawah rata-rata hanya dapat mengakses pendidikan sampai SD atau tidak sampai lulus jenjang SMP.

Pada jenjang pendidikan dasar, sebagian besar anak-anak usia SD dan SMP telah dapat memperoleh pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikan sesuai usianya. Namun, untuk capaian pemerataannya berbeda-beda menurut provinsinya. Berdasarkan Grafik 1.1, capaian APK SD/ sederajat dan SMP/ sederajat tahun 2017 di bawah ini menunjukkan masih terdapat 12 provinsi yang memiliki nilai APK jenjang SD/ sederajat di atas APK Nasional tahun 2017 (108,50). Masih banyaknya provinsi (36%) yang memiliki APK di bawah APK Nasional mengindikasikan bahwa tingkat partisipasi memperoleh pendidikan masih belum merata. Adapun capaian APK jenjang SMP/ sederajat, masih terdapat 14 provinsi yang memiliki APK di bawah APK Nasional (90,23). Secara angka, capaian APK jenjang SMP/ sederajat memang tinggi, namun jika dilihat menurut provinsi, ternyata masih terdapat 44% provinsi yang capaiannya di bawah APK Nasional.



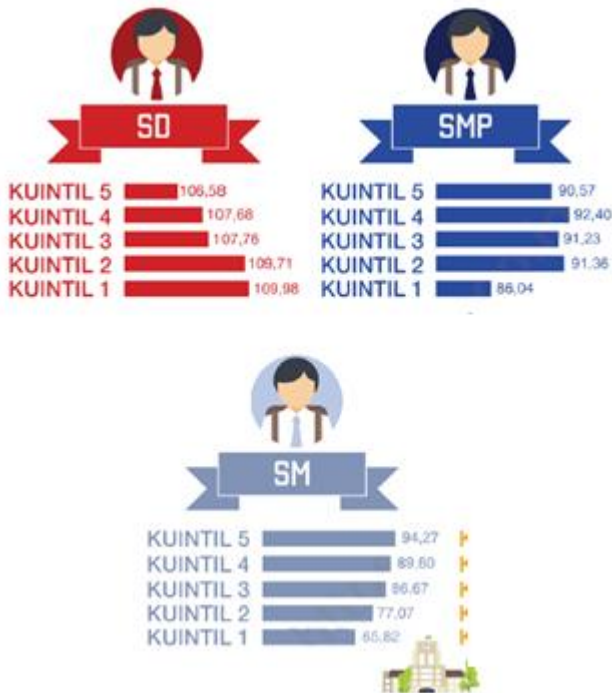
Sumber: BPS (2017).

Grafik 1.1 APK Pendidikan Dasar Per Provinsi

Capaian APK pada Grafik 1.1 di atas merupakan salah satu indikator capaian aksesibilitas memperoleh pendidikan jenjang pendidikan dasar. Masih banyaknya provinsi yang memiliki APK di bawah APK Nasional diperlukan berbagai strategi untuk memperluas akses pada jenjang tersebut.

Selain itu, hasil olah Susenas tahun 2017 menunjukkan bahwa masih terdapat disparitas dalam pendidikan antarpenduduk yang tinggal di rumah tangga dengan status ekonomi yang berbeda. Semakin tinggi status ekonomi rumah tangga, maka semakin tinggi APK yang dihasilkan dan pola tersebut semakin terlihat jelas seiring dengan meningkatnya jenjang pendidikan. Dalam Susenas tersebut, status ekonomi rumah tangga dibedakan dalam lima kuantil, yaitu kuantil 1 dan kuantil 2 adalah rumah tangga dengan status ekonomi rendah, kuantil 3 dan kuantil 4 adalah rumah tangga dengan status ekonomi menengah, dan kuantil 5 adalah rumah tangga dengan status ekonomi tinggi.

Grafik 1.2 di bawah ini menunjukkan terdapat disparitas nilai APK antarstatus ekonomi rumah tangga pada jenjang pendidikan SM/ sederajat. Partisipasi sekolah menengah ke atas lebih besar di rumah tangga dengan status ekonomi tinggi (Kuantil 5) dibandingkan rumah tangga dengan status ekonomi rendah (Kuantil 1), bahkan perbedaan yang dihasilkan mencapai angka 28,45 persen. Hal ini tentunya menjadi catatan tersendiri bagi para pemangku kebijakan untuk menekan biaya pendidikan pada jenjang SM/ sederajat.



Catatan: Status ekonomi rumah tangga diukur menggunakan pendekatan pengeluaran rumah tangga, dengan asumsi bahwa pengeluaran rumah tangga sama dengan pendapatannya.

Sumber: BPS, Susenas Maret (2017).

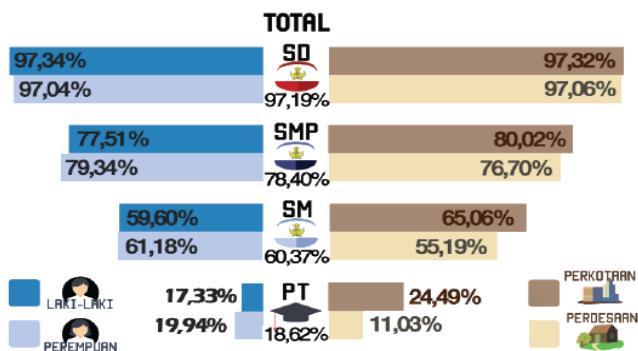
Grafik 1.2 Ketercapaian APK Jenjang Pendidikan Berdasarkan Status Ekonomi

Hasil Susenas 2017 mengungkapkan bahwa terdapat semacam anomali angka APK SD/ sederajat yang justru menunjukkan tren semakin rendah tingkat ekonomi maka semakin besar angka APK SD/ sederajat, yakni 106,58 persen untuk status ekonomi tinggi (Kuintil 5) dan 109,98 persen pada status

ekonomi rendah (Kuantil 1). Anomali tersebut dapat dijelaskan dengan kembali pada definisi APK itu sendiri yakni proporsi jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan terhadap jumlah penduduk umur sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut yang artinya dapat mencakup anak di luar batas umur sekolah pada jenjang pendidikan tersebut. Artinya, dapat dimungkinkan bahwa pada Kuantil 1 terdapat orang tua yang menyekolahkan anaknya meskipun umurnya belum mencapai umur sekolah pada jenjang pendidikan yang bersesuaian, siswa yang terlambat bersekolah, atau pengulangan kelas. Sementara itu, pada Kuantil 5 telah banyak orang tua yang *notabene* memiliki status ekonomi tinggi memiliki kesadaran untuk menyekolahkan anaknya sesuai jenjang umur yang bersesuaian. Misalnya, orang tua yang tidak buru-buru memasukkan anaknya yang masih berumur 6 tahun ke SD dan menyekolahkan anaknya di PAUD.

Lain halnya dengan Angka Partisipasi Murni yang mengukur ketepatan umur penduduk dalam berpartisipasi untuk mengenyam pendidikan. Secara umum, APM akan selalu lebih rendah dari APK karena APK memperhitungkan jumlah penduduk di luar umur sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. APM jenjang pendidikan SD sampai dengan APM jenjang Perguruan Tinggi masih belum mencapai angka 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk yang berumur sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut belum seluruhnya bersekolah sesuai dengan jenjangnya. Pada tahun

2017, APM antarjenjang pendidikan memiliki kemiripan pola dengan APK, di mana jenjang pendidikan SD/ sederajat menghasilkan APM paling tinggi dari seluruh jenjang pendidikan, yaitu sebesar 97,19 persen. Jika disandingkan dengan target capaian dari APM SD/ sederajat yang terdapat di dalam RPJMN tahun 2015-2019, nilai capaian APM SD/ sederajat pada tahun 2017 bahkan telah melampaui target tahun 2019 yang merupakan tahun berakhirnya RPJMN 2015-2019. Sayangnya, hal tersebut tidak terjadi pada nilai APM dari jenjang SMP/ sederajat, dan SM/ sederajat. Namun demikian, masih terdapat waktu hingga dua tahun ke depan untuk menjalankan dan mengevaluasi pembangunan pendidikan yang sudah dirancang demi mengejar ketertinggalan.



Sumber: BPS, Susenas Maret (2017).

Grafik 1.2 Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Karakteristik Demografi dan Jenjang Pendidikan, 2017

Semakin tinggi jenjang pendidikan, maka kesenjangan APM antara perdesaan dan perkotaan semakin nyata. Berdasarkan jenis kelamin, terlihat bahwa APM perempuan pada jenjang SMP/ sederajat ke atas lebih tinggi dibandingkan APM laki-laki. Pada masing-masing jenjang tersebut APM perempuan lebih besar sekitar tiga persen dibandingkan APM laki-laki.

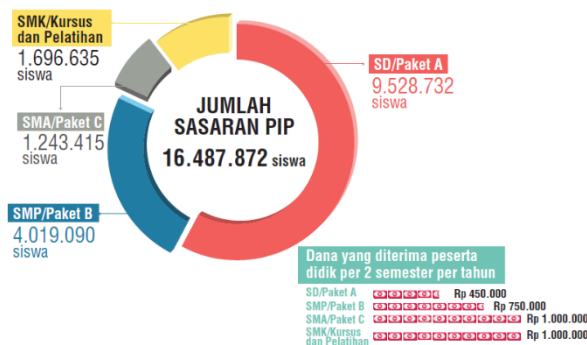
Untuk membantu peningkatan APK maupun APM SMP/ sederajat, Kemendikbud telah menjalankan beberapa program di antaranya adalah Program Indonesia Pintar (PIP) yang diarahkan untuk memenuhi hak seluruh anak Indonesia tanpa terkecuali agar dapat menyelesaikan jenjang pendidikan dasar sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.

PIP merupakan program kebijakan yang sejalan dengan salah satu cita dari sembilan nawacita pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla yakni meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui Program Indonesia Pintar dengan wajib belajar 12 tahun bebas pungutan. Untuk merealisasikan janji tersebut, Presiden melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014, menugaskan Kemendikbud untuk melaksanakan Program Indonesia Pintar (PIP). Menindaklanjuti tugas tersebut, Kemendikbud mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar.

Sampai dengan tahun 2017, total penerima KIP berjumlah 16.487.872 anak, dan sebanyak 736.848 di antaranya berasal dari

kategori anak yatim dan yatim piatu. Sebagai program prioritas nasional, PIP menjadi perhatian Presiden Joko Widodo. Bahkan KIP yang diperuntukkan khusus untuk kategori anak yatim dan yatim piatu, ikut dibagikan Presiden Jokowi secara langsung. Dalam setiap kunjungan kerjanya ke berbagai daerah, Presiden sering mengagendakan pembagian KIP sekaligus menyempatkan diri bertemu dengan mereka (Majalah Jendela Pendidikan, 2017).

Pembagian KIP kepada siswa yatim piatu merupakan upaya membangun pendidikan dan kebudayaan yang merata, berkeadilan, dan berkualitas.



Sumber: LAKIP Kemendikbud (2017).

Grafik 1.3 Jumlah dan Sasaran PIP

PIP dilaksanakan dengan tujuan untuk: 1) meningkatkan akses bagi anak usia 6-21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah dan

mendukung pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal/Wajib Belajar 12 Tahun; 2) mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (*drop out*) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi; 3) menarik siswa putus sekolah (*drop out*) atau tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah/Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) maupun Lembaga Kursus dan Pelatihan (Juklak PIP, Dikdasmen, 2017).

Walaupun pada implementasi pelaksanaan program PIP telah dilaksanakan selama empat tahun sesuai dengan petunjuk pelaksanaan, namun fakta-fakta di lapangan memang masih dijumpai beberapa kendala terutama pada mekanisme penyaluran dan pencairan serta ketepatan sasaran penerima.

Dengan adanya berbagai masalah administrasi yang belum *settled* dan siswa yang tersebar di berbagai daerah dengan kondisi yang berbeda maka penyaluran dan pencairan tepat waktu masih menjadi tantangan. Sebagaimana data yang disajikan pada Tabel 1.1 menunjukkan, bahwa pencairan dana PIP yang diterima siswa lebih sedikit daripada target yang ditentukan Pemerintah. Data total alokasi penyaluran dana PIP mencapai target 17.985.657 anak. Dari target tersebut penyaluran dana PIP telah diberikan sebanyak 18.163.021 anak. Namun, dari yang sudah disalurkan itu, penerima dana PIP yang telah melakukan pencairan baru mencapai 8.119.851 siswa (Kemendikbud, 2017). Meskipun penyaluran dana PIP telah

mencapai 100%, namun dari dana tersebut baru sekitar 53% dana yang bisa dimanfaatkan oleh siswa, karena baru sekitar 53% yang mencairkan dana tersebut. Konsekuensinya, mayoritas siswa yang menjadi target PIP masih menjadi tanggungan orang tuanya, kebutuhan mereka masih didukung oleh orang tua mereka untuk mengikuti proses kegiatan belajar di sekolah.

Berdasarkan pada data angka absolut target penerima PIP jenjang pendidikan dasar dan menengah sebanyak 17,98 juta siswa. Dari jumlah tersebut siswa SD mengambil porsi terbesar yaitu 10,36 juta siswa. Pada saat pencairan baru sekitar duapertiga siswa yang mencairkan, porsi siswa SD yang mayoritas masih dibiayai oleh orang tuanya untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah.

Tabel 1.1 Realisasi Penyaluran PIP s.d. Desember 2017

Sekolah	Alokasi	Penyaluran	%	Pencairan	%
SD	10.360.614	10.362.746	100	4.485.065	43,3
SMP	4.369.968	4.451.158	101,9	1.916.521	43,1
SMA	1.375.458	1.520.422	110,5	776.073	51,0
SMK	1.879.617	1.828.695	97,3	942.192	51,5
Jumlah	17.985.657	18.163.021	101,0	8.119.851	44,7

Sumber: Kemendikbud (2017).

Hasil kajian Puslitjakdikbud (2017) menemukan bahwa, kendala utama terkait dengan pencairan dana PIP yakni: 1)

adanya birokrasi dan pelayanan bank yang merepotkan dan tidak seragam, misalnya bank terkadang memperlakukan siswa seperti nasabah biasa, sehingga jika ada data yang kurang seperti KTP, atau KK maka dana itu tidak bisa cair, kadang pihak bank penyalur ada yang kurang memahami bahwa KIP juga ada untuk anak-anak yang putus sekolah, yatim/piatu atau yatim piatu; 2) penerima PIP bertempat tinggal di daerah yang kondisinya sulit untuk mengakses ke bank/lembaga penyalur atau tidak ada bank/lembaga penyalur di kecamatan sekolah/tempat tinggal peserta didik; 3) penerima PIP bertempat tinggal di daerah yang kondisi transportasinya sulit sehingga membutuhkan biaya transportasi relatif besar, dan juga armada transportasi terbatas sehingga menyulitkan siswa untuk pergi ke bank mencairkan dana PIP (Puslitjakdikbud, 2017).

Hasil kajian tersebut sejalan dengan beberapa pendapat yang dikemukakan oleh peserta dalam acara diskusi serba serbi Program Indonesia Pintar di Kemendikbud yang diselenggarakan pada tanggal 16 Maret 2018. Nurrohim, salah satu pendiri Sekolah Master Depok (sebuah sekolah alternatif yang diikuti oleh anak-anak dari kalangan marjinal), mengemukakan kendala yang dihadapi siswanya dalam hal pencairan dana PIP, yaitu banyak anak yang tidak memiliki identitas resmi sehingga tidak dapat diproses oleh pihak bank. Peserta yang lain, yaitu Salam, Kadisdik Kabupaten Gowa juga mengungkapkan bahwa seringkali siswa sulit untuk mengakses

bank karena jarak yang terlalu jauh. Hal serupa juga dikemukakan Aditya, salah satu staf KSP (Kantor Staf Presiden) bahwa kebijakan lebih spesifik perlu dilakukan terutama pada daerah yang jauh di pelosok atau daerah pegunungan dan daerah 3T, karena upaya pencairan sendiri memerlukan biaya yang mungkin lebih besar dari besaran dana PIP sendiri.

Jika ditelusuri lebih jauh, pada dasarnya Pemerintah, dalam hal ini Kemendikbud, di tahun 2017 sudah meluncurkan KIP agak lebih berbeda fungsinya dengan sebelumnya, yaitu menjadi KIP Plus (KIP ATM) dan *Smart* KIP. Kemendikbud dan Bank BRI serta BNI meresmikan pendistribusian KIPATM dan *Smart* KIP. Dengan adanya KIP ATM dan *Smart* KIP ini siswa diharapkan bisa lebih mengenal dunia perbankan, dan juga sekaligus sebagai sarana menabung dan menerima dana PIP tadi.

Dengan kegunaan KIP Plus sebagai kartu ATM juga, dapat dilihat apa saja kegiatan yang sudah dilakukan peserta didik dalam menggunakan dana PIP-nya. Penyaluran dan pencairan dana pun diharapkan bisa menjadi lebih mudah. Siswa juga diharapkan dapat dimudahkan karena KIP Plus (KIP ATM) tersebut. Uji coba penggunaan *Smart* KIP dilakukan pertama kali di Yogyakarta, BNI 46 mendapatkan porsi pelaksanaan uji coba *Smart* KIP bagi 142 siswa penerima PIP yang tersebar di 28 SMA Yogyakarta. *Smart* KIP ini memiliki tiga kegunaan yaitu sebagai kartu debit *private label*, *wallet* PIP dan kartu

ATM BRI/BNI. Kartu debit *private label* maksudnya digunakan untuk belanja perlengkapan sekolah di toko dan koperasi sekolah yang menggunakan mesin *Elektronic Data Capture (EDC)* BRI dan BNI. Uang yang dipakai untuk belanja pun berasal dari saldo awal yang ada pada *wallet* PIP sesuai dana PIP yang ditentukan Kemendikbud.

Walaupun model penyaluran KIP ini telah mengalami perubahan dalam bentuk KIP ATM dan *Smart* KIP, namun kenyataannya penyaluran dana kepada penerima KIP melalui kartu *Smart* KIP di tahun 2017, tetap ditemukan banyak tantangan dalam proses penyalurannya, di antaranya adalah perubahan rekening virtual menjadi rekening. Begitu pula dalam hal pencairan dana PIP, karena belum semua daerah, siap untuk mengadakan dan menggunakan mesin *EDC* ataupun mesin ATM. Selain itu juga pencairan dana masih belum maksimal, 24% dana belum dicairkan oleh penerima manfaat, sebagaimana tampak pada tabel berikut.

Tabel 1.2 Potret Penyaluran dan Pencairan – 11 Maret 2018

Kinerja Sekarang	Kinerja yang Diharapkan	Kesenjangan
INPUT: Penyaluran dana PIP: 1. Penyaluran dana Bansos membutuhkan prosedur yang lama dan bertahap sesuai dengan besaran penyaluran anggaran Bansos di Kemenkeu. 2. Membutuhkan satgas untuk proses pendataan PIP dan KIP. 3. Belum optimalnya penyaluran dana PIP oleh lembaga penyalur/bank. 4. <i>Virtual Account (VA)</i>; lambatnya proses pendistribusian/pemberitahuan VA ke sekolah dan siswa; kendala dalam	INPUT: 1. Penyederhanaan prosedur dan tahapan penyaluran dana bantuan sosial di Kemenkeu. 2. Data penerima KIP yang sudah valid di data pendidikan sehingga segera disalurkan di awal tahun anggaran. 3. Penyempurnaan mekanisme/ pola penyaluran dana. 4. Koordinasi aktif dengan pihak sekolah dan siswa penerima. 5. Pelaksana tingkat kab/kota, provinsi menerima sosialisasi <i>smart</i> KIP/KIP Plus.	1. Belum ada penyederhanaan prosedur dan tahapan penyaluran bansos PIP. 2. Data penerima KIP yang belum mutakhir. 3. Adanya aturan dalam penyaluran oleh lembaga penyalur/bank. 4. Tidak semua siswa penerima manfaat KIP dengan cepat mendapatkan informasi dari pihak bank sebagai penerima manfaat KIP. 5. Aliran informasi kebijakan tersendat antar jenjang pemerintahan.

Kinerja Sekarang	Kinerja yang Diharapkan	Kesenjangan
rekening virtual menjadi rekening. 5. Pelaksana tingkat kab/kota, provinsi tidak menerima sosialisasi <i>smart</i> KIP/KIP Plus. Pencairan dana PIP: 1. Pencairan manfaat oleh siswa penerima di bank/ lembaga penyalur: • Antrian yang lama di bank • Jarak yang jauh dari bank/ lembaga penyalur; biaya transportasi dan keamanan • Perlu biaya transportasi apabila pencairan dilakukan secara kolektif 2. Persyaratan pencairan dana PIP yang tidak sesuai dengan	1. Pencairan manfaat; • Tindak lanjut dari adanya surat perjanjian kerja sama (MoU) mengenai penyaluran dan pencairan dana PIP • Bank/lembaga penyalur mendatangi ke sekolah atau UPTD pada tingkat kecamatan untuk pencairan manfaat dana PIP secara tunai • Adanya alokasi dana untuk	1. Pencairan manfaat; • Tidak adanya tindak lanjut nyata dari kontrak kerja sama yang mengatur mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam rangka penyaluran dan pencairan dana PIP • Tidak semua bank/lembaga penyalur yang menyediakan layanan khusus (disamakan dengan nasabah

Kinerja Sekarang	Kinerja yang Diharapkan	Kesenjangan
atauran juknis PIP, misal, KK, akte kelahiran, dsb. 3. Tidak adanya biaya operasional pengelolaan PIP/KIP di provinsi, kab/kota dan bank penyalur.	biaya transportasi untuk pencairan secara kolektif 2. Penyempurnaan Juknis 2017. 3. Kemendikbud, Pemda dan bank penyalur menyediakan biaya pendamping untuk biaya operasional untuk pengelola PIP/KIP di prov/kab/kota dan bank penyalur.	bank umumnya) • Anggaran terbatas 2. Juknis terbaru hasil penyempurnaan belum digunakan. 3. Tidak adanya alokasi dana untuk pengelolaan PIP/KIP dari APBD.
PROSES: 1. Sosialisasi tidak terlaksana dengan baik dan berjenjang sampai ke masyarakat. 2. Koordinasi aktif dan pembagian peran antar pemangku kepentingan belum optimal. 3. Bank/lembaga	PROSES: 1. Sosialisasi terlaksana secara baik dan berjenjang sampai ke masyarakat. 2. Koordinasi aktif dan pembagian peran antar pemangku kepentingan terlaksana secara optimal. 3. Bank/lembaga	1. Sosialisasi yang terencana dan berjenjang belum terlaksana. 2. Mekanisme koordinasi dan pembagian peran antar pemangku kepentingan belum terlaksana. 3. Bank/lembaga penyalur tidak melaksanakan

Kinerja Sekarang	Kinerja yang Diharapkan	Kesenjangan
penyalur tidak segera menginformasikan dana yang akan disalurkan dan dicairkan ke pihak terkait yang sinkron antara pusat dan cabang. 4. Satuan pendidikan tidak optimal perannya sebagai pendampingan untuk mempermudah/ memperlancarkannya tidak memiliki data/informasi sasaran penerima manfaat dana PIP di wilayahnya.	penyalur segera menginformasikan dana yang akan disalurkan dan dicairkan ke pihak terkait yang sinkron antara pusat dan cabang. 4. Satuan pendidikan memaksimalkan perannya dalam pendampingan untuk mempermudah.	perjanjian kerja sama dengan baik. 4. Penerima manfaat dana PIP tidak mengetahui dirinya sebagai sasaran penerima karena tidak memahami cara/prosedur pelaporan ke satuan pendidikan.
OUTPUT: Dana yang disalurkan sebesar 18.163.021.	OUTPUT: Hanya 8.119.851 (44,7%) yang dapat dicairkan.	10.043.170 yang belum dapat dimanfaatkan oleh siswa penerima manfaat dana PIP.

Sumber: Kemendikbud (2017).

Untuk memahami lebih jauh kondisi pelaksanaan/kinerja penyaluran dan pencairan dana PIP saat ini maka dilakukan analisis kesenjangan dengan menggunakan *Input-Proses-Output-Impact* dari Mary Jo Hatch. Hasil pemetaan kesenjangan terhadap pelaksanaan penyaluran dan pencairan dana PIP yang telah berlangsung sejak 2015 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1.2 Analisis Kesenjangan Capaian/Kinerja Penyaluran dan Pencairan PIP

Sekolah	Dana Disalurkan	Dana Dicairkan		Sisa Dana	
SD	4.212.276.300.000	3.160.865.475.000	75%	1.051.410.825.000	25%
SMP	2.697.206.250.000	1.976.349.375.000	73%	720.856.875.000	27%
SMA	1.241.865.000.000	998.842.000.000	80%	243.023.000.000	20%
SMK	1.285.117.000.000	1.058.990.500.000	82%	226.126.500.000	18%
JUMLAH	9.436.464.550.000	7.195.047.350.000	76%	2.241.417.200.000	24%

Berdasarkan Tabel 1.3 di atas, dapat disimpulkan bahwa kesenjangan yang menyebabkan tidak tercapainya kondisi ideal dalam penyaluran dan pencairan dana PIP dapat dirumuskan sebagai berikut: 1) data penerima KIP belum mutakhir; 2) belum disusun program sosialisasi yang terencana dan berjenjang sampai ke level masyarakat; 3) koordinasi aktif yang belum terbangun dan belum optimalnya peran antar pemangku

kepentingan dalam pelaksanaan penyaluran dan pencairan dana PIP.

Selain kesenjangan yang terjadi, adanya model penyaluran dan pencairan seperti KIP Plus dan KIP *Smart* ini belum ada petunjuk yang mengatur secara teknis pelaksanaannya. Masing-masing daerah hanya melaksanakan berdasarkan petunjuk teknis penyaluran dan pencairan dana PIP reguler. Oleh karena itu, perlu analisis yang komprehensif mengenai alternatif pola-pola penyelenggaraan penyaluran dan pencairan dana PIP, baik yang regular/konvensional menggunakan rekening tabungan maupun dengan KIP *Smart*/KIP Plus. Dengan demikian penyaluran dan pencairan dana PIP menjadi lebih mudah dan lancar serta dapat meminimalisir kesenjangan yang terjadi sehingga peningkatan akses pendidikan di semua jenjang dan pendidikan masyarakat dapat terlaksana dengan cepat di seluruh wilayah Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Pemerintah telah melaksanakan PIP dengan pemberian subsidi siswa miskin dalam jumlah dana yang cukup besar. Program tersebut pada hakekatnya merupakan upaya pemerintah yang bertujuan untuk memastikan terlaksananya program pemerataan pendidikan dan perluasan akses pelayanan pendidikan yang bermutu khususnya untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah, peluang keberlanjutan sekolah, dan juga pengurangan angka putus sekolah. Dengan demikian,

diharapkan siswa penerima manfaat dana PIP dapat menggunakan dana tersebut tepat waktu untuk membiayai kebutuhannya agar dapat berangkat ke sekolah dan mengikuti kegiatan belajar mengajar secara rutin. Kebutuhan yang dimaksud adalah biaya transportasi ke sekolah, biaya membeli buku pelajaran, pakaian seragam. Sehingga adanya biaya ini diharapkan dapat mengurangi beban keluarga.

Dari beberapa hasil kajian yang disebutkan pada bagian sebelumnya, (Puslitjakdibud, 2017 dan Kemendikbud 2018) mengindikasikan bahwa mekanisme penyaluran dan pencairan dana PIP selama ini masih belum efektif pelaksanaannya sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam terkait dengan model atau bentuk penyaluran dan pencairan dana PIP yang efektif dan strategi dalam pelaksanaan implementasi model penyaluran dan pencairan dana PIP agar mudah dan lancar. Berdasarkan latar belakang tersebut maka studi ini mengkaji permasalahan yang secara spesifik dirumuskan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimanakah model penyaluran dan pencairan dana PIP?
2. Bagaimanakah strategi dalam implementasi model penyaluran dan pencairan dana PIP agar mudah dan lancar?

C. Tujuan

Tujuan dari studi ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis:

1. Model penyaluran dan pencairan dana PIP;
2. Strategi penyaluran dan pencairan dana PIP dengan melihat dan mempertimbangkan kondisi lingkungan geografis dan infrastruktur bank di daerah sehingga dana dapat dimanfaatkan tepat waktu.

D. Hasil yang Diharapkan

Hasil studi ini diharapkan dapat memperbaiki tata kelola penyaluran dan pencairan dana PIP melalui kajian model penyaluran dan pencairan dana PIP. Kajian ini melihat dan mempertimbangkan keberagaman kondisi lingkungan dan kesediaan infrastruktur bank penyalur di daerah, sehingga pemanfaatan dana PIP oleh siswa penerima dapat tepat waktu. Dan pada akhirnya mampu meningkatkan partisipasi anak usia sekolah untuk mendapatkan layanan pendidikan dasar dan menengah sampai tamat pada satuan-satuan pendidikan.

E. Ruang Lingkup

Penelitian ini dilakukan pada satuan pendidikan formal SDN, SMPN, SMAN, dan SMKN. Studi ini akan menganalisis alternatif pola penyelenggaraan PIP terutama terkait dengan penyaluran dan pencairan dana PIP berdasarkan implementasi

tahun-tahun sebelumnya. Studi ini dilakukan pada satuan pendidikan dasar dan menengah negeri di bawah naungan penyelenggaraan Kemendikbud. Sasaran siswa adalah siswa dari keluarga miskin yang memperoleh dana PIP tahun 2017. Sementara lokasi sampel sebagai pendalaman kasus akan dilaksanakan di daerah pedesaan dan perkotaan.

2

TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab 2 membahas tentang kajian literatur yang terkait dengan pelaksanaan PIP sebagaimana yang telah dirumuskan pada tujuan penelitian yaitu: (i) mengidentifikasi dan menganalisis model penyaluran dan pencairan dana PIP; (ii) menganalisis strategi penyaluran dan pencairan dana PIP dengan melihat dan mempertimbangkan kondisi lingkungan geografis dan infrastruktur bank di daerah sehingga dana dapat dimanfaatkan tepat waktu.

A. Program Indonesia Pintar

Hingga saat ini disparitas partisipasi sekolah antarkelompok masyarakat di Indonesia masih cukup tinggi. Partisipasi pendidikan keluarga yang mampu secara ekonomi umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan partisipasi pendidikan keluarga tidak mampu. Salah satu alasannya adalah tingginya biaya pendidikan baik biaya langsung maupun tidak langsung. Biaya langsung meliputi antara lain iuran sekolah, buku, seragam, dan alat tulis, sementara biaya tidak langsung meliputi

antara lain biaya transportasi, kursus, uang saku dan biaya lain-lain.

Untuk membantu meningkatkan pendidikan bagi masyarakat tidak mampu, Pemerintah membuat Program Indonesia Pintar sebagaimana yang tertuang dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014. Program Indonesia Pintar adalah pemberian bantuan tunai kepada anak usia sekolah yang berasal dari keluarga kurang mampu yang ditandai dengan pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebagai kelanjutan dari Program Bantuan Siswa Miskin. Kartu Indonesia Pintar diberikan kepada anak usia sekolah yang berasal dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dengan maksud untuk menjamin seluruh anak usia sekolah dapat menempuh pendidikan sampai lulus ke jenjang pendidikan menengah.

Cakupan Program Indonesia Pintar mencapai 20,3 juta anak usia sekolah, termasuk anak usia sekolah penyandang masalah kesejahteraan sosial dan anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu. KIP mencakup pula anak usia sekolah yang tidak berada di sekolah seperti anak jalanan, pekerja anak-anak, anak yang berada di panti asuhan dan anak difable. KIP berlaku juga kepada anak yang berada di pondok pesantren, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan anak yang berada di Balai Latihan Kerja (BLK).

1. Cakupan dan Tujuan PIP

Cakupan penerima manfaat Program Indonesia Pintar pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meliputi siswa Sekolah Dasar (SD), siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP), siswa Sekolah Menengah Atas (SMA), dan siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) hingga warga belajar/peserta yang berada di PKBM dan BLK. Tujuan dari program ini antara lain:

- a. Meningkatkan akses bagi anak usia 6-21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah untuk mendukung pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal/Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun.
- b. Mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (*drop out*) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi.
- c. Menarik siswa putus sekolah (*drop out*) atau tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah/Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) maupun lembaga kursus dan pelatihan.

2. Sasaran PIP

Sasaran Program Indonesia Pintar (PIP) baik siswa sekolah formal maupun anak didik dari lembaga pendidikan nonformal (SKB/PKBM/lembaga kursus dan pelatihan) diprioritaskan kepada:

- a. Penerima BSM 2014 pemegang KPS yang ada dalam Dapodik;
- b. Siswa/anak dari keluarga pemegang KPS/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang belum menerima BSM 2014;
- c. Siswa/anak dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH) non KPS;
- d. Siswa/anak yang berstatus yatim piatu/yatim/piatu dari panti sosial/panti asuhan;
- e. Siswa/anak yang terkena dampak bencana alam;
- f. Anak usia 6-21 tahun yang tidak bersekolah (*drop out*) yang diharapkan kembali bersekolah;
- g. Siswa/anak dari keluarga miskin/rentan miskin yang terancam putus sekolah;
- h. Siswa/anak dengan pertimbangan khusus lainnya seperti kelainan fisik, korban musibah berkepanjangan, siswa dari orang tua terkena PHK, siswa di daerah konflik sosial, siswa dari keluarga terpidana, anak berada di LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan), dan siswa memiliki lebih dari 3 (tiga) saudara tinggal serumah; dan
- i. Siswa dari SMK yang menempuh studi keahlian kelompok bidang: Pertanian (bidang Agrobisnis dan Agroteknologi), Perikanan, Peternakan, Kehutanan dan Pelayaran/Kemaritiman.

Siswa/anak yang berasal dari prioritas sasaran penerima PIP, dapat diusulkan dengan syarat sebagai berikut:

a. Siswa Pendidikan Formal:

- 1) Terdaftar sebagai siswa/peserta didik pada sekolah;
- 2) Terdaftar dalam Dapodik sekolah; dan
- 3) Diusulkan oleh sekolah melalui dinas pendidikan kabupaten/kota ke direktorat teknis di Kemdikbud.

b. Anak Didik Lembaga Pendidikan Non-Formal:

- 1) Terdaftar sebagai anak didik pada SKB/PKBM/lembaga kursus dan pelatihan;
- 2) Diusulkan oleh SKB/PKBM/lembaga kursus dan pelatihan melalui dinas pendidikan kabupaten/kota ke direktorat teknis di Kemdikbud.

c. Anak Usia Sekolah yang Tidak Bersekolah:

- 1) Terdaftar kembali di sekolah/SKB/PKBM/lembaga kursus dan pelatihan.
- 2) Diusulkan oleh sekolah/SKB/PKBM/lembaga kursus dan pelatihan melalui dinas pendidikan kabupaten/kota ke direktorat teknis di Kemdikbud.

B. Penyaluran dan Pencairan Dana PIP

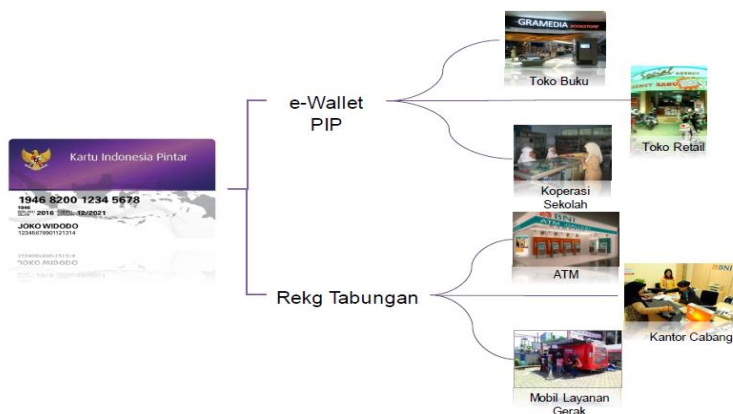
Untuk mewujudkan nawacita kelima (5) yakni meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, sekaligus sebagai upaya untuk mempercepat program prioritas Kemendikbud yakni terwujudnya Wajib Belajar 12 Tahun, di tahun 2017 Kemendikbud meluncurkan KIP Plus (KIP ATM) yang bekerja

sama dengan lembaga perbankan. Peluncuran KIP Plus ini diharapkan siswa lebih mengenal dunia perbankan, juga sebagai sarana menabung dan menerima dana PIP.

Pada tahun yang sama juga yaitu tahun 2017, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang ditunjuk sebagai lembaga penyalur untuk menyalurkan dana PIP dengan cara menggunakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang disebut dengan *Smart KIP*. Penerapan *Smart KIP* ini diujicobakan di sejumlah sekolah di Yogyakarta. *Smart KIP* merupakan kartu elektronik yang diberikan kepada penerima PIP yang di dalamnya ditanamkan dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi untuk mengakses rekening Tabungan Simpanan Pelajar (SimPel) dan rekening *e-wallet*. Sebagai tabungan, Tabungan SimPel dan KIP akan menjadi sarana penyimpanan dana PIP. Sehingga dapat ditarik dan ditransaksikan kapan pun sesuai kebutuhan siswa penerima KIP. Rekening Simpanan Pelajar dapat digunakan bertransaksi di seluruh *Merchant* BNI dan BRI. Sebagai *e-wallet*, dana PIP dapat digunakan untuk membeli perlengkapan sekolah secara nontunai, di koperasi sekolah, toko perlengkapan sekolah, toko buku atau *merchant* yang bertanda khusus menerima KIP dan sudah menjadi Agen 46 (Agen Laku Pandai BNI) sesuai dengan kuota dana PIP yang telah ditetapkan. Pencairan dana bantuan PIP ini dapat dilakukan di ATM dan *teller* BNI atau BRI untuk dana yang ada di rekening tabungannya.

Implementasi *Smart* KIP ini sejalan dengan Gerakan Nasional Non Tunai dari Bank Indonesia (BI) dan program peningkatan inklusi dan literasi keuangan yang digagas Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pada program ini BNI/BRI menggunakan rekening BNI/BRI SimPel untuk penyalurannya, sehingga diharapkan akan memberikan edukasi menabung bagi siswa penerima PIP.

Hingga saat ini inovasi kartu elektronik terus dilakukan, sehingga ke depan siswa dapat menarik dana pendidikan pada *Smart* KIP ataupun KIP plus melalui Anjungan Mesin Tunai (ATM). Untuk lebih jelas fungsi *Smart* KIP dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut.



Gambar 2.1 Fungsi *Smart* KIP

C. Hasil Penelitian Terdahulu

Paska (2016) melakukan monitoring dan evaluasi tentang *Smart KIP*. Pengambilan data dilakukan pada 170 responden yang menerima *Smart KIP* pada jenjang SMP, SMA dan SMK yang tersebar di 6 sekolah di Yogyakarta. Keenam sekolah tersebut adalah SMPN 12 Yogyakarta, SMPN 15 Yogyakarta, SMAN 4 Yogyakarta, SMAN 10 Yogyakarta, SMKN 2 Yogyakarta dan SMKN 7 Yogyakarta. Penelitian ini melibatkan 50 siswa dari jenjang SMP, 24 siswa dari jenjang SMA dan 96 siswa dari jenjang SMK. Hasil monev menjelaskan bahwa:

1. Mayoritas penerima *Smart KIP* mendukung adanya program *Smart KIP*, walaupun tingkat penerimaan lebih besar pada jenjang SMK yaitu sebesar 90% dibandingkan SMP yang hanya sebesar 64%.
2. Alasan yang membuat para siswa SMP penerima *Smart KIP* mendukung program ini yaitu mempermudah perbelanjaan (69%). Sedangkan siswa SMA dan SMK, alasan yang dipilih lebih banyak menitikberatkan pada penggunaan *Smart KIP* dapat membantu keuangan pribadi (masing-masing 69% dan 60%) yang berarti mereka dengan mudah bisa mengatur uang KIP agar dapat dipergunakan untuk kepentingan sekolah.
3. Kendala yang dialami oleh penerima *Smart KIP* yaitu bahwa tidak semua toko di sekitar sekolah menerima transaksi yang menggunakan *Smart KIP* (60% dari yang

tidak mendukung *Smart KIP*), lokasi ATM yang terlalu jauh sehingga mereka tidak dengan mudah bisa mencairkan manfaat *Smart KIP* dan juga kurangnya pengetahuan tentang cara penarikan tunai juga menjadi kendala untuk mencairkan manfaat (35% siswa dari siswa SMP).

4. Dari 170 peserta hanya kurang dari 25% yang menggunakan *Smart KIP* untuk berbelanja di koperasi sekolah dan semua siswa tersebut berasal dari jenjang SMK.
5. Responden siswa (54%) mengaku tidak menemui kendala saat menggunakan *Smart KIP* untuk berbelanja. Namun walau persentasenya kecil, beberapa penerima *Smart KIP* mengaku mengalami kendala yaitu transaksi menjadi lebih lama, mesin KIP tidak dapat digunakan dan barang yang ada di koperasi sekolah tidak lengkap.
6. Begitu pula untuk ketepatan waktu, data dari hasil rekapitulasi penyaluran dan pencairan dana, di mana yang seharusnya untuk waktu pencairan dana adalah pada awal tahun ajaran, namun kenyataannya banyak siswa menerima dana PIP pada waktu yang tidak menentu.

Selanjutnya, kajian yang dilakukan oleh Puslitjakdikbud, Kemdikbud tahun 2017, tentang “Evaluasi Implementasi KIP ATM di Daerah Kunjungan Kerja Presiden RI” diarahkan untuk memberikan tiga rekomendasi kebijakan guna menjawab permasalahan yang dihadapi dalam program tersebut.

1. Pertama, strategi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pihak-pihak lain yang berkepentingan melaksanakan pendistribusian KIP ATM ditinjau dari segi bank penyalur, dinas pendidikan, sekolah, dan orang tua.
2. Kedua, strategi pencairan KIP ATM ditinjau dari segi ketepatan besarnya dana yang dicairkan sesuai ketentuan, waktu pencairan dan prosedur pencairan.
3. Ketiga, efektivitas pemanfaatan kartu KIP ATM oleh siswa ditinjau dari dana bantuan pendidikan PIP (perlengkapan sekolah, berbelanja keperluan belajar di *merchant* yang ditunjuk oleh bank ataupun di koperasi sekolah yang memiliki fasilitas mesin *Electronic Data Capture (EDC)* dan juga terkait dengan dana personal siswa (transport, jajan siswa), lainnya (di luar ketentuan).

Berdasarkan arah kajian, maka hasil temuan dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Pencairan dana KIP ATM umumnya dianggap mudah, sehingga sebagian besar siswa mencairkan dana PIP mereka dengan cara diambil sendiri menggunakan fasilitas mesin ATM, namun demikian ada juga yang diambil secara kolektif, diambil sendiri ke bank, dan bank yang mendatangi mereka ke sekolah karena belum bisa mengoperasikan mesin ATM terutama pada siswa SD.
2. Rata-rata siswa sudah menggunakan fasilitas kartu ATM untuk mengambil dana PIP di ATM baik informasi dari siswa (72,4%) maupun pihak sekolah (84,2%).

3. Kendala utama yang dihadapi dalam pencairan dana PIP dengan fasilitas KIP ATM adalah masih sedikitnya mesin ATM 85,5%; birokrasi dan pelayanan bank/lembaga penyalur 50%, namun bila mesin ATM tersebut banyak tersedia di wilayah mereka secara teknis tidak mengalami kendala (75%), terutama dalam mengoperasikannya, sehingga pencairan dapat dilakukan. Meski mudah dalam pencairan dana tapi dalam persyaratan yang sudah ditentukan mereka harus tetap perlu melengkapinya pada saat mengambil ATM dan buku rekening dari bank.
4. Kesulitan dalam mencairkan dana di bank penyalur yaitu ada sebanyak 20,5% menyatakan ada kesulitan dengan alasan: (1) jarak tempuh; (2) informasi yang tidak jelas tentang tata cara pencairan. Selebihnya 7,5% responden siswa menyatakan bahwa tidak ada kesulitan dalam mencairkan dana manfaat.
5. Pandangan peserta didik terkait dengan pemberian/penggunaan KIP ATM dan buku tabungan memberikan nilai yang positif, karena hampir semua yaitu 90,7% responden siswa menyatakan bahwa sudah tepat mereka mendapatkan KIP ATM dan buku tabungan, meski ada juga/sebagian kecil yang menyatakan tidak tepat (3,1%) dengan alasan fasilitas ATM yang jauh, resiko hilang kartu dan ada juga yang belum tahu menggunakan kartu ATM.
6. Responden kepala sekolah mengungkapkan bahwa pemberian penggunaan fasilitas KIP ATM sangat tepat

(86,4%). Berbagai alasan yang dikemukakan antara lain: memudahkan pengambilan/pencairan dana (60,8%), mengurangi biaya transport peserta didik (40,5%), dan menjaga kedisiplinan peserta didik (2,3%).

7. Responden dinas pendidikan menyatakan penyaluran dana PIP fasilitas KIP ATM menimbulkan beberapa kendala utama, yaitu KIP ATM rentan disalahgunakan dan masih banyaknya pemegang atau penerima yang belum memahami cara menggunakan mesin ATM. Sehingga pihak sekolah tetap harus berusaha untuk mengarahkan siswa dalam menggunakan dana tersebut sebaik mungkin untuk memenuhi kebutuhan sekolah.

Kajian Puslitjakdikbud (2017) lainnya yaitu yang terkait dengan KIP Non-ATM dengan respondennya seluruh jenjang pendidikan dari SD, SMP, SMA, SMK, dan paket A, B, C. Kajian ini menyoroti hal yang sama terkait dengan pencairan dana PIP. Hasil temuan menunjukkan bahwa kendala utama terkait dengan bank, yaitu masalah dalam birokrasi dan pelayanan pihak bank. Dalam beberapa hal, ini menjadi alasan yang wajar, karena bank sebagai lembaga bisnis, bank ingin memastikan para nasabahnya *prudent*. Bank memiliki nasabah lain yang keberadaannya lebih menguntungkan secara bisnis sehingga mendapatkan prioritas dibandingkan dengan penerima PIP. Masalah yang lain terkait bank adalah jarak lokasi bank dari rumah atau sekolah. Hal tersebut dikeluhkan oleh sekitar 70% responden. Terutama di daerah pedesaan, yang tidak mudah

menemukan bank di daerah dekat dengan wilayah pemukiman. Hal ini membuat orang tua tidak bersemangat untuk mencairkan dana di bank. Temuan lain yang paling menjadi sorotan adalah banyaknya penerima PIP yang pada dasarnya tidak layak menerima tetapi menerima. Di Kabupaten Banyumas misalnya, terdapat laporan adanya anak dokter dan beberapa anak orang yang mampu mendapatkan PIP. Dengan demikian solusi yang perlu dilakukan adalah proses pembaharuan dan pemadanan data sehingga kesalahan target atau sasaran penerima dapat diminimalisasi.

Beberapa kajian lain yang dipublikasikan yang mengangkat persoalan-persoalan seputar PIP yaitu Lusiana (2018) yang menyoroti tentang pelaksanaan PIP di dua sekolah dasar negeri di Kabupaten Penajam Paser Utara, dan juga Saraswati (2017) yang juga mengkaji pengelolaan PIP untuk jenjang SD di Kota Samarinda, serta Haryanti (2016) yang menganalisis kesiapan institusi Pemerintah dalam pelaksanaan PIP di tingkat SMA di Jakarta Selatan. Kajian-kajian tersebut menyajikan temuan persoalan yang bersifat teknis seperti akurasi data yang mengakibatkan banyak penerima yang seharusnya tidak menerima, juga terkait adanya sosialisasi yang tidak maksimal dilakukan sehingga banyak orang tua yang kurang paham serta koordinasi yang kurang dari Pemerintah dalam kaitannya dengan KIP dan KJP yang membuat PIP menjadi tidak dapat dilaksanakan di Jakarta.

Kajian-kajian PIP yang sudah dilakukan dari analisis dan sasarannya tidak mencakup hal-hal yang paling penting di lapangan seperti bank penyalur dana, orang tua siswa dan siswa penerima PIP. Bank penyalur secara langsung berhubungan dengan masalah-masalah yang ada terkait dengan penyaluran dan pencairan. Permasalahan terkait pencairan dana tidak akan dapat digambarkan secara jelas tanpa melibatkan pandangan/perspektif dari mereka. Oleh karena itu, kajian terkait penyaluran dan pencairan ini penting untuk dilakukan.

3

METODOLOGI

A. Pendekatan Kajian

Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk memperoleh data tentang pola penyaluran dan pencairan dana PIP, cara dan mekanisme dalam penyaluran dan pencairan serta strategi untuk mengimplementasikannya. Data tersebut dianalisis secara kualitatif.

B. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi kajian ini adalah dinas pendidikan, satuan pendidikan, dan bank penyalur di seluruh wilayah Republik Indonesia. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposif sampling*. Dasar pengambilan sampel purposif dilakukan dengan pertimbangan untuk melihat hingga sejauhmana implementasi pelaksanaan PIP di wilayah yang penyaluran dan pencairannya lancar dan tidak lancar.

Berikut tabel implementasi penyaluran dan pencairan dana PIP di seluruh provinsi untuk seluruh jenjang pendidikan (SD, SMP, SMA dan SMK) pada tahun 2017.

Tabel 3.1 Penyaluran dan Pencairan Dana PIP di Setiap Provinsi Tahun 2017

Provinsi	Disalurkan (jumlah siswa)	Dicairkan (jumlah siswa)	%
Prov. DI Yogyakarta	288.462	266.198	92,28%
Prov. Sulawesi Tenggara	301.460	274.912	91,19%
Prov. Jawa Tengah	2.591.741	2.339.196	90,26%
Prov. Kepulauan Bangka Belitung	55.194	49.154	89,06%
Prov. Sulawesi Barat	144.223	126.290	87,57%
Prov. Sulawesi Selatan	754.405	658.242	87,25%
Prov. Jawa Timur	2.190.163	1.908.818	87,15%
Prov. Aceh	580.466	500.205	86,17%
Prov. Bengkulu	169.792	145.308	85,58%
Prov. Kalimantan Selatan	196.867	167.790	85,23%
Prov. Sumatera Barat	471.498	400.243	84,89%
Prov. Gorontalo	128.587	109.011	84,78%
Prov. Jawa Barat	3.081.137	2.587.456	83,98%
Prov. Riau	374.498	313.599	83,74%
Pov. Bali	240.179	199.183	82,93%
Prov. Maluku	176.346	145.056	82,26%
Prov. Banten	593.225	484.613	81,69%
Prov. Lampung	681.680	553.444	81,19%

Provinsi	Disalurkan (jumlah siswa)	Dicairkan (jumlah siswa)	%
Prov. Sulawesi Tengah	257.671	208.298	80,84%
Prov. Sumatera Selatan	632.143	509.428	80,59%
Prov. Sumatera Utara	1.211.860	969.411	79,99%
Prov. Kepulauan Riau	94.679	75.679	79,93%
Prov. Sulawesi Utara	163.811	130.562	79,70%
Prov. Nusa Tenggara Barat	505.213	402.027	79,58%
Prov. Kalimantan Utara	39.776	31.354	78,83%
Prov. Kalimantan Barat	369.460	291.120	78,80%
Prov. Jambi	242.847	190.799	78,57%
Prov. Nusa Tenggara Timur	820.887	634.316	77,27%
Prov. Kalimantan Tengah	130.651	100.479	76,91%
Prov. Kalimantan Timur	155.123	116.834	75,32%
Prov. Maluku Utara	86.221	62.187	72,13%
Prov. Papua	213.893	142.990	66,85%
Prov. Papua Barat	86.139	54.834	63,66%
Prov. DKI Jakarta	217.990	32.383	14,86%

Sumber: <https://pip.kemdikbud.go.id/wilayah/data2017>

Dari Tabel 3.1, terlihat bahwa daerah yang penyaluran bantuan PIP terbanyak adalah Provinsi Jawa Barat yakni sebanyak 3.081.137 siswa, kemudian disusul oleh Provinsi Jawa Tengah (2.591.741 siswa), Provinsi Jawa Timur (2.190.163 siswa) dan Provinsi Sumatera Utara (1.211.860 siswa). Sedangkan daerah yang penyaluran bantuan PIP paling sedikit adalah Provinsi Kalimantan Utara (39,776 siswa). Namun, jika dilihat dari sisi

persentase antara penyaluran dan pencairan, provinsi paling besar pencairannya adalah Provinsi DI Yogyakarta yakni sebesar 92,28%. Sedangkan daerah yang paling kecil persentase antara penyaluran dan pencairan adalah Provinsi DKI Jakarta. Kecilnya penyaluran dan pencairan dana PIP di DKI Jakarta disebabkan karena DKI Jakarta juga memiliki bantuan siswa miskin yang dianggarkan dari dana APBD DKI.

Studi ini akan mengambil lima provinsi/kabupaten/kota sebagai daerah pendalaman penelitian. Penentuan lokasi dilakukan berdasarkan daerah yang lancar dan kurang lancar dalam penyaluran dan pencairan dana PIP. Berdasarkan Tabel 3.1 di atas, pemilihan lima lokasi sampel penelitian ditentukan dengan mempertimbangkan persentase jumlah antara penyaluran dan pencairan PIP serta keterwakilan wilayah barat, tengah dan timur. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, daerah sampel penelitian dipilih sebagai berikut:

Tabel 3.2 Provinsi Lokasi/Sasaran Penelitian

Provinsi	Disalurkan (Rp)	Dicairkan (Rp)	%
Prov. DI Yogyakarta	151.061.675.000	141.942.400.000	93,96
Prov. Jawa Barat	1.610.015.250.000	1.390.073.475.000	86,34
Prov. Sumatera Utara	629.379.675.000	523.227.475.000	83,13
Prov. Kalimantan Timur	81.041.950.000	63.422.125.000	78,26
Prov. Maluku Utara	45.893.275.000	35.106.675.000	76,50

Dari lima provinsi tersebut, dipilih lagi kabupaten/kota berdasarkan pertimbangan yang telah dijelaskan sebelumnya, sehingga kabupaten/kota yang terpilih adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Kabupaten/Kota Lokasi/Sasaran Penelitian

Provinsi	Kab/Kota	Disalurkan (Rp)	Dicairkan (Rp)	%
D.I. Yogyakarta	Kota Yogyakarta	14.257.600.000	12.728.800.000	89,28
Jawa Barat	Kab. Indramayu	69.592.225.000	58.431.850.000	83,96
Sumatera Utara	Kab. Batubara	14.725.125.000	10.864.350.000	73,78
Kalimantan Timur	Kab. Kutai Kartanegara	16.136.350.000	11.625.900.000	72,05
Maluku Utara	Kota Ternate	5.846.700.000	4.486.025.000	76,73

Dari lima sampel yang dipilih tersebut merupakan daerah dengan kategori persentase pencairannya tergolong lambat (Kabupaten Batubara, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Ternate) dibanding kabupaten/kota lainnya tergolong cepat (Kota Yogyakarta dan Kabupaten Indramayu).

C. Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data dan belum diolah oleh

pihak mana pun. Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian ini adalah *self-administered* daftar pertanyaan dan Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT).

Selain daftar pertanyaan, data yang diperoleh melalui Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) untuk menggali persepsi kolektif mengenai pelaksanaan implementasi penyaluran dan pencairan PIP serta menggali informasi bentuk/model penyaluran dan pencairan dana PIP yang lebih efektif. Total peserta DKT yang dilaksanakan di setiap kabupaten/kota berjumlah 18 orang, yang terdiri dari 2 orang dari unsur dinas pendidikan, 8 orang kepala sekolah dari sekolah yang siswanya penerima PIP, 2 orang dari bank penyalur, 2 orang tua siswa penerima PIP, dan 4 siswa penerima PIP. Berikut adalah rincian jenis dan jumlah peserta DKT di setiap kabupaten/kota lokasi studi.

Tabel 3.4 Daftar Peserta Diskusi Kelompok Terpumpun per Kabupaten/Kota

No.	Peserta	Jml	Penghubung
1.	Perwakilan dinas provinsi untuk wilayah kabupaten/kota setempat	1	Dinas pendidikan provinsi
2.	Kepala dinas pendidikan kabupaten/kota	1	Dinas pendidikan kab/kota
3.	Kepala SD dan SMP penerima PIP	4	Dinas pendidikan kab/kota

No.	Peserta	Jml	Penghubung
4.	Kepala SMA dan SMK penerima PIP (masing-masing 2 orang)	4	Dinas pendidikan provinsi
5.	Pengelola PIP pada lembaga penyalur (masing-masing dari BRI dan BNI 1 orang)	2	Dinas pendidikan kab/kota
6.	Peserta didik SD dan SMP penerima PIP (masing-masing 1 orang)*	2	Dinas pendidikan kab/kota
7.	Peserta didik SMA dan SMK penerima PIP (masing-masing 1 orang)*	2	Dinas pendidikan provinsi
8.	Orang tua/wali siswa SD dan SMP Penerima KIP (masing-masing 1 orang)*	2	Dinas pendidikan kab/kota
Jumlah		18	

Keterangan: *) Untuk siswa dan orang tua/wali siswa dari masing-masing jenjang pendidikan, diambil dari **salah satu** sekolah yang diundang.

D. Analisis Data

Kajian yang dilakukan ini adalah mengetahui secara mendalam tentang model penyaluran dan pencairan yang saat ini sudah atau sedang berjalan. Selain itu menganalisis kelemahan dan kelebihan model serta merekomendasikan model yang dianggap efektif untuk penyaluran dan pencairan dana PIP. Penyusunan/identifikasi model dilakukan melalui forum diskusi dan FGD. Diskusi dilakukan untuk memperoleh gambaran umum cara penyaluran dan pencairan dana dan harapan-

harapan terkait penyaluran dan pencairan dana PIP. Hasil diskusi tersebut dijadikan input dalam mengkategorikan model. Model yang sudah teridentifikasi didiskusikan kepada pemangku kepentingan terkait untuk dijadikan masukan sebagai model yang dianggap efektif.

4

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas temuan dan pembahasan berdasarkan pendalaman (verifikasi dan validasi) yang bersumber dari data primer dan sekunder.

A. Implementasi PIP di Lokasi Daerah Kajian

1. Pelaksanaan PIP di Kota Ternate

Sosialisasi dan edukasi tentang PIP di Kota Ternate sudah terlaksana dengan baik. Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota), Bank Penyalur dan Sekolah dilakukan secara berjenjang dan menggunakan berbagai metode. Kemendikbud dalam hal ini direktorat teknis dari masing-masing jenjang baik SD, SMP, SMA dan SMK mengundang untuk mengikuti rakor PIP, membuat aplikasi khusus untuk perkembangan PIP serta membuat jejaring maya (WA/Telegram, *Group*) agar bisa berkoordinasi terkait dengan pelaksanaan Program Indonesia Pintar. Selanjutnya Pemerintah Daerah baik tingkat provinsi

dan kabupaten/kota juga mengadakan rapat koordinasi untuk menginformasikan PIP, memberikan pesan singkat (sms) jika ada perkembangan SK terbaru kepada kepala sekolah serta membantu koordinasi dengan bank penyalur agar proses pencairan berjalan dengan lancar. Salah satu bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh kepala sekolah/guru yaitu jika ada informasi SK terbaru, mereka langsung mengundang orang tua/wali murid untuk membahas proses aktivasi dan pencairan serta kesiapan dokumen. Pada saat DKT hampir semua peserta menginginkan agar dilakukan sosialisasi kepada sekolah, sehingga informasi tentang PIP dapat diterima seluruh sekolah yang ada di Kota Ternate. Walaupun Kota Ternate termasuk daerah yang sulit karena ada daerah yang harus dilalui dengan menyeberang laut untuk mencapai bank dalam melakukan penyaluran dan pencairan dana PIP-nya, namun pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bisa berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya informasi terkait PIP dapat merata diterima baik oleh semua jajaran instansi terkait hingga sampai ke sekolah.

Terkait dengan informasi SK penerima PIP dari pusat dan bank penyalur kepada peserta didik melalui dinas pendidikan/sekolah tampaknya tidak begitu lancar. Pemerintah Daerah dan sekolah selalu menunggu kepastian diterbitkannya SK yang berisikan daftar penerima PIP yang dikeluarkan oleh direktorat teknis. Peserta diskusi menyampaikan agar jangan sampai SK keluar masih terdapat siswa yang sudah lulus, seperti tahun 2017

banyak siswa di sekolah yang ditetapkan sebagai penerima PIP, namun posisinya sudah lulus dari sekolah. Peserta diskusi juga mengungkapkan bahwa pernah mendapatkan SK dari direktorat teknis tanggal peng-SK-an dan tanggal diterima berjarak 3 bulan lebih. Peserta mengharapkan jika SK sudah terbit dan proses perbankan sudah selesai, dinas dan sekolah dapat langsung mendapatkan informasi SK tersebut, intinya dalam hal ini terbitnya SK bagi siswa yang berhak menerima harus dapat dipercepat sehingga proses selanjutnya bisa dilakukan.

Selanjutnya untuk masalah penyaluran dan pencairan dana PIP di Kota Ternate tampaknya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Informasi yang disampaikan oleh beberapa peserta secara umum dapat terlaksana, tidak terdapat kendala yang berarti, terutama pada proses pencairan di bank. SK yang keluar sudah sesuai dengan kriteria penerima dana PIP yakni berasal dari keluarga yang tidak mampu. Namun, yang masih perlu menjadi perhatian adalah usulan penerima PIP bagi pemangku kepentingan yang dinilai tidak pas dan justru menimbulkan banyak pertanyaan di lapangan, sehingga harapannya tidak perlu mengakomodir dari usulan pemangku kepentingan tersebut. Menurut hemat peserta DKT perlu diadakan kembali Format Usulan Sekolah (FUS) yang saat ini sudah tidak diberlakukan lagi. Selain itu, peserta juga mengungkapkan bahwa pada saat itu belum ada kejelasan penerima dana PIP yang berasal dari usulan sekolah melalui Dapodik karena yang

di-SK-kan tidak seluruhnya berasal dari usulan sekolah. Sehingga FUS tersebut praktis memang sudah tidak ada lagi. Peserta FGD juga mengungkapkan beberapa penerima PIP yang sudah di-SK-kan ternyata sudah lulus dari sekolah, sehingga sekolah merasa kesulitan untuk memberitahukan kepada siswa yang menerima PIP. Hal ini membuat pencairan di beberapa sekolah menjadi sedikit jumlahnya. Masalah ini diduga karena yang tidak mencairkan adalah penerima yang memang sudah lulus dan tidak bersekolah lagi. Tabel 4.1 berikut menjelaskan kondisi penyaluran dan pencairan dana PIP di Kota Ternate.

Tabel 4.1 Penyaluran dan Pencairan Dana PIP, Maluku Utara 2018

Kabupaten/Kota	Disalurkan	Dicairkan	%
Kab. Halmahera Barat	8.486.525.000	6.362.675.000	75%
Kab. Halmahera Selatan	5.050.350.000	3.613.300.000	72%
Kab. Halmahera Tengah	2.651.300.000	1.861.700.000	70%
Kab. Halmahera Timur	3.317.150.000	2.963.425.000	89%
Kab. Halmahera Utara	8.268.125.000	5.732.900.000	69%
Kab. Kepulauan Morotai	3.943.725.000	2.990.200.000	76%
Kab. Kepulauan Sula	3.568.875.000	3.186.450.000	89%
Kab. Pulau Taliabu	1.488.400.000	969.150.000	65%
Kota Ternate	5.846.700.000	4.486.025.000	77%
Kota Tidore Kepulauan	3.272.125.000	2.940.850.000	90%

Sumber: <http://sipintar.kemdikbud.go.id> (Data per 24 Juli 2018).

Dari Tabel 4.1, penyaluran dan pencairan dana bantuan PIP untuk Kota Ternate masih belum optimal karena baru tercapai 77%. Hasil FGD juga menunjukkan angka yang sama bahwa penyaluran dan pencairan dana PIP menurut operator Disdik baru mencapai 77%. Terhambatnya penyaluran dan pencairan tersebut diduga banyak faktor penyebabnya. Salah satu faktor adalah masih belum sinkronnya data siswa yang ada di bank dan juga pelayanan bank yang tidak sama, yang mempersyaratkan berbagai aturan administrasi seperti akte kelahiran, atau KTP orang tua siswa, dan sebagainya. Oleh sebab itu, orang tua siswa banyak yang enggan/keberatan untuk melakukan pencairan dana PIP, karena tidak mempunyai persyaratan yang diperlukan tersebut.

Tabel 4.2 Penyaluran dan Pencairan Dana PIP Per Satuan Pendidikan

Satuan Pendidikan	Disalurkan	Dicairkan	%	Disalurkan	Dicairkan	%
SD	3.398	2.609	76,78%	1.394.325.000	1.083.150.000	77,68%
SMP	1.707	1.242	72,76%	1.014.375.000	757.875.000	74,71%
SMA	2.509	1.867	74,41%	2.090.500.000	1.605.000.000	76,78%
SMK	1.715	1.274	74,29%	1.347.500.000	1.040.000.000	77,18%
Sub Total	9.329	6.992	74,95%	5.846.700.000	4.486.025.000	76,73%

Sumber: <http://sipintar.kemdikbud.go.id> (2018).

Jika dilihat dari kinerja pencairan per satuan pendidikan, jumlah yang masih belum optimal pencairannya adalah di satuan pendidikan SMP, yang baru mencapai 74%. Kondisi ini hampir sama dengan keterlambatan pencairan secara umum di Kota Ternate, yaitu disebabkan karena masih terdapat ketidakcocokan data siswa dan data yang ada di bank. Selain itu juga faktor geografis yang sulit karena Kota Ternate merupakan kota kepulauan, sehingga dalam penyaluran dan pencairan kadang menemui kendala.

Terkait dengan pelayanan aduan informasi oleh Dinas Pendidikan Kota Ternate bisa berjalan dengan lancar, pusat selalu merespon jika ada masalah ataupun pertanyaan. Namun di tingkat sekolah, ternyata tidak mengetahui adanya informasi layanan pengaduan, dan juga tidak mengetahui alamat pengaduan yang ada di pusat. Sedangkan pelayanan aduan antara bank penyalur di daerah dengan bank penyalur di pusat, terlihat berjalan dengan baik, untuk aduan ada ketentuan khusus yaitu maksimal batas respon adalah 14 hari kerja. Hal ini yang perlu menjadi perhatian di dinas pendidikan setempat agar lebih menginformasikan dan mensosialisasikan laman pengaduan sampai ke sekolah.

a. Model Penyaluran dan Pencairan Dana PIP

Penyaluran dan pencairan dana PIP di Kota Ternate hanya menggunakan model rekening buku tabungan. Untuk proses aktivasi buku tabungan yang digunakan adalah Buku

Tabungan Simpanan Pelajar (Butab Simpel). Informasi yang didapatkan dari peserta DKT sedikit ada kendala dalam proses aktivasi tersebut. Proses pembuatan rekening tabungan pada tahun 2017 memakan waktu yang cukup panjang, yaitu mulai dari SK yang sudah ditetapkan oleh direktorat, bank penyalur membutuhkan waktu kurang lebih 1 bulan. Hal ini terjadi kemungkinan dikarenakan pembuatan satu rekening diperuntukkan untuk satu siswa dengan melalui proses aktivasi terlebih dulu sebelum dapat menggunakannya. Proses pembuatan rekening ini dilakukan dengan segala persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh siswa penerima PIP, dan tidak semuanya dapat berjalan dengan mudah dan lancar, kadang siswa tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut seperti KK atau KTP, sehingga mereka menjadi malas untuk kembali melakukan aktivasi ke bank penyalur. Saat ini bagi siswa penerima yang sudah mempunyai rekening dan sudah aktif rekeningnya, maka pada tahun berikutnya bila masih berhak menerima, rekening tersebut otomatis bisa langsung digunakan kembali. Artinya, siswa yang menerima pada tahun berikutnya tidak perlu membuat rekening baru, bank penyalur hanya memindahbukukan ke rekening masing-masing siswa penerima.

Pembuatan rekening tabungan juga bisa ditindaklanjuti dengan pembuatan ATM. Informasi yang disampaikan oleh peserta DKT, tahun 2018 ini, Kemendikbud sudah mencanangkan pembuatan ATM untuk semua siswa

penerima dana PIP. Penggunaan ATM dalam PIP sangat baik namun ada beberapa hal yang perlu diantisipasi yaitu terkait dengan biaya administrasi ATM, biaya transaksi, dan mekanisme penggantian kartu KIP ATM yang hilang.

Pembuatan kartu ATM di Kota Ternate belum dilakukan karena memang belum didistribusikan kepada siswa, kartu tersebut masih berada di kantor cabang. Hal ini terjadi dikarenakan bahwa rata-rata penerima PIP sudah mengambil dana manfaat tersebut sehingga sangat jarang ditemui, siswa kembali untuk mengurus kartu ATM. Pembagian kartu KIP ATM akan dilakukan pada pencairan berikutnya, diperkirakan untuk pencairan yang akan dilakukan di tahun 2019.

Terkait dengan model penyaluran dan pencairan dana PIP dalam bentuk *e-wallet* tampaknya siswa penerima PIP di Kota Ternate tidak menginginkan menggunakan sistem *e-wallet* tersebut. Pada saat diskusi mereka menyampaikan bahwa model yang digunakan saat ini sudah cukup baik. Alasan yang dikemukakan adalah bahwa mereka ingin diberikan keleluasaan dalam menggunakan dana tersebut, kapan saja dan digunakan untuk apa saja, bisa mereka lakukan. Namun, pendapat yang dikemukakan oleh pihak sekolah merasa keberatan bila hal tersebut dilakukan, karena biasanya dana PIP digunakan untuk melunasi dana iuran SPP, terutama di jenjang SMA/SMK. Berbeda halnya dengan responden dinas dan guru yang menyatakan bahwa, mekanisme *e-wallet* baik, karena bisa untuk mengontrol penggunaan dana PIP agar

siswa dapat memanfaatkannya sesuai dengan kebutuhan sekolah. Hasil DKT menjelaskan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, jika akan diterapkan model *e-wallet* tersebut, yaitu:

- 1) Perlu ada ketetapan jumlah dana yang akan ditetapkan di *e-wallet* dan yang akan ditetapkan di rekening (artinya dana bisa diambil tunai).
- 2) Jumlah dana yang ada di *e-wallet* apabila tidak dimanfaatkan, mekanisme selanjutnya akan seperti apa? Apakah bisa dikonversi ke dana rekening? Berapa lama batasan waktu ini menjadi *e-wallet*?
- 3) Untuk *merchant*, apakah nanti akan di koperasi sekolah atau di agen?
- 4) Apakah ada biaya transaksi atau tidak di *merchant* tersebut perlu menjadi bahan pertimbangan mengingat biaya transaksi adalah salah satu keuntungan?
- 5) Jika ditetapkan *merchant*-nya di koperasi dipandang perlu untuk mengontrol harga, mengingat ada isu belanja di koperasi lebih mahal.
- 6) Jumlah siswa penerima PIP di dalam satu sekolah.
- 7) Kondisi geografis dan infrastruktur perbankan di suatu daerah tidak sama.
- 8) Jenjang siswa apakah SD, SMP akan dilibatkan atau SMA dan SMK saja yang terlibat.

b. Cara Pencairan Dana PIP

Terkait dengan cara pencairan dana PIP tampaknya ada beberapa cara yang dapat dilakukan yaitu pencairan di *outlet* bank, ATM, dan agen atau *merchant*. Pengalaman di agen memang belum terlaksana di Kota Ternate. Penerima dana PIP masih mendatangi *outlet* bank karena penyaluran dan pencairan dana menggunakan rekening tabungan saja saat ini, sehingga memang dimungkinkan pencairan hanya dapat dilakukan di lokasi perbankan. Dan selain itu juga kartu ATM belum terdistribusikan di sekolah. Sehingga untuk pembelian atau belanja di *merchant* juga belum bisa dilakukan. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, bila melakukan pencairan dana di *merchant* yaitu:

- 1) Pemilihan toko-toko yang berkerja sama;
- 2) Biaya transaksi;
- 3) Pemilihan koperasi dan mekanisme penunjukkan harus jelas. Dalam hal ini koperasi sekolah memungkinkan untuk menjadi agen perbankan dalam menyalurkan dana PIP terutama koperasi sekolah SMA dan SMK; dan
- 4) Edukasi kepada peserta PIP dan *merchant* harus dilaksanakan dengan baik.

Untuk pelaksanaan percepatan pencairan tampaknya berjalan dengan baik di Kota Ternate. Bank BNI membuat mekanisme pencairan dan aktivasi dengan membuat jadwal masing-masing sekolah, kapan mereka datang dan beberapa batasan

maksimal untuk dapat dilayani. Peserta DKT juga menyampaikan bahwa di wilayah Provinsi Maluku Utara terdapat sekolah yang jauh dari akses perbankan, sehingga diusulkan agar bank yang hadir, bank mendatangi lokasi sekolah dengan menggunakan kapal perbankannya. Pencairan dana PIP di Kota Ternate juga dilakukan secara kolektif dan dapat berjalan dengan lancar, sekolah yang jauh dari perbankan oleh dinas didata dan diusulkan untuk melakukan pencairan secara kolektif. Hal ini mempermudah siswa penerima dana PIP untuk mencairkan dananya, sehingga bisa dimanfaatkan segera untuk membiayai keperluan sekolahnya.

c. Strategi dalam Implementasi Model

Dalam pelaksanaan model penyaluran dan pencairan dana PIP, di Kota Ternate tampaknya tidak ada kendala yang berarti, yang dapat menghambat, terutama dalam bentuk rekening tabungan. Hal ini dikarenakan di Kota Ternate, infrastruktur dari bank penyalur baik BRI maupun BNI telah cukup memadai.

Terkait dengan ketersediaan fasilitas yang perlu disediakan oleh bank untuk memperlancar dalam penyaluran dan pencairan tampaknya sudah cukup banyak. Jumlah fasilitas yang berada di Kota Ternate untuk bank penyalur BNI yaitu ada 10 kantor, dengan rincian cabang utama ada 1, cabang pembantu ada 7 jumlahnya, kantor kas ada 2, jumlah ATM ada 73, agen BNI ada 252 dan mesin *EDC/merchant* ada

sebanyak 107. Sedangkan untuk bank penyalur, Bank BRI, ada 5 *outlet* BRI, 70 mesin ATM, 115 agen BRI dan 254 *merchant*. Oleh karena itu, bila model penyaluran dan pencairan dana PIP yang lain akan diterapkan, diharapkan tidak akan mengalami kendala.

2. Pelaksanaan PIP di Kota Yogyakarta

Program Indonesia Pintar (PIP) di Kota Yogyakarta masih tergolong belum seluruhnya terselesaikan. Pada Tabel 4.3 pencairan dana PIP di Kota Yogyakarta menunjukkan keadaan yang baru mencapai 89% dari keseluruhan penyaluran PIP. Dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Provinsi DI Yogyakarta, Kota Yogyakarta tergolong paling kecil penyaluran dan pencairan dana PIP, sehingga penyerapan penyaluran PIP-nya hanya 89%. Kondisi ini dipengaruhi oleh Kota Yogyakarta yang tingkat perekonomian masyarakatnya sudah cukup baik dibanding kabupaten lainnya. Namun dari jumlah tersebut, ternyata masih ditemukan adanya indikasi ketidaktepatan sasaran penerima PIP.

Tabel 4.3 Penyaluran dan Pencairan Dana PIP di Lokasi Studi

Kabupaten/Kota	Disalurkan	Dicairkan	%
Kab. Bantul	38.227.900.000	36.526.050.000	96%
Kab. Gunung Kidul	39.011.775.000	37.270.900.000	96%
Kab. Kulon Progo	21.457.100.000	20.465.975.000	95%

Kabupaten/Kota	Disalurkan	Dicairkan	%
Kab. Sleman	38.107.300.000	34.950.675.000	92%
Kota Yogyakarta	14.257.600.000	12.728.800.000	89%

Sumber: <http://sipintar.kemdikbud.go.id> (2018).

Berdasarkan data penyaluran PIP tahun 2018, jika dilihat pada Tabel 4.4 tentang kinerja penyaluran dana PIP untuk setiap jenjang pendidikan, terlihat adanya persentase pencairan dana PIP di jenjang pendidikan SMA masih belum baik. Pencairan dana PIP tersebut masih berada pada angka 74% dari keseluruhan penyaluran dana PIP. Hal ini dimungkinkan karena secara persebaran jumlah siswa jenjang pendidikan menengah di Kota Yogyakarta, terdapat bahwa siswa SMA lebih banyak merupakan pendatang dari daerah-daerah lain. Pendatang yang belajar di kota pelajar tersebut notabene kehidupan orang tua siswanya tersebut tergolong mampu, sehingga hampir sebagian besar siswa SMA merupakan warga pendatang. Untuk lebih jelas penyaluran dan pencairan dana PIP berdasarkan satuan pendidikan dapat dilihat pada Tabel 4.4 berikut.

Tabel 4.4 Penyaluran dan Pencairan Dana PIP Per Satuan Pendidikan

Satuan Pendidikan	Penyaluran (Siswa)	Pencairan (Siswa)	%	Pencairan (Rupiah)	Penyaluran (Rupiah)	%
SD	12.043	11.160	92,67	4.953.600.000	4.617.675.000	93,22
SMP	5.434	4.856	89,36	3.186.000.000	2.878.125.000	90,34
SMA	1.851	1.341	72,45	1.493.500.000	1.112.000.000	74,46
SMK	6.789	5.960	87,79	4.624.500.000	4.121.000.000	89,11
Total	26.117	23.317	89,28	14.257.600.000	12.728.800.000	89,28

Sumber: <http://sipintar.kemdikbud.go.id> (2018).

Berikutnya terkait dengan pelaksanaan edukasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh BRI dan BNI, pelaksanaannya dibantu oleh pendamping dari daerah, yakni dinas pendidikan. Materi sosialisasi dan edukasi mencakup produk dan penggunaan rekening, manfaat menabung, dan juga untuk penyampaian pengaduan yang dilaksanakan melalui *leaflet*. Pelaksanaan edukasi dan sosialisasi bisa berjalan dengan baik, bila ada dukungan dari dinas pendidikan. Dinas harus lebih aktif melakukan koordinasi terhadap sekolah-sekolah penerima dana PIP. Oleh sebab itu, peran dinas pendidikan sangat berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan PIP di daerahnya masing-masing.

a. Model Penyaluran dan Pencairan Dana PIP

Berdasarkan hasil DKT bahwa penyaluran dan pencairan dana PIP yang dilakukan di Kota Yogyakarta yaitu model melalui

rekening tabungan, KIP ATM, dan *Smart KIP* (Rekening tabungan dan *e-wallet*), pelaksanaan registrasi dan pembukaan rekening penerima bantuan, dimulai dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal ini direktorat teknis memberikan data penerima bantuan ke BRI untuk siswa SD dan SMP serta ke BNI untuk siswa SMA dan SMK. Kemudian bank penyalur BRI dan BNI menginfokan agar siswa penerima PIP melakukan registrasi pembukaan dan aktivasi rekening dan setelah itu bank penyalur mendistribusikan buku tabungan dan atau KIP ATM serta memberikan petunjuk penggunaan kartu. Namun, ada sedikit kendala yaitu saat pelaksanaan, *form* aplikasi yang diberikan ternyata sulit diisi oleh siswa di sekolah dan juga setelah diisi masih terdapat kesalahan ketika diberikan ke bank. Oleh karena itu, dapat dimengerti mengapa penyaluran dana PIP tahun 2017 di Kota Yogyakarta baru berjumlah 2.220 siswa atau sebesar 5% yang belum dapat disalurkan (22 Agustus, 2018).

Informasi yang diperoleh dari responden bahwa timbulnya permasalahan terkait dengan penyaluran dan pencairan dana PIP di Kota Yogyakarta dikarenakan sekolah penerima kadang tidak segera mendapatkan informasi siapa saja yang menerima PIP, demikian pula bank penyalur kadang menginformasikannya sering terlambat ke sekolah. Hal ini menyebabkan terjadinya penyaluran dan pencairan yang sangat terlambat, misalnya dana tahun 2017 baru dicairkan pada tahun 2018 padahal menurut ketentuan setelah dana

berada di bank penyalur maka satu bulan kemudian seharusnya sudah dapat didistribusikan ke rekening penerima bantuan. Selain itu, masalah dalam pencairan karena adanya permasalahan pada bank penyalur dan pada siswa penerima bantuan. Untuk bank penyalur BRI yang memiliki 4 cabang tetapi tidak memiliki konsep yang sama atau SOP yang berbeda dalam pencairan yang dilakukan oleh siswa penerima bantuan. Di satu pihak siswa bisa mencairkan dengan hanya membawa surat keterangan dari sekolah, tetapi siswa yang lain harus melampirkan KTP atau KK orang tua juga. Orang tua siswa penerima tidak semuanya selalu berada di tempat, karena ada yang menjadi tenaga TKW di negara lain, dan ada juga yang orang tuanya sudah bercerai, tidak tahu di mana keberadaannya, sehingga hal seperti ini memperlambat proses pencairan.

Berbagai permasalahan tersebut tidak akan terjadi bila informasi cepat tersampaikan, baik dari pihak bank penyalur dan dinas pendidikan ke sekolah yang siswanya menerima PIP. Oleh karena itu, perlunya saling koordinasi secara aktif dengan pihak-pihak yang terkait sehingga tidak terjadi penyaluran dan pencairan yang terlambat. Demikian pula agar pencairan sesegera mungkin dapat dicairkan sehingga siswa cepat mendapatkan manfaatnya. Dalam ketentuan disebutkan bahwa setelah 1 bulan berada di bank maka berhak dicairkan oleh siswa penerima bantuan. Selain itu, dari pihak bank walaupun berbeda cabang hendaknya mempunyai SOP yang

sama dalam pencairan dana PIP ini, sehingga siswa dapat segera mencairkan dan kebutuhan siswa untuk sekolah dapat terpenuhi.

Selanjutnya, untuk penggunaan model *Smart KIP* (rekening tabungan dan *e-wallet*), tampaknya di Kota Yogyakarta sudah ada pemahaman tentang model tersebut. Informasi yang diperoleh dari pihak bank, *e-wallet* adalah semacam *link access* yang menggunakan nomor kartu, sehingga mengambil uang menjadi lebih mudah. Selain itu juga di dalam *e-wallet* tersebut ada semacam *saving account*. Pada saat akan melakukan transaksi dengan *e-wallet* bisa dibatasi jenis produk yang akan dibeli, misalnya hanya untuk membeli peralatan sekolah sebesar 200 ribu rupiah, atau untuk membeli seragam sekolah 100 ribu rupiah. Sehingga siswa tidak dapat membeli jenis produk/barang lain selain untuk keperluan sekolah. Pada saat diskusi beberapa responden terutama responden dari bank penyalur BRI menyampaikan bahwa *e-wallet* sebaiknya tidak diberlakukan untuk siswa SD ataupun SMP, tapi hanya untuk siswa SMA dan SMK saja. Hal ini dikarenakan siswa SD dirasa belum cukup cakap hukum dan cakap dalam menggunakan mesin elektronik yang membutuhkan kecakapan teknologi seperti halnya mesin EDC. Selain itu, menurut responden *e-wallet* lebih cocok diterapkan di kota terlebih dahulu dan secara bertahap kemudian ke daerah desa. Di salah satu sekolah SMP di

Yogyakarta transaksi dengan menggunakan model *e-wallet* dikenai biaya sebesar Rp5.000,00 per kartu.

Model *Smart KIP* (rekening tabungan dan *e-wallet*) di Kota Yogyakarta tampaknya tidak berjalan dengan baik, karena mesin EDC untuk transaksi di koperasi sekolah dikenai biaya sewa mesin sebesar Rp300 ribu per bulan. Hal ini tentu saja memberatkan sekolah karena tidak ada dana untuk itu, sehingga siswa tidak dapat melakukan transaksi dan mencairkan dana PIP-nya.

b. Cara Pencairan Dana PIP

Penerima bantuan PIP di Yogyakarta melakukan pencairan dan penarikan dana PIP di ATM dan di kantor cabang baik BRI maupun BNI. Selain itu juga dilakukan di *merchant* tertentu yang sudah menjadi agen bank. Persyaratan pencairan dana PIP, yaitu dengan membawa: 1) surat keterangan dari kepala sekolah, 2) Kartu Keluarga, dan 3) KTP orang tua/wali. Pencairan dana PIP dilakukan dengan cara kolektif dan secara individu. Pencairan dana PIP ke bank penyalur dengan cara individu dilakukan bersama orang tua mendatangi bank. Sedangkan, secara kolektif, dilakukan bila tidak ada bank penyalur di sekitar daerah tempat tinggal siswa atau bank penyalur tersebut letaknya jauh sehingga memerlukan transport yang tidak sedikit/mahal.

Siswa penerima dana PIP di Yogyakarta sudah melakukan pencairan di agen bank terutama siswa penerima yang

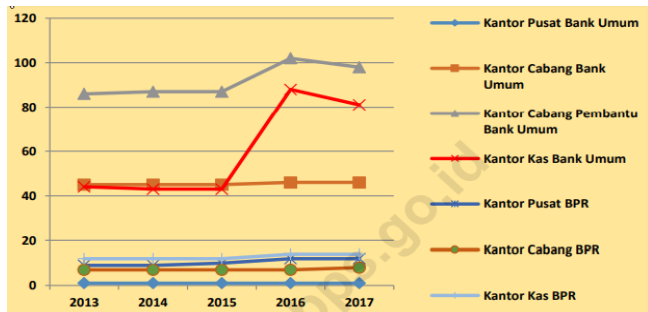
menjadi uji coba *Smart KIP*. Hasil dari DKT, responden menyampaikan pernah melihat adanya pencairan dana PIP di agen/koperasi sekolah oleh peserta. Namun kebanyakan peserta masih mendatangi bank penyalur. Selain itu, kartu ATM belum semua terdistribusikan di sekolah tersebut. Begitu pula dengan pembelanjaan di *merchant* tertentu yang sudah melakukan kerja sama dengan bank terlihat ada beberapa siswa yang melakukannya. Pembelian barang di *merchant* dimungkinkan bila sekolah memiliki koperasi yang menjual peralatan sekolah secara lengkap. Namun tampaknya sekolah yang memiliki koperasi lengkap menjual berbagai kebutuhan sekolah umumnya adalah koperasi di SMK, sedangkan koperasi SD dan SMP serta SMA kadang hanya menjual seadanya saja. Ini dapat dimengerti karena koperasi yang bagus memerlukan SDM yang benar-benar dapat menanganinya secara khusus.

Percepatan pencairan dana PIP juga sudah dilakukan seperti halnya percepatan pencairan untuk SD yang dapat berjalan dengan baik di Kota Yogyakarta karena ada koordinasi yang baik antara pihak bank dengan dinas pendidikan. Percepatan pencairan ini dilakukan karena ternyata masih banyak terdapat siswa yang belum mencairkan dananya sehingga dana tersebut mengendap di bank penyalur. BRI membagikan format pengisian dan diserahkan pada jadwal tertentu untuk SD tanggal 5 September dan untuk SMP tanggal 6 September. Tahapan selanjutnya setelah pengisian *form*, maka siswa

penerima dapat langsung menerima pencairan dana tersebut. Kesulitan dalam mengisi *form* bank dapat diatasi dalam percepatan tersebut, karena orang tua siswa dibimbing untuk mengisi *form* bersama-sama saat itu juga. Sehingga pencairan dana PIP dapat dipercepat secara serentak di daerah-daerah yang lambat melakukan pencairan.

c. Strategi dalam Implementasi Model

Jika dilihat dari perkembangan jumlah perbankan, Kota Yogyakarta tergolong cukup pesat, dalam lima tahun terakhir (2013–2017) jumlah kantor kas bank umum dan kantor cabang pembantu meningkat. Peningkatan jumlah kantor kas bank ini cukup mempengaruhi perekonomian masyarakat Kota Yogyakarta dalam menjalankan laju perekonomian masyarakat. Kemajuan dan pertumbuhan bank cabang pembantu ini juga dapat membantu mempercepat pencairan bantuan PIP. Dengan demikian semua model penyaluran dan pencairan dana PIP yang ada tampaknya bisa diimplementasikan sesuai dengan kondisi yang ada dan tersedianya kelengkapan infrastruktur yang ada di daerah tersebut.



Grafik 4.1 Perkembangan Jumlah Perbankan 5 Tahun Terakhir

Pada Grafik 4.1, perkembangan jumlah perbankan terlihat jelas ada tren peningkatan, hal ini tentu saja diikuti dengan tersedianya kelengkapan infrastruktur perbankan yang merupakan prasyarat bagi daerah untuk dapat memperlancar laju pertumbuhan perekonomian masyarakat di daerahnya melalui perbankan, sehingga layanan PIP dapat dilaksanakan di bank penyalur.

3. Pelaksanaan PIP di Kabupaten Batubara

Pelaksanaan program PIP di Kabupaten Batubara sudah terlaksana, meski belum begitu baik hasilnya, hal ini terindikasi dengan adanya siswa penerima yang belum semua melakukan pencairan dana PIP. Data pada Tabel 4.5 berikut menjelaskan prosentase penyaluran dan pencairan dana PIP tahun 2018.

Tabel 4.5 Penyaluran dan Pencairan Dana PIP, Sumatera Utara 2018

Kabupaten/Kota	Disalurkan	Dicairkan	%
Kab. Asahan	24.128.625.000	21.077.100.000	87%
Kab. Batubara	14.725.125.000	10.864.350.000	74%
Kab. Dairi	19.570.100.000	14.318.300.000	73%
Kab. Deli Serdang	49.918.975.000	39.435.675.000	79%
Kab. Humbang Hasudutan	16.137.775.000	13.295.650.000	82%
Kab. Karo	17.643.650.000	13.913.800.000	79%
Kab. Labuhan Batu	14.694.100.000	13.419.400.000	91%
Kab. Labuhan Batu Selatan	7.394.600.000	6.562.575.000	89%
Kab. Labuhan Batu Utara	12.198.575.000	10.499.700.000	86%
Kab. Langkat	47.867.050.000	40.292.100.000	84%
Kab. Mandailing Natal	21.034.525.000	18.141.250.000	86%
Kab. Nias	20.181.775.000	16.959.350.000	84%
Kab. Nias Barat	13.428.300.000	12.918.325.000	96%
Kab. Nias Selatan	29.175.525.000	23.949.600.000	82%
Kab. Nias Utara	21.373.700.000	19.672.900.000	92%
Kab. Padang Lawas	9.489.800.000	8.963.250.000	94%
Kab. Padang Lawas Utara	7.014.700.000	6.253.250.000	89%
Kab. Pakpak Bharat	4.067.025.000	3.737.975.000	92%
Kab. Samosir	12.535.900.000	10.375.700.000	83%
Kab. Serdang Bedagai	21.877.275.000	17.722.725.000	81%
Kab. Simalungun	30.967.550.000	23.727.975.000	77%
Kab. Tapanuli Selatan	13.159.700.000	12.560.550.000	95%

Kabupaten/Kota	Disalurkan	Dicairkan	%
Kab. Tapanuli Tengah	21.362.775.000	16.350.425.000	77%
Kab. Toba Samosir	11.498.150.000	8.786.650.000	76%
Kota Binjai	10.803.150.000	8.802.275.000	81%
Kota Gunungsitoli	14.175.875.000	11.888.825.000	84%
Kota Padang Sidempuan	7.800.400.000	6.435.675.000	83%
Kota Pematangsiantar	14.615.000.000	11.585.475.000	79%
Kota Sibolga	6.576.425.000	5.845.175.000	89%
Kota Tanjung Balai	11.466.875.000	9.371.550.000	82%
Kota Tebing Tinggi	7.860.850.000	6.276.225.000	80%

Sumber: <http://sipintar.kemdikbud.go.id> (Data per 24 Juli 2018).

Dari Tabel 4.5 di atas menunjukkan bahwa penyaluran dan pencairan bantuan PIP untuk Kabupaten Batubara masih belum berjalan dengan baik. Data menunjukkan pencairan dana PIP baru mencapai 74%, tergolong capaian yang rendah dibandingkan dengan capaian realisasi pencairan bantuan PIP di kabupaten/kota lain di Provinsi Sumatera Utara. Terhambatnya pencairan tersebut diduga banyak faktor penyebabnya. Salah satu faktor yang hampir sama dengan daerah lain adalah masih belum sinkronnya data siswa yang ada di bank. Jika dilihat dari kinerja pencairan per satuan pendidikan, jumlah yang masih belum optimal pencairannya adalah di satuan pendidikan SD, yang baru mencapai 66,98%. Dana yang disalurkan sebesar 7.392.375.000 rupiah, namun pencairan baru mencapai 4.951.350.000 rupiah. Ini berarti

masih ada 33% yang belum cair. Kondisi ini disebabkan karena masih terdapat ketidakcocokan data siswa dan data yang ada di bank, selain itu faktor geografis yang sulit karena sekolah-sekolah SD di Kabupaten Batubara jauh dari bank penyalur. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 4.6 berikut.

Tabel 4.6 Penyaluran dan Pencairan Dana PIP, Kabupaten Batubara, Tahun 2018

Satuan Pend.	Jumlah Siswa			Jumlah Rupiah		
	Disalurkan	Dicairkan	%	Disalurkan	Dicairkan	%
SD	18.671	11.821	63,31%	7.392.375.000	4.951.350.000	66,98%
SMP	7.280	5.445	74,79%	4.259.250.000	3.256.500.000	76,46%
SMA	2.386	2.035	85,29%	1.957.500.000	1.721.000.000	87,92%
SMK	1.666	1.384	83,07%	1.116.000.000	935.500.000	83,83%
Sub Total	30.003	20.685	68,94%	14.725.125.000	10.864.350.000	73,78%

Sumber: <http://sipintar.kemdikbud.go.id> (Data per 24 Juli 2018).

a. Model Penyaluran dan Pencairan Dana PIP

Model penyaluran dan pencairan dana PIP di Kabupaten Batubara ada dua, yaitu melalui rekening tabungan dan KIP ATM. Siswa penerima dana PIP sudah melakukan pembuatan rekening tabungan dan aktivasi di BRI atau BNI. Siswa penerima dana PIP tidak hanya menerima buku tabungan saja, tapi mereka juga mendapatkan KIP ATM-nya. Meski demikian, jumlah siswa penerima yang mendapatkan buku tabungan dan KIP ATM masih sedikit dibandingkan dengan

yang tidak menerima, khususnya untuk KIP ATM-nya. Hal ini dikarenakan pendistribusian ATM belum semua terdistribusi dan direncanakan tahun 2019 kartu ATM tersebut sudah dapat terdistribusi semua. Berbeda halnya dengan KIP ATM yang dikelola oleh Kemenag, hampir sudah terdistribusi semua kartu ATM tersebut kepada siswa penerima dan bahkan mereka sudah menggunakannya sejak bulan Mei 2018. Seperti halnya di SMPN 50, bank penyalur BRI sudah memberikan KIP ATM ke semua siswa penerima dana PIP.

Terkait dengan model penyaluran dan pencairan dana PIP dengan menggunakan *Smart KIP (e-wallet)* di Kabupaten Batubara, bank penyalur BNI yang di bawah pengelolaan Kemendikbud belum sama sekali dilakukan, namun untuk BNI Kemenag, model *e-wallet* ini sudah diterapkan. Hal ini menurut pihak bank karena kesiapan dari sistem perbankan yang di bawah pengelolaan Kemenag sudah lebih siap, seperti pengadaan mesin EDC, *soft system* untuk pembagian jumlah dana atau *saving account*-nya sudah dibuat programnya. Sehingga KIP ATM di bawah pengelolaan Kemenag sudah menjalankan model KIP ATM maupun *e-wallet*.

b. Cara Pencairan Dana PIP

Pencairan dana PIP yang dilakukan oleh siswa penerima PIP di Kabupaten Batubara dilaksanakan dengan cara mendatangi bank penyalur dan melalui mesin ATM. Pencairan di Kabupaten Batubara masih ada masalah karena ada siswa

tidak bisa memenuhi syarat yang diperlukan oleh bank, sehingga tidak bisa dicairkan seperti siswa punya KIP tetapi tidak memiliki KKS dan bukan PKH. Selain itu juga saat pencairan, pihak bank mengharuskan siswa untuk didampingi oleh orang tua dan pihak sekolah. Sebagai contoh pencairan dana PIP yang dilakukan oleh siswa di BRI lima puluh. Pencairan dana PIP di BRI lima puluh dilakukan per tahapan, satu tahap dibolehkan hanya untuk 25 orang siswa saja. Hal ini dilakukan karena untuk menghindari terjadinya antrian yang panjang sehingga siswa tidak terlayani dengan segera. Namun, pencairan dapat terus dilakukan meski sering terhambat karena berbagai kendala yang ditemui di lapangan. Bank penyalur dari masing-masing daerah kadang membuat kebijakan sendiri dalam rangka untuk memperlancar proses penyaluran dan pencairan. Hal ini tentu saja dibolehkan selagi masih dalam aturan yang ada dan bukan untuk memperlambat pelaksanaan PIP.

c. Strategi dalam Implementasi Model

BNI memiliki 23 titik ATM tetapi belum menyebar di Kabupaten Batubara. Untuk jumlah agen BNI ada sebanyak 226. Secara umum sebenarnya dilihat dari sisi kesiapan infrastruktur bank sudah memungkinkan untuk menggunakan model *Smart KIP (e-wallet)*. Namun, satu hal yang perlu menjadi perhatian adalah keberadaan dan kesiapan sebuah koperasi di sekolah, yang mana koperasi tersebut

menjadi tempat untuk melakukan transaksi *e-wallet* atau dijadikan sebagai agen bank. Hasil dari diskusi, pihak bank menyatakan bahwa bila koperasi sekolah ingin menjadi agen bank, maka bank tersebut harus berbadan hukum terlebih dulu. Artinya, ada izin atau surat keterangan secara legalitas atas pendirian bank tersebut. Sehingga siswa penerima dana dapat menggunakan *e-wallet* untuk membelanjakan dana PIP yang diterimanya. Kendala yang ada untuk dapat menerapkan model *e-wallet* ini adalah belum adanya koperasi sekolah yang menyediakan fasilitas sekolah untuk siswa karena biasanya hanya sebatas untuk jajanan saja. Dan hanya satu sekolah di Batubara yaitu SMKN 1 Air Putih yang memiliki koperasi sekolah yang dapat menyediakan pakaian seragam untuk dijual. Jadi, pada dasarnya bank penyalur bisa melaksanakan *e-wallet* baik BNI maupun BRI. Salah satu agen BRI yang bisa dijadikan usulan untuk menjadi agen untuk memberikan fasilitas pemanfaatan dana PIP oleh siswa yaitu Brilink. Selama ini Agen Brilink tersebut sudah dapat digunakan pada usaha atau grosir untuk membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah BRI.

4. Pelaksanaan PIP di Kabupaten Indramayu

Pelaksanaan program PIP di Kabupaten Indramayu, pada tahun 2017 diawali dengan usulan sekolah untuk mengajukan dana PIP bagi siswa tidak mampu. Dari penuturan dinas pendidikan maupun kepala sekolah dalam DKT, dikemukakan

bahwa sekolah menandai status kelayakan peserta didik sebagai calon penerima KIP di aplikasi Dapodik mengacu hasil validasi sekolah. Lalu sekolah melaporkan data calon penerima KIP yang diusulkan mendapatkan KIP ke Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu untuk jenjang SD dan SMP dan ke dinas pendidikan provinsi untuk jenjang SMA dan SMK. Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu melakukan validasi terhadap data calon penerima KIP berdasarkan status kelayakan peserta didik sesuai dengan prioritas sasaran penerima KIP, kemudian mengirimkan hasil validasi kepada direktorat teknis terkait di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai rekomendasi bagi siswa penerima KIP. Setelah itu, direktorat teknis melakukan validasi akhir atas kelengkapan data rekomendasi untuk ditetapkan SK sebagai penerima KIP. Namun di lapangan, permasalahan penetapan SK penerima masih terdapat perbedaan. Beberapa kepala sekolah menuturkan bahwa dalam penentuan calon penerima PIP sudah usulkan nama siswa yang tidak mampu berdasarkan data Dapodik tetapi pada saat Surat Keputusan (SK) penerima dana PIP, hanya beberapa saja yang mendapatkan bantuan PIP sehingga tidak sesuai dengan harapan sekolah.

Begitu pula halnya dengan sosialisasi, dinas pendidikan telah melakukan sosialisasi kepada para kepala sekolah penerima PIP. Dalam sosialisasi, penyampaian melalui komunikasi merupakan hal penting dalam mengimplementasikan sebuah

kebijakan Pemerintah. Komunikasi dapat berupa informasi yang disampaikan kepada para pelaksana agar dapat mengetahui dan memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah dan sasaran sebuah kebijakan tersebut. Pelaksanaan PIP ini melibatkan banyak pihak baik dari dalam organisasi maupun antarorganisasi. Hasil DKT diketahui bahwa komunikasi antara Disdik dengan sekolah sudah berjalan, tetapi hanya saja belum maksimal karena terkendala dengan anggaran. Karena sosialisasi tatap muka membutuhkan anggaran, maka dari itu sosialisasi lebih banyak dilakukan melalui sosial media. Komunikasi antara sekolah dengan orang tua siswa juga sudah berjalan, tetapi belum maksimal karena masih terdapat orang tua siswa yang tidak mengetahui bahkan mengikuti sosialisasi yang dilakukan oleh sekolah. Sekolah kesulitan mengumpulkan orang tua siswa penerima PIP untuk dilakukan sosialisasi, terutama di sekolah dasar, mengingat sekolah tidak memiliki anggaran khusus untuk itu. Namun di beberapa kesempatan, baik pada saat mendampingi orang tua siswa penerima PIP di bank maupun pada kesempatan-kesempatan lainnya, kepala sekolah maupun guru melakukan sosialisasi kepada orang tua ataupun wali dari siswa penerima PIP. Sosialisasi dilakukan dalam bentuk tatap muka secara personal dengan kepala SD dan SMP penerima PIP. Materi sosialisasi di antaranya adalah *update* data Dapodik secara kontinu, pemahaman mekanisme pengusulan dan penggunaan dana PIP oleh siswa. Dinas pendidikan tidak

mengeluarkan surat edaran secara khusus terkait PIP yang ditujukan kepada sekolah-sekolah.

Sosialisasi yang dilakukan oleh sekolah, sebagaimana yang dikemukakan oleh para kepala sekolah, adalah dengan berkomunikasi tatap muka kepada orang tua siswa penerima PIP, namun tidak semua orang tua bisa hadir di sekolah yang memiliki letak geografis yang sulit, jarak tempuh antara rumah siswa dengan sekolah yang cukup jauh menjadi kendala. Mengatasi hal tersebut, sekolah langsung memberitahukan kepada orang tua siswa penerima PIP melalui telepon atau mengirimkan pesan singkat melalui telepon seluler. Materi sosialisasi adalah terkait dengan cara pencairan beserta syarat-syaratnya di lembaga penyalur serta penggunaan dana PIP.

Bagi lembaga penyalur, sosialisasi PIP dilakukan pada saat siswa melakukan pencairan di lembaga tersebut. Ketika orang tua, guru, kepala sekolah ataupun siswa mendatangi lembaga penyalur, maka saat itulah dilakukan sosialisasi. Materi sosialisasi dilakukan terkait dengan penggunaan dana PIP oleh siswa serta persyaratan-persyaratan pencairan PIP di lembaga penyalur.

Dari mekanisme dan materi sosialisasi yang dilakukan oleh dinas pendidikan, kepala sekolah maupun lembaga penyalur, sosialisasi yang dilakukan tampaknya terbatas pada ruang dan waktu, seperti saat siswa akan melakukan pencairan di bank

penyalur. Artinya tidak ada waktu khusus yang memang diprogramkan untuk mengadakan sosialisasi. Hal ini juga disebabkan tidak adanya anggaran dana secara khusus untuk sosialisasi PIP, sehingga menjadi hambatan untuk memberikan sosialisasi secara komprehensif kepada semua pihak yang terlibat.

Program Indonesia Pintar (PIP) di Kabupaten Indramayu masih tergolong belum seluruhnya terselesaikan. Tabel 4.7 menunjukkan keadaan yang baru mencapai 84% percairan PIP dari keseluruhan penyaluran PIP di Kabupaten Indramayu dengan target penyaluran PIP sebesar Rp69,592 milyar, dan pencairan sebesar Rp58,431 milyar.

Tabel 4.7 Penyaluran dan Pencairan Dana PIP, Kabupaten Indramayu, Tahun 2018

Kabupaten/Kota	Disalurkan (Rp)	Dicairkan (Rp)	%
Kab. Bandung	114.903.725.000	95.486.825.000	83%
Kab. Bandung Barat	50.014.025.000	46.215.550.000	92%
Kab. Bekasi	58.157.650.000	47.130.550.000	81%
Kab. Bogor	111.423.550.000	90.158.600.000	81%
Kab. Ciamis	37.961.100.000	35.750.350.000	94%
Kab. Cianjur	90.109.975.000	77.161.400.000	86%
Kab. Cirebon	84.592.125.000	76.959.875.000	91%
Kab. Garut	134.432.075.000	121.472.500.000	90%
Kab. Indramayu	69.592.225.000	58.431.850.000	84%
Kab. Karawang	79.699.225.000	65.064.175.000	82%
Kab. Kuningan	38.902.750.000	34.498.275.000	89%

Kabupaten/Kota	Disalurkan (Rp)	Dicairkan (Rp)	%
Kab. Majalengka	37.550.125.000	36.131.075.000	96%
Kab. Pangandaran	9.398.100.000	7.928.500.000	84%
Kab. Purwakarta	37.491.350.000	31.685.850.000	85%
Kab. Subang	42.032.875.000	37.574.400.000	89%
Kab. Sukabumi	88.389.300.000	71.172.075.000	81%
Kab. Sumedang	50.969.525.000	46.157.600.000	91%
Kab. Tasikmalaya	67.033.025.000	61.624.325.000	92%
Kota Bandung	96.739.575.000	82.191.250.000	85%
Kota Banjar	6.812.975.000	6.034.050.000	89%
Kota Bekasi	41.577.000.000	31.858.475.000	77%
Kota Bogor	32.145.575.000	28.343.075.000	88%
Kota Cimahi	12.139.875.000	10.792.000.000	89%
Kota Cirebon	16.109.575.000	13.407.750.000	83%
Kota Depok	34.887.475.000	28.772.300.000	82%
Kota Sukabumi	12.089.950.000	9.435.150.000	78%
Kota Tasikmalaya	25.776.025.000	23.982.650.000	93%

Sumber: <http://sipintar.kemdikbud.go.id> (Agustus, 2018).

Menurut keterangan dinas pendidikan, pencapaian 84% pencairan tersebut masih terkendala pada pencairan di satuan pendidikan SD dan SMP. Dari data yang ada, terlihat bahwa untuk pencairan dana PIP di satuan pendidikan SD dan SMP baru mencapai 85% (rupiah) untuk SD dan 82% (rupiah) untuk SMP. Untuk lebih jelas Tabel 4.8 menunjukkan jumlah dana (prosentase) pencairan dana dari masing-masing jenjang pendidikan.

Tabel 4.8 Penyaluran dan Pencairan Dana PIP Per Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Satuan	Penyaluran	Pencairan	(%)
SD	Siswa	89.295	75.573	84,63%
	Rp	36.462.600.000	31.033.350.000	85,11%
SMP	Siswa	39.430	31.923	80,96%
	Rp	23.783.625.000	19.650.000.000	82,62%
SMA	Siswa	11.434	9.392	82,14%
	Rp	9.143.500.000	7.561.500.000	82,70%
SMK	Siswa	245	214	87,35%
	Rp	202.500.000	187.000.000	92,35%
Sub Total	Siswa	140.404	117.102	83,40%
Kabupaten Indramayu	Rp	69.592.225.000	58.431.850.000	83,96%

Sumber: <http://sipintar.kemdikbud.go.id>

Faktor yang menjadi kendala dalam pencairan tersebut adalah persyaratan yang diminta pihak lembaga penyalur, misalnya data keluarga tidak sesuai dengan data yang ada di lembaga penyalur. Selain itu, tidak ada orang tua siswa ataupun guru yang mendampingi pada saat pencairan, kemudian waktu pencairan yang bersamaan dengan jam sekolah. Anak-anak sekolah dari pagi hingga siang, jika datang pada siang hari, bank penyalur sudah menutup transaksi penarikan tunai, karena terkendala pada sistem otomatisasi perbankan.

a. Model Penyaluran dan Pencairan Dana PIP

Penyaluran dan pencairan dana PIP di Kabupaten Indramayu menggunakan model transfer ke rekening tabungan pelajar. Penyaluran melalui rekening tabungan dilakukan dengan melakukan pembukaan rekening di bank penyalur BNI dan BRI. Jika siswa yang sudah menerima PIP sebelumnya, maka untuk mereka akan tetap menggunakan rekening yang sama, tinggal datang ke bank untuk mencetak buku dan pencairan langsung bisa dilakukan.

Kendala yang ditemui dalam pencairan menggunakan buku tabungan yaitu adanya perbedaan data orang tua/wali penerima bantuan PIP pada saat pembukaan rekening dengan orang tua/wali pada saat pencairan dana PIP. Pada saat pembukaan rekening didampingi oleh orang tuanya kemudian orang tua tersebut pergi bekerja ke luar negeri sebagai TKI/TKW atau pergi ke luar kota. Sehingga hal ini menjadi bermasalah pada saat siswa melakukan pencairan di bank kembali karena data pendamping siswa adalah bukan orang tuanya saat datang dalam pembukaan rekening. Jika demikian, maka pendamping/wali tersebut harus melengkapi surat keterangan dari kepala desa bahwa ia memang wali penerima PIP atau memiliki hubungan persaudaraan. Birokrasi yang panjang dan melelahkan ketika mengurus surat keterangan di kepala desa membuat orang tua/wali enggan untuk mendampingi siswa ke bank penyalur.

Menurut penuturan salah satu kepala sekolah SD peserta DKT, dari 55 siswa di sekolahnya yang menerima dana PIP, baru 20 siswa yang bisa dicairkan, sedangkan 35 siswa lainnya masih belum bisa dicairkan. Hal ini menurut pihak bank penyalur, bahwa jika memang semua siswa itu sudah memiliki buku tabungan yang disebut tabungan SimPel berarti mereka sudah bisa mengambilnya ke bank. Hal ini yang jadi penyebabnya orang tua dari 35 siswa itu tidak melengkapi persyaratan yang harus dibawa pada saat pengambilan, seperti KTP dan KK. Kejadian seperti itu terjadi di salah satu bank unit di tingkat kecamatan, sedangkan pihak bank cabang yang mengikuti DKT tidak mengetahui kasus seperti itu. Sehingga kejadian tersebut akan ditindaklanjuti, pihak bank cabang dengan secepatnya berkoordinasi dengan pihak bank unit di kecamatan tersebut.

Permasalahan lain yang membuat dana PIP masih berada pada rekening di bank penyalur adalah masih adanya siswa yang sudah lulus atau keluar tetapi namanya masih muncul di SK yang dikeluarkan oleh pusat. Hal ini mengindikasikan data masih belum *ter-update* dan juga belum optimalnya koordinasi dari masing-masing instansi yang menangani PIP. Hal yang sama juga dikeluhkan oleh peserta diskusi yang lain bahwa masih sering tidak adanya informasi yang pasti kapan pencairan bisa dilakukan. Pihak bank penyalur sendiri sebenarnya sudah menjadwalkan waktu pengambilan dana oleh siswa ke bank. Pihak bank akan menghubungi sekolah-

sekolah yang ada siswa penerima PIP untuk memberitahukan waktu pengambilan dana PIP. Bank sudah mengalokasikan waktu mulai pukul 14.00 WIB untuk pelayanan pengambilan dana PIP yang didampingi oleh orang tua/wali dengan membawa KTP dan KK. Kendala lain di luar itu juga masih ada, misalnya masih ada orang tua yang takut atau tidak siap ke bank. Ketakutan yang mereka keluhkan adalah karena mereka merasa masih ada yang belum melek huruf, sehingga sulit untuk mengikuti prosedur dari bank yang harus dikerjakan oleh orang tua siswa penerima dana PIP.

Untuk jenjang pendidikan menengah (SMA dan SMK) yang disalurkan oleh Bank BNI sebagian sudah menggunakan KIP ATM. Model pencairan melalui KIP ATM ini lebih menguntungkan bagi semua pihak. Siswa tidak perlu mencari waktu izin dari sekolah untuk pencairan ke bank penyalur, karena pencairan dana bisa kapan saja dan di mana saja dengan ketentuan pembelanjaan produk hanya bisa di agen laku pandai Bank BNI. Beberapa daerah seperti di Yogyakarta, Bank BNI telah meluncurkan penggunaan model *Smart KIP* yaitu kartu ATM BNI plus *e-wallet* di dalamnya, namun di Kabupaten Indramayu masih belum melaksanakan model penyaluran dengan model *e-wallet* tersebut.

Hasil diskusi dalam DKT hampir semua responden berharap dapat melakukan transaksi pencairan dana PIP dengan lebih cepat dan mudah. Mereka berpendapat penggunaan kartu ATM dengan *e-wallet* di dalamnya merupakan solusi yang

dianggap cukup baik untuk saat ini. Pihak sekolah tidak akan merasa diberatkan dengan proses pencairan. Siswa dapat belajar setiap hari di sekolah tanpa harus meninggalkan jadwal pelajaran di kelas untuk mencairkan dana PIP di bank penyalur. Orang tua siswa lebih nyaman bekerja, tanpa harus meninggalkan pekerjaan sebagai buruh harian hanya sekedar untuk mendampingi anak ke bank penyalur. Bank penyalur pun lebih leluasa menjalankan *core* bisnisnya pada nasabah bank lain tanpa harus melayani siswa penerima PIP dengan segala persoalan persyaratan administratifnya serta menyusun jadwal khusus untuk penerima PIP.

Penggunaan *e-wallet* pun diharapkan dapat menggiatkan kembali koperasi-koperasi sekolah yang seperti “mati suri” dan “hidup segan, mati tak mau”. Koperasi-koperasi sekolah yang fasilitasnya sudah memadai akan didorong sebagai agen bank penyalur yang dilengkapi dengan mesin EDC. Namun penerapan model *e-wallet* ini tetap ada konsekuensi yang harus diterima, dana PIP hanya dapat dibelanjakan di toko atau *merchant* tertentu yang sudah bekerja sama dengan bank penyalur.

b. Cara Pencairan Dana PIP

Pencairan dana PIP oleh siswa penerima di Kabupaten Indramayu umumnya dilaksanakan di bank penyalur dan melalui mesin ATM. Pencairan melalui mesin ATM dirasa lebih mudah oleh siswa, karena mereka bisa mencairkan dan

menarik dana dengan lebih leluasa kapan saja waktunya yang mereka inginkan. Pencairan di Kabupaten Indramayu tidak begitu mengalami kesulitan, siswa dengan mudahnya mengambil dana dengan mendatangi mesin ATM yang ada di sekitar tempat tinggal mereka. Pencairan dana PIP dengan mesin ATM lebih banyak dilakukan oleh siswa SMA dan SMK, karena siswa jenjang pendidikan SMA dan SMK sudah lebih pandai dalam menggunakan teknologi perbankan seperti mesin ATM. Selain itu juga didukung dengan sudah banyaknya mesin ATM yang tersebar di beberapa titik daerah Indramayu. Sehingga pencairan dana PIP relatif lebih lancar dilakukan.

c. Strategi dalam Implementasi Model

Kondisi yang ada sampai saat ini penyaluran dan pencairan dana PIP di Kabupaten Indramayu hanya melalui rekening tabungan dan ATM saja. Namun demikian, penerapan *e-wallet* diharapkan dapat dilakukan secara bertahap. Untuk daerah perkotaan, sistem ini dapat dilakukan mengingat infrastruktur perbankan dan jaringan internet sudah memadai. Untuk wilayah yang terpencil, masih belum siap diterapkan. Jumlah ATM BNI di Kabupaten Indramayu menurut responden bank penyalur ada 46, jumlah kantor cabang 4 (empat) dan jumlah agen ada 863. Kondisi ini memungkinkan bagi Kabupaten Indramayu untuk menerapkan model lain (*Smart KIP*).

5. Pelaksanaan PIP di Kabupaten Kutai Kartanegara

Program Indonesia Pintar (PIP) di Kaltim belum seluruhnya terselesaikan. Dalam pelaksanaan PIP di Kabupaten Kutai Kartanegara, masih terdapat penerima yang tidak sesuai dengan kondisi yang ada, sehingga dalam penentuan calon penerima bantuan program ini masih kurang tepat sasaran. Selain itu, menurut keterangan salah seorang responden yaitu Kepala SMP 2 Tenggarong, menyampaikan bahwa dalam penentuan calon penerima PIP sudah usulkan nama-nama siswa-siswi tak mampu berdasarkan data Dapodik tetapi pada saat Surat Keputusan (SK) penerima dana PIP, hanya beberapa saja yang mendapatkan bantuan PIP sehingga tidak sesuai dengan harapan sekolah. Pemerintah berusaha keras untuk membantu anak tidak mampu agar tetap bersekolah. Dari data Kemendikbud terlihat dari progres pencairan dana di setiap kabupaten/kota di Provinsi Kaltim rata-rata mencapai 70 persen. (data per Agustus 2018). Berikut adalah tabel penyaluran dan pencairan dana PIP di Kaltim.

Tabel 4.9 Penyaluran dan Pencairan Dana PIP di Kabupaten Kutai Kartanegara

Kab/Kota	Disalurkan	Dicairkan	%
Kab. Berau	4.249.650.000	3.086.975.000	73%
Kab. Kutai Barat	5.380.800.000	3.835.875.000	71%
Kab. Kutai Kartanegara	16.136.350.000	11.625.900.000	72%
Kab. Kutai Timur	10.279.600.000	8.710.575.000	85%
Kab. Mahakam Ulu	832.250.000	288.775.000	35%
Kab. Paser	8.299.200.000	7.317.150.000	88%
Kab. Penajam Paser Utara	6.750.975.000	5.905.450.000	87%
Kota Balikpapan	10.557.875.000	8.508.300.000	81%
Kota Bontang	4.563.400.000	3.915.275.000	86%
Kota Samarinda	13.991.850.000	10.227.850.000	73%

Sumber: <http://sipintar.kemdikbud.go.id>

Dari alokasi dana Rp81,04 milyar yang disalurkan untuk Kaltim, baru cair Rp63,4 milyar. Secara khusus untuk penyaluran dan pencairan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), dalam Diskusi Kelompok Terpumpun yang dilakukan di Dinas Pendidikan Kukar, diakui oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kukar bahwa memang terdapat beberapa kendala dalam proses penyaluran. Selain kondisi geografis yang sulit terjangkau dan masih minimnya transportasi, juga terdapat kondisi di lapangan masih ditemukan kasus Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang tertahan dan belum didistribusikan.

Di Kabupaten Kukar, target dana PIP yang disalurkan adalah Rp16,136 milyar, namun baru dicairkan sebesar Rp11,625 milyar atau baru mencapai 72%. Capaian itu disebabkan oleh

kondisi geografis di beberapa kecamatan di Kukar yang terkendala dengan transportasi dan sulit dijangkau. Sehingga, siswa yang berhak menerima bantuan dana tidak bisa melakukan pencairan uang. Padahal, Pemerintah Pusat sudah menyalurkan dana PIP tersebut. Selain itu, masih ditemukan banyak kesalahan cetak identitas di KIP. Karena tidak sesuai, maka kartu mesti direvisi lagi agar siswa bisa menerima bantuan. Tak hanya itu, untuk daerah-daerah yang terpencil, tingkat pemahaman siswa maupun sekolah dalam pencairan bantuan PIP masih sangat minim. Meski sudah tercatat sebagai siswa yang berhak menerima bantuan, namun karena tidak mengerti, hingga saat ini pencairan PIP di Kukar, terutama di daerah pedalaman dan terpencil masih sangat minim. Padahal bantuan tersebut, menurutnya, sangat membantu dan ditunggu-tunggu siswa pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), atau siswa yang tergolong dari keluarga yang ekonominya tidak mampu.

Jika dilihat per satuan pendidikan sekolah, pada SD, dari target yang telah disalurkan sebesar Rp6,304 milyar (15.910 siswa) baru tercairkan separuhnya atau sebanyak Rp3,690 milyar (9.257 siswa). Kondisi ini diakui oleh dinas pendidikan bahwa saat ini, pengurusan KIP memang terpusat di Ibu Kota Kutai Kartanegara, Tenggarong. Belum dicairkannya dana PIP di satuan pendidikan SD disebabkan letak SD yang berada pada daerah-daerah yang terpencil dan jauh dari bank penyalur. Kondisi geografis daerah terpencil yang selalu

mengandalkan transportasi sungai, menyebabkan mahal biaya transportasi menuju bank penyalur. Banyak orang tua siswa penerima KIP enggan untuk mendampingi anaknya mencairkan dana KIP. Karena selain harus meninggalkan aktivitas dalam waktu yang cukup lama, biaya yang harus dikeluarkan untuk transportasi juga cukup besar. Bahkan, warga bisa 'rugi' karena biaya yang akan dikeluarkan malah lebih besar dengan dana yang akan diterima.

Selain itu, dalam hal pencairan oleh siswa SD di bank penyalur, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi yaitu siswa harus didampingi oleh orang tua siswa penerima. Untuk daerah perkotaan, hal tersebut tidak menjadi kendala, namun untuk daerah terpencil, persyaratan tersebut sulit dipenuhi oleh orang tua siswa. Jarak yang cukup jauh (menempuh waktu perjalanan hingga 3-4 jam ke bank penyalur) membuat orang tua enggan untuk mendampingi anaknya mencairkan dana PIP, karena akan kehilangan pendapatan sebagai buruh harian. Walaupun didampingi orang tua, karena waktu tempuh ke bank penyalur memakan waktu hingga 3-4 jam, setibanya di bank penyalur tidak dapat dicairkan karena untuk transaksi pencairan sudah tutup. Bank penyalur tidak dapat berbuat banyak karena sudah tersistem secara otomatis. Tabel 4.10 merupakan gambaran kondisi penyaluran dan pencairan dana PIP per satuan pendidikan di Kabupaten Kukar.

Tabel 4.10 Penyaluran dan Pencairan PIP di Kabupaten Kutai Kartanegara Berdasarkan Satuan Pendidikan

Satuan Pendidikan		Penyaluran	Pencairan	%
SD	Siswa	15.910	9.257	58,18%
	Rp	6.304.725.000	3.690.900.000	58,54%
SMP	Siswa	8.839	6.346	71,80%
	Rp	5.288.625.000	4.074.000.000	77,03%
SMA	Siswa	3.564	3.131	87,85%
	Rp	2.920.000.000	2.602.500.000	89,13%
SMK	Siswa	2.334	1.769	75,79%
	Rp	1.623.000.000	1.258.500.000	77,54%
Total	Siswa	30.647	20.503	66,90%
	Rp	16.136.350.000	11.625.900.000	72,05%

Sumber: sipintar.kemendikbud.go.id (Data per Agustus 2018).

Untuk jenjang SMP, progres pencairannya (rupiah) telah mencapai 77% atau sebesar Rp4,074 milyar dari target penyaluran yang sebesar Rp5.288 milyar. Sementara dari jumlah siswa yang menerima, baru dicairkan kepada siswa sejumlah 6.346 dari 8.839 siswa SMP yang disalurkan. Untuk satuan pendidikan SMA, dari total dana Rp2,920 milyar, telah cair Rp2,602 milyar. Siswa yang menerima, telah mencapai 3.131 siswa dari yang seharusnya 3.564 (lihat Tabel 4.10). Untuk satuan pendidikan SMP dan SMA ini, distribusi dana KIP tidak begitu terkendala, karena selain anak-anak penerima sudah dikategori remaja, mereka sudah bisa

mengambil sendiri dana PIP. Isu yang beredar bahwa jika para siswa belum melakukan pencairan dana dengan skema aktivasi KIP hingga akhir tahun, maka dana KIP tersebut akan hilang dan dikembalikan ke pusat telah memotivasi siswa untuk segera mencairkan. Padahal informasi tersebut justru sebaliknya, jika siswa belum mencairkan dana, maka dana tersebut tidak akan hilang, bahkan akan tetap bertambah pada periode berikutnya.

Akan tetapi untuk siswa SMP, mereka tetap harus didampingi oleh orang tua pada saat pencairan di bank penyalur, karena masih di kategori belum “cakap hukum” secara perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1330, cakap hukum diartikan bahwa seseorang sudah dewasa ketika ia telah berumur 21 tahun dan dapat bertransaksi melakukan kontrak secara hukum. Pencairan dana di bank termasuk melakukan perbuatan transaksi secara hukum. Oleh karena siswa SD dan SMP belum berusia 21 tahun, maka siswa-siswa yang belum dewasa ini semua perbuatan hukumnya diwakili oleh orang tua atau walinya.

Selain kendala yang sudah diuraikan di atas, menurut beberapa kepala sekolah dalam DKT disampaikan bahwa minimnya sosialisasi terkait KIP tersebut, di tengah-tengah masyarakat, sehingga banyak yang kurang paham tentang PIP. Sekolah juga tidak memiliki biaya untuk penyelenggaraan sosialisasi kepada orang tua siswa. Orang tua siswa tidak dapat hadir ke sekolah untuk mencari informasi terkait dengan PIP

mengingat jarak tempuh dari rumah menuju sekolah cukup jauh. Selain itu, terdapat anak yang terdata menerima KIP tetapi berhenti sekolah. Berhentinya sekolah bukan karena sekolah mahal. Tapi lebih kepada harus membantu keluarga mencari sumber kehidupan. Pihak sekolah telah menjelaskan kepada orang tua bahwa sudah ada jaminan bahwa semua anak berhak mendapat pendidikan.

Terkait progres yang minim di satuan pendidikan SD tersebut, Dinas Pendidikan Kukar berjanji akan terus memacu sekolah untuk mendorong pencairan secepatnya. Keberhasilan penyaluran KIP ini tak bisa hanya bergantung pada Disdik Kukar semata. Mulai dari tokoh-tokoh masyarakat, ketua RT, kepala desa harus aktif memantau kondisi warga di wilayahnya masing-masing. Mereka yang lebih tahu bagaimana kondisi warganya. Kasus-kasus yang terjadi akan menjadi bahan refleksi bagi Disdik Kukar dan semua pihak dan tak perlu saling menyalahkan. Jika masih ada kekurangan, diharapkan jadi bahan evaluasi untuk lebih baik ke depannya. Selanjutnya hasil DKT disebutkan bahwa baik BRI maupun BNI yang ditunjuk sebagai lembaga penyalur dalam menjalankan tugasnya selama ini tidak ada kendala yang dihadapi, bank penyalur tersebut melakukan sosialisasi secara personal terkait pencairan dan pemanfaatan dana PIP kepada orang tua siswa pada saat pendampingan pencairan. Tidak ada strategi khusus yang dilakukan oleh BRI maupun BNI dalam proses pencairan PIP, misalnya menentukan jadwal hari

khusus untuk pencairan dana PIP, ataupun memberikan prioritas bagi siswa penerima PIP untuk bisa mencairkan dananya dengan cepat dan mudah melalui jalur khusus.

a. Model Penyaluran dan Pencairan Dana PIP

Salah satu komponen keberhasilan PIP adalah kinerja bank penyalur. Di Kabupaten Kutai Kartanegara, BRI telah ditunjuk melayani pencairan dana KIP untuk satuan pendidikan SD dan SMP, sedangkan BNI diperuntukkan satuan pendidikan SMA. Penyelenggaraan PIP di Kabupaten Kutai Kartanegara pada kedua lembaga penyalur ini masih menggunakan pola seperti biasanya, yakni pola tabungan dengan *virtual account*. Pada program ini BNI menggunakan rekening BNI SimPel untuk penyalurannya, sehingga diharapkan akan memberikan edukasi menabung bagi siswa penerima PIP. Pencairan yang dilakukan di Kabupaten Kukar dengan mendatangi bank penyalur, karena Kukar hanya menerapkan model tabungan SimPel yang pencairannya dilakukan di bank penyalur/agen bank.

b. Cara Pencairan Dana PIP

Pencairan dana PIP yang dilakukan oleh siswa penerima PIP di Kabupaten Kukar tidak berbeda dengan kabupaten lain yang menjadi lokasi studi ini, yaitu dilaksanakan dengan cara mendatangi bank penyalur dan melalui mesin ATM. Pencairan di Kabupaten Kukar ini juga masih ada masalah karena ada siswa tidak bisa memenuhi syarat yang diperlukan

oleh bank, sehingga tidak bisa dicairkan seperti siswa tidak membawa surat pengantar dari sekolah. Namun demikian, pencairan dapat dilakukan meski sering terhambat karena persoalan yang ditemui di lapangan. Persoalan dari bank penyalur yang kadang membuat kebijakan sendiri seperti mengharuskan adanya akte kelahiran dari siswa ataupun kartu keluarga. Hal ini tentu saja dapat memperlambat pencairan dana PIP, sehingga di Kabupaten Kukar termasuk daerah yang lambat dalam pencairannya.

c. Strategi dalam Implementasi Model

Terkait dengan strategi dalam pelaksanaan model penyaluran dan pencairan dana PIP yang ada, tampaknya di Kabupaten Kukar tidak ada kendala yang bisa menghambat. Hal ini dikarenakan di Kabupaten Kukar, infrastruktur dari bank penyalur baik BRI maupun BNI telah cukup memadai. Pada 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Kukar telah berdiri Kantor Unit BRI. Sementara BNI baru mengoperasikan 1 *outlet* dengan 37 agen laku pandai yang aktif.

Jika model pencairan dan penyaluran dana PIP baik dengan pola rekening tabungan, dan KIP ATM atau *Smart KIP (e-wallet)* tampaknya sudah bisa dilakukan mengingat kesiapan infrastruktur dari bank penyalur. Hasil DKT menyatakan bahwa kedua bank penyalur tersebut menyatakan telah siap. Informasi yang disampaikan oleh BNI dan BRI dalam DKT, yaitu bahwa siswa penerima PIP di Kabupaten Kukar sudah

cukup pandai dalam menggunakan kartu elektronik. Penggunaan kartu *e-wallet* diakui akan mempermudah pihak bank dalam mencairkan dana PIP. Bank penyalur tidak akan direpotkan oleh pihak siswa yang akan mencairkan dana PIP serta menghilangkan daftar antrian dalam pencairan dana PIP. Siswa dapat menggunakan kartu pada agen-agen yang telah ditunjuk oleh bank untuk mencairkan dana PIP-nya.

Salah satu persyaratan agar dana PIP lebih cepat, maka perlu pengadaan agen-agen laku pandai dan koperasi-koperasi sekolah. Sehingga untuk wilayah terpencil ini, model buku tabungan adalah yang terbaik. Namun demikian untuk mempermudah pencairan dana PIP, hendaknya pihak bank penyalur, terutama pihak BRI yang menangani dana PIP untuk SD dan SMP langsung jemput bola, BRI perlu memiliki kantor *mobile* yang bisa langsung berhadapan dengan siswa SD dan SMP tanpa siswa harus meninggalkan pelajaran di kelas.

B. Model Penyaluran dan Pencairan Dana PIP

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan di lapangan maka model penyaluran dan pencairan dana PIP yang dapat disajikan adalah sebagai berikut.

1. Model Penyaluran dan Pencairan

a. Rekening Tabungan Simpanan Pelajar (SimPel)

Di dalam penyaluran dan pencairan dana PIP dapat dilakukan melalui rekening tabungan, yang disebut dengan tabungan simpanan pelajar (tabungan SimPel) dan diberikan pada setiap siswa penerima dana PIP. Tabungan SimPel adalah tabungan untuk siswa yang diinisiasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diperuntukkan bagi siswa tingkat PAUD sampai dengan jenjang SMA atau sederajat yang diterbitkan secara bersama (*Mass Account Opening*) dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini. Rekening SimPel memiliki spesifikasi khusus dengan tidak membebani siswa seperti bebas pajak dan administrasi, saldo awal dan saldo minimal sebesar 0 rupiah, dan masa *dormant* (rekening pasif) selama 720 hari. Maka dari itu, rekening SimPel digunakan sebagai basis penyaluran dana PIP.

Secara garis besar, mekanisme pembukaan rekening dana PIP dilakukan melalui tahapan yang dimulai dengan Kemendikbud mengirimkan data yang telah diverifikasi ke bank penyalur yang sudah ditunjuk yaitu bank BRI dan BNI, lalu bank akan melakukan pemetaan data siswa penerima PIP dan cabang padanan serta menyerahkan daftar rekening yang telah disiapkan ke Kemendikbud, kemudian Kemendikbud mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor

Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Kemendikbud akan mengirimkan pemberitahuan ke setiap sekolah siswa penerima bantuan PIP untuk penerbitan SK bagi siswa tersebut. Setelah KPPN menerbitkan SP2D, Kemendikbud lalu menerbitkan Surat Perintah Pemindahbukuan (SPPB) sebagai perintah penyaluran bantuan yang menjadi dasar pihak bank untuk menyalurkan bantuan ke rekening siswa penerima dana PIP.

Siswa penerima bantuan PIP harus melakukan aktivasi rekening tabungan sebelum dapat digunakan. Buku tabungan SimPel hanya bisa dicetak dan dicairkan di unit kerja bank yang sama dengan unit kerja pemilik rekening (cabang padanan) dengan melengkapi syarat-syarat yang kemudian diverifikasi langsung oleh petugas. Pada saat aktivasi, yang dilakukan secara individu, siswa membawa surat keterangan kepala sekolah, membawa kartu tanda identitas (KIP/Kartu Pelajar/KTP/KK/Surat Keterangan), untuk siswa SD dan SMP harus didampingi oleh orang tua/wali atau kepala sekolah/guru yang ditugaskan. Sedangkan aktivasi yang dilakukan secara kolektif, penerima kuasa membawa surat keterangan kepala sekolah dan fotokopi KTP dan SK Pengangkatan Kepala Sekolah dengan menunjukkan aslinya, surat pertanggungjawaban mutlak, surat kuasa dari siswa atau orang tua/wali (jenjang SD dan SMP). Pembukaan rekening

SimPel membutuhkan data yang lengkap dari siswa penerima bantuan, orang tua/wali, dan juga dari sekolah.

b. Model KIP ATM atau KIP Plus

Model penyaluran dan pencairan dana PIP melalui Anjungan Tunai Mandiri yang selanjutnya disebut KIP ATM merupakan salah satu terobosan agar para penerima manfaat PIP tidak lagi harus mengantri di *teller bank*. Untuk siswa Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama diberikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang dapat berfungsi sebagai ATM (KIP ATM) yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI), sedangkan untuk siswa SMA dan SMK penerima manfaat PIP mendapatkan KIP ATM yang dikeluarkan oleh Bank Negara Indonesia (BNI). Dengan adanya KIP ATM akan lebih memudahkan siswa penerima manfaat dana PIP dalam mencairkan dana PIP di ATM terdekat sehingga siswa terbantuan untuk biaya sekolahnya. Pembuatan kartu ATM bisa dilakukan bersamaan dengan pembukaan rekening tabungan. Kartu ATM tersebut dilengkapi dengan *Personal Identification Number* (PIN). PIN berfungsi penting sebagai kata kunci keamanan dana dan informasi keuangan nasabah di bank. Walaupun demikian, saat ini belum semua penerima manfaat PIP tersebut memiliki kartu KIP ATM karena proses penyalurannya dilakukan secara bertahap oleh Pemerintah. Hingga Juli 2018, realisasi pencetakan kartu KIP ATM sudah mencapai 11.299.190 kartu. Dari jumlah tersebut, baru

2.152.447 KIP ATM yang sudah diaktivasi, selebihnya sebanyak 9.146.713 KIP ATM belum diaktivasi. Secara rinci, realisasi pencetakan kartu KIP ATM dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.11 Realisasi Pencetakan dan Aktivasi KIP Tahun 2018

Sekolah	Cetak	Aktivasi	%	Belum Aktivasi	%
SD	5.779.702	432.386	7	5.347.316	93
SMP	2.119.439	216.447	10	1.902.992	90
SMA	1.520.442	668.541	44	851.881	56
SMK	1.879.627	835.103	44	1.044.524	56
Jumlah	11.299.190	2.152.447	66	9.146.713	81

Sumber: Kemendikbud (2018).

Rincian data tersebut memperlihatkan bahwa untuk jenjang SD dan SMP persentase yang belum melakukan aktivasi masih cukup tinggi, berada di angka 93% untuk SD dan 90% untuk SMP. Hal ini dapat dimaklumi bahwa usia siswa SD dan SMP, secara peraturan perundang-undangan, dianggap masih belum layak untuk melakukan transaksi perbankan atau belum cakap hukum. Jika kita cermati Petunjuk Pelaksanaan PIP Tahun 2018, ada perbedaan persyaratan bagi siswa jenjang SD dan SMP dengan SMA dan SMK. Untuk melakukan aktivasi, siswa SD/Paket A dan SMP/Paket B harus membawa KTP orang tua dan Kartu Keluarga dengan

didampingi oleh orang tua/wali. Bagi orang tua yang tidak memiliki KTP/KK dapat diganti dengan surat keterangan dari kepala desa/lurah. Apabila orang tua/wali tidak bisa mendampingi peserta didik pada saat aktivasi maka dapat diwakili oleh kepala sekolah dengan membawa KTP dan SK Pengangkatan Kepala Sekolah yang masih berlaku. Sedangkan untuk peserta didik SMA/Paket C atau SMK yaitu dengan membawa salah satu tanda/identitas pengenalan (KIP/Kartu Pelajar/Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga/Surat keterangan dari kepala desa/lurah (Kemendikbud, Juklak PIP 2018). Dari hasil verifikasi data di lapangan juga diperoleh informasi bahwa ada kasus-kasus di mana orang tua sulit dan masih merasa canggung untuk mendampingi anaknya melakukan aktivasi rekening ke bank atau banyak juga ditemui orang tua/wali yang tidak melengkapi persyaratan yang dibutuhkan pada saat akan melakukan aktivasi.

Pemanfaatan dana PIP melalui ATM terus diupayakan karena bisa ditarik kapan dan di mana saja oleh siswa penerima manfaat dengan syarat tersedianya fasilitas pendukung (mesin ATM) di lingkungan tempat tinggalnya. Beberapa layanan ATM saat ini sudah mencapai ke daerah hingga tingkat kecamatan, seperti BRI dan BNI. Walaupun demikian, masih banyak juga yang belum terdapat layanan perbankan tersebut, sehingga perlu adanya koordinasi antara pemberi bantuan dengan lembaga penyalur untuk memastikan daerah mana saja yang siap jika model KIP ATM ini diterapkan.

Tantangannya adalah bagi daerah yang belum memiliki fasilitas tersebut yang memadai. Tidak sedikit daerah yang penerima manfaat PIP berada jauh dari pusat kota atau kecamatan setempat. Untuk sampai ke ibu kota kabupaten atau kecamatan membutuhkan waktu yang lama dan juga harus mengeluarkan biaya lebih besar. Untuk daerah seperti ini masih sulit jika model penyaluran dan pencairan melalui KIP ATM diterapkan. Akan tetapi, saat ini perbankan (BNI dan BRI) sudah memiliki agen-agen mereka yang tersebar hampir di setiap pelosok daerah. Walaupun tidak tersedia fasilitas mesin ATM, melalui agen-agen ini (Agen 46 untuk BNI dan BRI-*Link* untuk BRI), setiap penerima manfaat yang memiliki KIP ATM bisa melakukan tarik tunai dengan syarat penerima manfaat PIP melakukan koordinasi dengan agen dan kantor cabang pendanaan terdekat. Hal ini dimaksudkan untuk menyepakati jadwal pelaksanaan kegiatan, jumlah siswa yang akan mengambil bantuan/dana dan jumlah nominal yang akan diambil oleh seluruh siswa.

Dari segi kemanfaatannya, KIP yang berfungsi sebagai ATM ini memberikan kemudahan bagi siswa penerima bantuan PIP saat penarikan uang. Siswa tidak perlu lagi ke bank untuk mencairkan dana PIP yang akan menyebabkan antrian panjang di bank, apalagi bank penyalur hanya melayani pencairan dana PIP pada hari dan jam tertentu saja. Jika semua siswa penerima bantuan PIP mendatangi bank pada saat yang bersamaan, petugas bank juga akan kewalahan

melayani para siswa tersebut. Selain itu, siswa penerima bantuan PIP bisa melakukan transaksi non-tunai dengan kartu KIP ATM, misalnya untuk membeli keperluan sekolah mereka di toko-toko yang bekerja sama dengan bank penyalur. Di sisi lain, perlu diperhatikan juga bahwa KIP ATM ini menggunakan kode untuk melakukan transaksi atau yang dikenal dengan istilah *Personal Identification Number* (PIN) yang terdiri dari rangkaian angka yang hanya diketahui oleh pemegang kartu saja. Jika salah memasukkan kode angka tersebut, maka transaksi tidak bisa dilakukan atau gagal. Terlebih, jika salah memasukkan kode tersebut sebanyak tiga kali, kartu akan diblokir. Hal seperti ini penting diperhatikan, terutama oleh pengambil kebijakan mengingat para penerima PIP ini adalah peserta didik yang masih usia muda, dikhawatirkan belum mampu menggunakannya secara tepat. Oleh karena itu, orang tua/wali perlu mendampingi anaknya dalam pemanfaatan dana PIP agar tepat penggunaannya. Jika pun kartu KIP ATM ini dipegang oleh orang tua/wali, harus bisa dipastikan bahwa penggunaannya hanya untuk keperluan sekolah siswa semata.

c. Smart KIP (e-Wallet)

Perkembangan alat pembayaran di masa lalu bermula dari sistem barter, atau disebut tukar-menukar barang dengan barang lainnya. Selanjutnya, muncul istilah sistem pembayaran tunai atau pembayaran dengan uang kertas. Oleh karena kecerdasan manusia, maka melahirkan sistem

pembayaran nontunai (*e-wallet*) yang berhasil menggeser sistem pembayaran tunai. Dengan adanya pembayaran nontunai maka semua pembelian/transaksi menjadi praktis karena tak perlu repot-repot membawa uang tunai dalam dompet dengan jumlah yang banyak. Kecenderungan *cashless* yang melahirkan kartu ATM pun digandrungi. Sebagian dari kita pasti ingat ketika *booming* ATM karena di masa lalu memiliki ATM menjadi kebanggaan tersendiri.

Electronic wallet (e-wallet) atau dompet elektronik menurut peraturan Bank Indonesia tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran Pasal 1 Angka 7 adalah layanan elektronik untuk menyimpan data instrumen pembayaran antara lain alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan/atau uang elektronik. Kartu/uang elektronik tersebut dapat juga menampung dana, untuk melakukan pembayaran. *E-wallet* juga disebut sebagai uang elektronik yang berbasis aplikasi (*server-based*). Dalam pemakaiannya perlu harus terkoneksi dengan server penerbit. Contoh *e-wallet* adalah T-CASH, XL Tunai, I-Pay, Ponsel CIMB Niaga, BBM Money Permata Bank, dan DOKU. Jangkauan penggunaan T-CASH lebih untuk keperluan belanja secara *offline* di gerai ritel maupun *online* sampai pembelian pulsa telepon. Manfaat TCASH hanya diperuntukkan oleh pengguna Telkomsel, XL Tunai hanya diperuntukkan oleh pengguna XL, dan I-Pay hanya diperuntukkan oleh pengguna Indosat. Begitu juga *e-wallet*

keluaran operator seluler lainnya. Kelemahan *e-wallet* keluaran operator seluler hanya bisa digunakan dalam keadaan ponsel hidup, sehingga perlu baterai ponsel yang bagus. Dari segi keamanan, *e-wallet* memiliki keunggulan penting karena penggunaannya berdasarkan pada nomor hp pengguna dan dilengkapi dengan kode PIN. *E-wallet* juga memiliki fitur lebih lengkap karena bisa untuk membayar token listrik, tagihan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), tagihan TV berbayar.

Terkait dengan *e-wallet* dalam Program Indonesia Pintar (PIP), pemerintah menunjuk Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI untuk menyalurkan dana bantuan bagi siswa penerima PIP. Dalam PIP digunakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau disebut *Smart KIP*. Pada pertama kalinya *Smart KIP* diujicobakan pada 142 siswa penerima PIP yang tersebar di 28 SMA di Yogyakarta. *Smart KIP* yang diberikan kepada penerima PIP memiliki dua fungsi, yaitu untuk mengakses rekening tabungan Simpanan Pelajar (SimPel) dan rekening *e-wallet*. Sebagai rekening tabungan, tabungan SimPel menjadi sarana penyimpanan dana PIP dan dapat ditarik atau ditransaksikan sesuai dengan kebutuhan siswa. Pencairan dana bantuan yang ada di rekening tabungan dapat dilakukan di ATM dan *teller* BNI. Sebagai rekening *e-wallet*, dananya dapat digunakan untuk membeli perlengkapan sekolah secara nontunai di koperasi sekolah,

toko perlengkapan sekolah, toko buku atau *merchant* yang menjadi Agen 46 khusus untuk Bank BNI.

Besarnya saldo *e-wallet* tergantung dari jenis satuan pendidikan, misalnya SD berbeda dengan SMP dan SMP juga berbeda dengan SMA dan SMK. Pembagian persentase antara dana rekening tabungan dengan *e-wallet* adalah 50% : 50%, artinya 50% rekening tabungan dan 50% *e-wallet*. Misalnya, untuk SMA dan SMK yang menerima dana KIP untuk dua semester sebesar Rp1.000.000,00 maka hanya 50% yang bisa diambil secara tunai sebesar Rp500.000,00 sedangkan 50% lainnya hanya bisa diambil nontunai atau dalam bentuk barang juga sebesar Rp500.000,00.

Persyaratan *e-wallet* yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan yaitu: 1) perlu ada ketentuan jumlah dana yang akan ditetapkan di *e-wallet* dan yang akan ditetapkan di rekening (artinya dana bisa diambil tunai); 2) jumlah dana yang ada di *e-wallet* apabila tidak dimanfaatkan, maka mekanisme selanjutnya perlu dipikirkan, apakah bisa dikonfersi ke dana rekening, dan berapa lama batasan waktu ini menjadi *e-wallet*; 3) untuk *merchant* apakah nanti akan di koperasi sekolah atau di agen; 4) apakah ada biaya transaksi atau tidak di *merchant* tersebut perlu menjadi bahan pertimbangan mengingat biaya transaksi adalah salah satu keuntungan; 5) jika ditetapkan *merchant*-nya di koperasi dipandang perlu untuk mengontrol harga, mengingat ada isu

belanja di koperasi lebih mahal; 6) jumlah siswa penerima PIP di dalam satu sekolah; 7) kondisi geografis dan infrastruktur perbankan di suatu daerah tidak sama; 8) jenjang siswa apakah SD, SMP akan dilibatkan atau SMA dan SMK yang terlibat.

Penyaluran dan Pencairan Dana PIP

Penyaluran dan pencairan model tabungan SimPel, ATM dan *e-wallet* dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu: 1) *outlet* (Kantor Cabang, Kapal Si Pintar, dan Mobil Layanan Gerak dan *Weekend Banking*); 2) ATM; 3) Agen Laku Pandai; 4) Toko/*Merchant*/Koperasi Sekolah (Tunai/Nontunai). Untuk lebih jelas dapat diuraikan sebagai berikut.

1) Outlet; (Kantor Cabang, Kapal Si Pintar, dan Mobil Layanan Gerak) dan Weekend Banking

Pencairan dana PIP dengan model tabungan SimPel dapat dilakukan langsung melalui *outlet* bank yang tersebar di seluruh Indonesia. *Outlet* atau unit kerja bank yang melayani pencairan dana PIP antara lain Kantor Cabang (KC), Kantor Cabang Pembantu (KCP), Kantor Kas (KK), unit dan layanan gerak seperti Mobil Layanan Gerak (BNI), Teras Keliling (BRI) dan Kapal Si Pintar. Mekanisme pencairan dana KIP melalui *outlet* bank dilakukan dengan cara:

- a) Siswa penerima dana bantuan membawa dokumen persyaratan.

- b) Mengisi formulir pencairan dana sesuai dengan ketentuan.
- c) Melakukan proses pencairan di *teller*.
- d) Pencairan bisa dilakukan secara individu maupun kolektif, dilakukan pada hari dan jam kerja, atau di hari libur di sejumlah *outlet weekend banking*.

Untuk pencairan dana yang dilakukan secara individu, siswa harus membawa surat keterangan kepala sekolah/kepala lembaga pendidikan, buku tabungan dan membawa kartu tanda identitas (KIP/Kartu Pelajar/KTP/KK/surat keterangan). Siswa SD dan SMP yang tidak memiliki KTP harus didampingi oleh orang yang bertindak sebagai wali yaitu orang tua, wali, kepala sekolah atau guru yang ditugaskan oleh kepala sekolah, sedangkan siswa SMA/SMK yang sudah memiliki KTP dapat melakukan pencairan secara mandiri.

Penarikan dana secara kolektif (Juklak, 2018, Kemendikbud), dapat dilakukan apabila memenuhi salah satu dari kondisi sebagai berikut:

- a) Penerima PIP bertempat tinggal di daerah yang kondisinya sulit untuk mengakses ke bank/lembaga penyalur, seperti: (1) tidak ada kantor bank/lembaga penyalur di kecamatan sekolah/tempat tinggal peserta didik; (2) kondisi geografis yang menyulitkan seperti daerah kepulauan, pegunungan, atau pedalaman; (3) jarak dan waktu tempuh relatif jauh.

- b) Penerima PIP bertempat tinggal di daerah yang kondisi transportasinya sulit, seperti: (1) biaya transportasi relatif besar; (2) armada transportasi terbatas.
- c) Penerima PIP tidak memungkinkan untuk mengambil dana secara langsung dan seperti: (1) sedang sakit yang menyebabkan peserta didik tidak dapat melakukan aktivitas normal; (2) sedang mengalami bencana alam/cuaca buruk; (3) hambatan lainnya yang tidak terduga.
- d) Penerima PIP yang diundang dalam acara kunjungan kerja Pemerintah.

Kondisi yang mengakibatkan pencairan dilakukan secara kolektif harus disebutkan dalam Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM). Pihak yang mewakili pencairan dana secara kolektif adalah kepala sekolah atau guru penerima kuasa. Persyaratan dokumen yang harus dipenuhi saat melakukan pencairan dana antara lain fotokopi KTP dan SK Pengangkatan Kepala Sekolah dengan menunjukkan yang asli, surat kuasa dari siswa atau orang tua/wali, surat keterangan kepala sekolah dan SPTJM. Formulir penarikan berisi data nama siswa, nomor rekening siswa, angka penarikan dalam angka dan kata, tanda tangan anak (siswa SMA/SMK) atau orang tua/wali (siswa SD dan SMP).

- 2) *ATM BRI, BNI, ATM Lain yang Berlogo Link, Bersama dan Prima atau Layanan Mobil*

Salah satu terobosan yang dapat memudahkan penerima manfaat PIP mencairkan dana bantuannya yaitu dengan menerbitkan KIP berbentuk ATM. Penyaluran KIP berbentuk kartu ATM sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Nontunai dan juga untuk mendorong literasi keuangan sejak dini. Siswa penerima bantuan PIP yang memiliki KIP ATM, dapat langsung mencairkan/menarik dana di kantor layanan BNI dan BRI atau mesin ATM bank tersebut, untuk selanjutnya digunakan sesuai dengan ketentuan peruntukkan PIP. Selain melakukan pencairan di mesin ATM BRI/BNI, siswa penerima KIP ATM juga bisa mencairkan dana di mesin ATM lain yang berlogo *Link*, Bersama dan Prima, dengan langkah dan tata cara yang sama. Namun penarikan tunai pada mesin ATM selain BRI/BNI biasanya dikenakan biaya tambahan sebesar 6.500 rupiah. Adapun cara pencairan dana PIP melalui ATM sama dengan penarikan tunai di mesin ATM menggunakan kartu ATM debit pada umumnya. Berikut langkah/mekanisme penarikan dana:

- a) Masukkan kartu KIP ATM ke mesin ATM BNI/BRI;
- b) Pastikan kartu tidak terbalik. Caranya, awalan nomor pada kartu KIP ATM menghadap atas karena itu adalah bagian yang dimasukkan terlebih dahulu;
- c) Pilih bahasa pengantar sesuai kemampuan dan keinginan: Indonesia atau Inggris;

- d) Masukkan PIN KIP ATM. PIN ini biasanya didapatkan bersamaan dengan penerimaan buku tabungan dan kartu KIP ATM. Pastikan memasukkan PIN dengan benar;
- e) Pilih jumlah uang yang akan diambil. Layar akan langsung menampilkan nominal-nominal yang bisa langsung diambil. Jika jumlah nominal yang ingin diambil tidak ada pada pilihan maka pilih menu Transaksi Lain > Penarikan > Jumlah Lain;
- f) Lalu masukkan jumlah nilai uang yang ingin diambil;
- g) Pilih cetak resi jika ingin mendapatkan struk transaksi;
- h) Uang akan keluar dari mesin;
- i) Ambil uang;
- j) Tekan *cancel* pada *keyboard* mesin ATM; dan
- k) Kartu KIP ATM akan keluar.

3) *Pencairan Dana PIP di Agen 46 dan Agen Brilink*

Agen 46 adalah mitra BNI (perorangan atau badan hukum yang telah bekerja sama dengan BNI) untuk menyediakan layanan perbankan kepada masyarakat (Layanan Laku Pandai, Layanan Keuangan Digital dan Layanan *e-Payment*). Layanan Laku Pandai mencakup buka rekening BNI Pandai, setoran tunai gabungan, dan tarik tunai gabungan. Layanan Keuangan Digital mencakup pendaftaran uang elektronik, setor tunai uang elektronik dan tarik tunai uang elektronik. Selanjutnya untuk Layanan *e-Payment* mencakup transfer sesama BNI dan *online* antarbank, pembelian token listrik dan *voucher* pulsa

HP, pembayaran tagihan listrik, tagihan kartu kredit, *personal loan*, BPJS Kesehatan atau juga untuk asuransi, tiket (kereta/pesawat), pulsa prabayar, dan lain-lain (<http://www.bni.co.id/id-id/ebanking/agen46>).

Terkait dengan PIP, layanan yang diberikan Agen 46 adalah Layanan Laku Pandai. Keuntungan menjadi Agen 46 yaitu: a) persyaratan mudah dan gratis; (b) bisa diakses dari berbagai *gadget*; (c) *fee* per transaksi yang kompetitif; dan (d) jaringan kantor layanan yang luas.

Kriteria calon Agen 46 yaitu: a) dikenal oleh masyarakat sekitarnya; b) memiliki usaha minimal 2 tahun; c) memiliki kemampuan likuiditas/modal; d) mampu memasarkan produk; e) memiliki persyaratan identitas/legalitas; f) perorangan, KTP, dan NPWP; dan g) badan hukum/badan usaha; akte pendirian, AD/ART, SIUP/SITU/NPWP, pengesahan oleh kementerian/lembaga/institusi terkait. Kelengkapan Agen 46: a) komputer dan koneksi internet; b) printer; c) tablet/HP; dan d) EDC mini ATM.

Selanjutnya untuk Agen BRI yaitu BRILink merupakan perluasan layanan BRI di mana BRI menjalin kerja sama dengan nasabah BRI sebagai Agen yang dapat melayani transaksi perbankan bagi masyarakat secara *real time online* menggunakan fitur EDC mini ATM BRI (<https://bri.co.id/tentang-brilink>). Penarikan tunai dapat dilakukan di Agen BriLink tersebut.

Mekanisme pencairan dana PIP di Agen 46/BRILink:

- a) Siswa penerima dana PIP telah melakukan terlebih dahulu aktivasi rekening SimPel PIP dan aktivasi KIP di Kantor Cabang (BRI untuk jenjang SD dan SMP; BNI untuk jenjang SMA/SMK) baik secara individual maupun secara kolektif.
 - b) Melakukan koordinasi dengan Agen BRILink dan Kantor Cabang Pendanaan BRI terdekat (jenjang SD dan SMP) atau Agen 46 dan Kantor Cabang padanan BNI terdekat (jenjang SMA/SMK) untuk disepakati mengenai jadwal pelaksanaan kegiatan, jumlah siswa yang akan mengambil bantuan dan jumlah nilai nominal bantuan yang akan diambil oleh seluruh siswa.
 - c) Datang ke Agen BRILink (jenjang SD dan SMP) atau Agen BNI 46 (jenjang SMA/SMK) dengan membawa Buku Tabungan dan KIP.
 - d) Menyampaikan kegiatan pencairan dana PIP kepada Agen.
 - e) Agen akan memproses transaksi pencairan dana PIP.
 - f) Siswa menerima dana bantuan PIP dan bukti transaksi pencairan dana PIP dari Agen.
- 4) *Pencairan di Toko/Merchant/Koperasi Sekolah (Tunai/Non-tunai)*

Koperasi sekolah dapat menjadi *channel* penyaluran dan pencairan dana PIP apabila telah menjadi Agen 46.

Keuntungan pengambilan di koperasi sekolah yaitu: a) mengedukasi siswa melakukan transaksi perbankan/menabung; b) dekat dengan sekolah dan rumah; c) keuntungan bagi Usaha Koperasi Sekolah; d) koperasi sekolah juga bisa melayani transaksi lainnya (pula, PLN, dan lain-lain); dan e) mendapat *fee* transaksi perputaran uang PIP dilakukan di sekolah/lingkungan masyarakat.

Pencairan bantuan dapat pula dilakukan dengan pembelanjaan secara non-tunai menggunakan saldo *e-wallet* PIP. Untuk lebih jelas berikut langkah yang harus dilakukan.

Mekanismenya yaitu: a) siswa penerima KIP membeli perlengkapan sekolah di koperasi sekolah, toko buku, toko perlengkapan sekolah, atau *merchant* yang bertanda khusus menerima KIP dan telah bekerja sama dengan BRI/BNI; b) sesuaikan nominal pembelanjaan dengan kuota dana PIP yang telah ditetapkan; c) lakukan transaksi pembayaran dengan menggunakan KIP; dan d) siswa menerima bukti transaksi pembelanjaan.

Syarat kerja sama koperasi sekolah dengan BNI/BRI sebagai *merchant* pencairan non-tunai PIP yaitu: a) koperasi sekolah sudah memiliki fasilitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan sekolah bagi siswa/i; b) bersedia menjadi agen bank yang bekerja sama (Agen 46/Agen BRILink); dan c) koperasi sekolah harus berbadan hukum, dibuktikan dengan berkas izin usaha/NPWP.

Mekanisme pengajuan kerja sama koperasi sekolah dengan BRI/BNI yaitu:

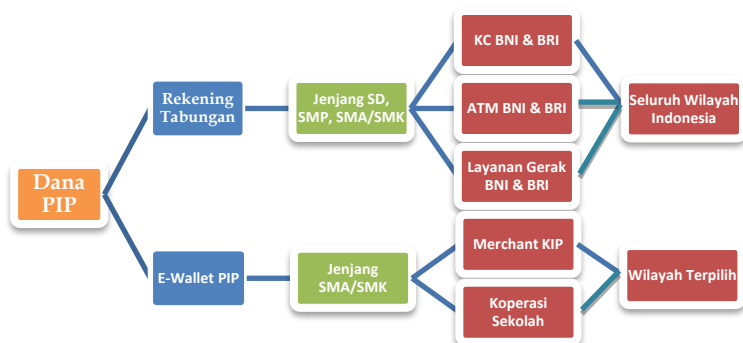
- a) Menyiapkan KTP, buku rekening BRI/BNI, berkas izin usaha, dan NPWP. Jika koperasi sekolah tidak/belum memiliki NPWP, bisa menggunakan NPWP kepengurusan sekolah;
- b) Mengajukan permohonan kerja sama ke Kantor Cabang BRI/BNI;
- c) Setelah disetujui, koperasi sekolah akan dilengkapi dengan mesin EDC sebagai alat pencairan non-tunai KIP atau transaksi perbankan lainnya selaku Agen 46/Agen BRILink.

Implementasi Model Berdasarkan Pemetaan Wilayah

Pada model penyaluran dan pencairan rekening tabungan, Tabungan SimPel dan KIP akan menjadi sarana penyimpanan dana PIP. Rekening tabungan diberikan pada setiap siswa penerima dana PIP. Maka dari itu, model ini dapat digunakan oleh semua jenjang penerima dana PIP (SD, SMP, SMA/SMK) di seluruh wilayah di Indonesia. Rekening Tabungan Simpanan Pelajar dapat digunakan bertransaksi di seluruh *Outlet* BNI dan BRI (KC, ATM, dan Layanan Gerak).

Sementara model penyaluran dan pencairan *e-wallet* PIP, KIP yang dilengkapi dengan fitur *e-wallet* akan menjadi sarana penyimpanan dana PIP. Model ini diperuntukkan bagi siswa penerima dana PIP yang sudah memasuki usia cakap hukum,

yaitu siswa di jenjang SMA/SMK. Dalam hal ini, Pemerintah menunjuk Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI sebagai bank penyalur dana PIP di jenjang SMA/SMK. Saldo *e-wallet* PIP dapat digunakan untuk membeli perlengkapan sekolah secara nontunai, di koperasi sekolah, toko perlengkapan sekolah, toko buku atau *merchant* yang bertanda khusus menerima KIP dan sudah menjadi Agen 46 (Agen Laku Pandai BNI) sesuai dengan kuota dana PIP yang telah ditetapkan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 4.1.



Gambar 4.1 Baglan Pemetaan Wilayah untuk Implementasi Model Penyaluran dan Pencairan Dana PIP

Untuk wilayah yang dapat menggunakan model penyaluran dan pencairan *e-wallet* PIP ditentukan berdasarkan data berikut:

- 1) Jumlah Kantor Cabang BNI pada tiap kabupaten/kota;
- 2) Jumlah ATM BNI pada tiap kabupaten/kota;

- 3) Jumlah penerima dana PIP jenjang SMA/SMK di tiap kabupaten/kota; dan
- 4) Luas wilayah per kabupaten/kota.

Data-data ini kemudian diformulasikan secara statistik untuk memperoleh data berikut:

- 1) Cakupan Kantor Cabang BNI untuk siswa penerima dana PIP (rasio siswa/KC);
- 2) Cakupan ATM BNI untuk siswa penerima dana PIP (rasio siswa/ATM);
- 3) Cakupan luas Kantor Cabang BNI (rasio luas km²/KC); dan
- 4) Cakupan luas ATM BNI (rasio luas km²/ATM).

Keempat data di atas selanjutnya diukur berdasarkan skor jangkauan kuartil sebagai tendensi sentral, sehingga diperoleh skor-skor kuartil bagi tiap wilayah seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.12 Kriteria Skor Jangkauan Kuartil

No.	Data	Kriteria Skor Jangkauan Kuartil				
		Q0 (Min)	Q1	Q2	Q3	Q4
1.	Rasio Siswa/KC	77	1401	2957	4427	35584
2.	Rasio Siswa/ATM	11	133	392	1231	38496
3.	Rasio Luas km ² /KC	0.5	320	1678	2928	42621
4.	Rasio Luas km ² /ATM	0.1	28	242	1430	17742

Sumber: Olah data, Puslitjakdikbud (2018).

- 1) Pada data cakupan layanan kantor cabang untuk siswa penerima PIP, semua daerah yang berada di kuartil 1 (rasio 77–1401), kuartil 2 (rasio 1401–2957), kuartil 3 (rasio 2957–4427) dan kuartil 4 (rasio 4427–35584) memiliki layanan kantor cabang yang bisa melayani siswa penerima dana PIP dengan model *e-wallet*.
- 2) Pada data cakupan layanan ATM untuk siswa penerima PIP, semua daerah yang berada di kuartil 1 (rasio 11–133), kuartil 2 (rasio 133–392), kuartil 3 (rasio 392–1231) dan kuartil 4 (rasio 1231–38496) memiliki layanan ATM yang bisa melayani siswa penerima dana PIP dengan model *e-wallet*.
- 3) Pada data cakupan luas wilayah kantor cabang untuk siswa penerima PIP, hanya daerah yang berada di kuartil 1 (rasio 0.5– 320) yang memiliki layanan kantor cabang yang bisa melayani siswa penerima dana PIP dengan model *e-wallet*.
- 4) Pada data cakupan luas wilayah ATM untuk siswa penerima PIP, hanya daerah yang berada di kuartil 1 (rasio 0.1–28) yang memiliki layanan ATM yang bisa melayani siswa penerima dana PIP dengan model *e-wallet*.
- 5) Daerah yang berada di kuartil 2, 3, dan 4 pada data cakupan luas wilayah kantor cabang dan ATM tidak memiliki cukup layanan bank untuk melayani siswa penerima dana PIP dengan model *e-wallet*. Hal ini dikarenakan cakupan kantor cabang di atas 320 km² dan

cakupan ATM di atas 28 km² dapat dianggap cukup sulit bagi siswa untuk menjangkau layanan bank tersebut.

Oleh karena itu, suatu wilayah dianggap dapat menerapkan model penyaluran dan pencairan *e-wallet* apabila memenuhi semua kriteria skor yaitu yang terletak pada:

- 1) Jangkauan kuartil 1, 2, 3 dan 4 pada data Siswa/KC;
- 2) Jangkauan kuartil 1, 2, 3 dan 4 pada data Siswa/ATM;
- 3) Jangkauan kuartil 1, pada data Luas km²/KC; dan
- 4) Jangkauan kuartil 1, pada data Luas km²/ATM.

Dari pengukuran ini, tersaring sebanyak 114 dari 514 (22%) wilayah kabupaten/kota yang ada di Indonesia yang bisa diterapkan *e-wallet*. Berikut adalah tabel wilayah terpilih yang memenuhi kriteria sebagai wilayah yang dapat menerapkan model penyaluran dan pencairan *e-wallet*. Tabel berikut menggambarkan model *e-wallet* yang disarankan untuk dapat mengimplementasikannya pada wilayah terpilih.

Tabel 4.13 Wilayah Terpilih yang Memenuhi Kriteria Model *E-wallet*

No.	Wilayah	Kab/ Kota	Cakupan Kantor Cabang BNI untuk Siswa Penerima Dana PIP (<i>Rasio Siswa/KC</i>)	Cakupan ATM BNI untuk Siswa Penerima Dana PIP (<i>Rasio Siswa/ATM</i>)	Cakupan Luas Kantor Cabang BNI (<i>Rasio Luas km²/KC</i>)	Cakupan Luas ATM BNI (<i>Rasio Luas km²/ATM</i>)
1	BANDA ACEH	KOTA	58.8	655.3	0.8	8.8
2	LANGSA	KOTA	125.9	2896.0	11.4	262.4
3	LHOKSEUMAWE	KOTA	145.5	1843.0	4.8	60.4
4	SABANG	KOTA	116.8	701.0	25.5	153.0
5	BINJAI	KOTA	699.0	9786.0	4.2	59.2
6	GUNUNGSITOLI	KOTA	813.3	11386.0	20.1	280.8
7	MEDAN	KOTA	136.8	1461.8	0.6	6.5
8	PADANGSIDEMPUAN	KOTA	382.2	6498.0	6.7	114.7
9	PEMATANGSIANTAR	KOTA	5170.7	7756.0	18.6	27.8
10	SIBOLGA	KOTA	2803.0	5606.0	20.7	41.3
11	TANJUNGBALAI	KOTA	1186.0	10674.0	12.0	107.8
12	TEBING TINGGI	KOTA	345.2	6904.0	1.6	31.0
13	BUKITTINGGI	KOTA	76.1	704.0	0.7	6.3
14	PADANG	KOTA	113.1	1213.3	5.9	63.1

No.	Wilayah	Kab/ Kota	Cakupan Kantor Cabang BNI untuk Siswa Penerima Dana PIP (<i>Rasio Siswa/KC</i>)	Cakupan ATM BNI untuk Siswa Penerima Dana PIP (<i>Rasio Siswa/ATM</i>)	Cakupan Luas Kantor Cabang BNI (<i>Rasio Luas km²/KC</i>)	Cakupan Luas ATM BNI (<i>Rasio Luas km²/ATM</i>)
15	PADANG PANJANG	KOTA	351.4	1757.0	4.6	23.0
16	PARIAMAN	KOTA	450.4	3153.0	9.4	66.1
17	PAYAKUMBUH	KOTA	163.7	3110.0	4.5	85.2
18	SOLOK	KOTA	305.1	3966.0	5.5	71.3
19	PEKANBARU	KOTA	47.3	740.4	3.4	52.7
20	BATAM	KOTA	32.9	394.5	4.0	48.0
21	TANJUNG PINANG	KOTA	58.0	811.3	3.4	48.2
22	JAMBI	KOTA	129.9	1726.1	1.1	14.8
23	BENGKULU	KOTA	151.6	1706.0	3.4	37.9
24	LUBUKLINGGAU	KOTA	208.4	2188.0	19.1	200.8
25	PALEMBANG	KOTA	104.8	1064.5	1.4	14.2
26	PRABUMULIH	KOTA	102.4	1433.5	9.0	126.0
27	PANGKAL PINANG	KOTA	46.2	970.5	2.1	44.7
28	BANDAR LAMPUNG	KOTA	112.5	1778.1	1.9	29.6
29	TANGERANG	KAB	63.2	3473.9	2.0	112.4
30	CILEGON	KOTA	49.7	637.3	2.3	29.3

No.	Wilayah	Kab/ Kota	Cakupan Kantor Cabang BNI untuk Siswa Penerima Dana PIP (Rasio Siswa/KC)	Cakupan ATM BNI untuk Siswa Penerima Dana PIP (Rasio Siswa/ATM)	Cakupan Luas Kantor Cabang BNI (Rasio Luas km ² /KC)	Cakupan Luas ATM BNI (Rasio Luas km ² /ATM)
31	SERANG	KOTA	130.6	5135.7	2.3	88.9
32	TANGERANG	KOTA	63.2	3473.9	0.3	17.1
33	TANGERANG SELATAN	KOTA	34.3	482.4	0.6	7.7
34	BANDUNG	KAB	24.1	1387.8	2.6	147.3
35	BEKASI	KAB	43.2	927.0	2.1	45.4
36	BOGOR	KAB	44.9	1607.1	6.9	246.4
37	CIREBON	KAB	130.2	2603.0	9.8	196.9
38	KARAWANG	KAB	160.2	2898.0	8.3	150.2
39	PURWAKARTA	KAB	491.9	4820.2	16.9	165.1
40	BANDUNG	KOTA	24.1	1387.8	0.2	14.0
41	BANJAR	KOTA	79.3	1850.7	1.6	37.8
42	BEKASI	KOTA	43.2	927.0	0.4	7.7
43	BOGOR	KOTA	44.9	1607.1	0.3	10.8
44	CIMAHI	KOTA	52.4	768.3	0.9	13.1
45	CIREBON	KOTA	130.2	2603.0	0.4	7.5
46	DEPOK	KOTA	70.4	1561.5	0.8	18.2

No.	Wilayah	Kab/ Kota	Cakupan Kantor Cabang BNI untuk Siswa Penerima Dana PIP (<i>Rasio Siswa/KC</i>)	Cakupan ATM BNI untuk Siswa Penerima Dana PIP (<i>Rasio Siswa/ATM</i>)	Cakupan Luas Kantor Cabang BNI (<i>Rasio Luas km²/KC</i>)	Cakupan Luas ATM BNI (<i>Rasio Luas km²/ATM</i>)
47	SUKABUMI	KOTA	152.2	4364.0	0.6	16.1
48	TASIKMALAYA	KOTA	145.0	9717.0	2.6	171.6
49	JAKARTA BARAT	KOTA	24.2	151.2	0.3	1.9
50	JAKARTA PUSAT	KOTA	10.5	76.9	0.1	0.5
51	JAKARTA SELATAN	KOTA	14.3	113.4	0.2	1.5
52	JAKARTA TIMUR	KOTA	42.0	403.7	0.4	3.7
53	JAKARTA UTARA	KOTA	21.7	165.7	0.3	2.6
54	BANYUMAS	KAB	50.6	562.0	13.4	148.4
55	JEPARA	KAB	886.0	11739.0	20.0	264.8
56	KARANGANYAR	KAB	144.2	1778.3	21.0	258.5
57	KLATEN	KAB	889.8	8008.6	14.6	131.6
58	KUDUS	KAB	49.2	553.0	9.4	106.3
59	MAGELANG	KAB	92.0	865.2	23.5	220.6
60	PATI	KAB	82.7	744.2	27.6	248.2
61	SEMARANG	KAB	32.3	2639.8	2.9	237.6
62	SUKOHARJO	KAB	224.7	3483.5	7.9	122.3

No.	Wilayah	Kab/ Kota	Cakupan Kantor Cabang BNI untuk Siswa Penerima Dana PIP (<i>Rasio Siswa/KC</i>)	Cakupan ATM BNI untuk Siswa Penerima Dana PIP (<i>Rasio Siswa/ATM</i>)	Cakupan Luas Kantor Cabang BNI (<i>Rasio Luas km²/KC</i>)	Cakupan Luas ATM BNI (<i>Rasio Luas km²/ATM</i>)
63	TEGAL	KAB	71.4	1231.0	12.7	219.0
64	MAGELANG	KOTA	92.0	865.2	0.3	3.2
65	PEKALONGAN	KOTA	96.3	1782.0	1.2	22.6
66	SALATIGA	KOTA	184.2	2210.0	2.4	28.7
67	SEMARANG	KOTA	32.3	2639.8	1.1	93.4
68	SURAKARTA	KOTA	105.9	1175.3	0.4	4.6
69	TEGAL	KOTA	71.4	1231.0	0.6	9.9
70	BANTUL	KAB	327.6	7698.5	10.8	253.4
71	SLEMAN	KAB	79.8	1563.8	2.9	57.5
72	YOGYAKARTA	KOTA	60.4	480.0	0.2	1.8
73	GRESIK	KAB	41.0	510.4	10.6	132.4
74	JOMBANG	KAB	87.5	1067.4	18.3	223.0
75	MOJOKERTO	KAB	35.8	832.5	7.7	179.5
76	SIDOARJO	KAB	31.6	464.2	3.3	48.8
77	BATU	KOTA	58.2	757.0	10.5	136.7
78	BLITAR	KOTA	46.4	851.3	0.6	10.9

No.	Wilayah	Kab/ Kota	Cakupan Kantor Cabang BNI untuk Siswa Penerima Dana PIP (Rasio Siswa/KC)	Cakupan ATM BNI untuk Siswa Penerima Dana PIP (Rasio Siswa/ATM)	Cakupan Luas Kantor Cabang BNI (Rasio Luas km ² /KC)	Cakupan Luas ATM BNI (Rasio Luas km ² /ATM)
79	KEDIRI	KOTA	39.0	4760.0	0.5	63.4
80	MADIUN	KOTA	38.8	2058.0	0.6	33.3
81	MALANG	KOTA	46.2	1477.3	0.6	20.8
82	MOJOKERTO	KOTA	35.8	832.5	0.2	4.1
83	PASURUAN	KOTA	41.3	887.0	0.4	8.8
84	PROBOLINGGO	KOTA	469.1	14541.0	0.9	28.3
85	SURABAYA	KOTA	81.4	634.2	0.6	4.9
86	BADUNG	KAB	21.7	322.2	2.2	32.2
87	GIANYAR	KAB	238.9	3105.3	9.4	122.7
88	DENPASAR	KOTA	21.5	189.6	0.6	5.3
89	BIMA	KOTA	228.8	2860.0	4.4	55.6
90	MATARAM	KOTA	73.2	1523.2	0.6	12.3
91	KUPANG	KOTA	142.3	9389.0	0.4	26.2
92	PONTIANAK	KOTA	55.0	476.3	1.0	9.0
93	SINGKAWANG	KOTA	118.0	1415.5	21.0	252.0
94	BANJARBARU	KOTA	35.6	499.0	8.8	123.7

No.	Wilayah	Kab/ Kota	Cakupan Kantor Cabang BNI untuk Siswa Penerima Dana PIP (<i>Rasio Siswa/KC</i>)	Cakupan ATM BNI untuk Siswa Penerima Dana PIP (<i>Rasio Siswa/ATM</i>)	Cakupan Luas Kantor Cabang BNI (<i>Rasio Luas km²/KC</i>)	Cakupan Luas ATM BNI (<i>Rasio Luas km²/ATM</i>)
95	BANJARMASIN	KOTA	44.1	536.1	0.5	6.0
96	BARITO UTARA	KAB	55.6	1390.0	3.3	83.0
97	MURUNG RAYA	KAB	83.3	916.0	21.5	237.0
98	BALIKPAPAN	KOTA	32.6	287.6	3.7	32.9
99	BONTANG	KOTA	61.5	656.0	12.7	135.6
100	SAMARINDA	KOTA	36.4	528.1	4.5	65.3
101	TARAKAN	KOTA	66.1	1156.0	7.2	125.4
102	GORONTALO	KOTA	225.9	1863.5	2.4	19.9
103	MAKASSAR	KOTA	32.0	537.1	0.4	7.0
104	PALOPO	KOTA	147.3	4271.0	8.5	247.5
105	BAU-BAU	KOTA	118.1	3425.0	7.6	221.0
106	KENDARI	KOTA	72.3	1156.3	4.7	75.2
107	PALU	KOTA	64.1	687.3	5.3	56.4
108	BITUNG	KOTA	111.8	1006.5	16.8	151.4
109	KOTAMOBAGU	KOTA	152.7	2748.0	3.8	68.1
110	MANADO	KOTA	26.8	310.4	1.0	11.2

No.	Wilayah	Kab/ Kota	Cakupan Kantor Cabang BNI untuk Siswa Penerima Dana PIP (Rasio Siswa/KC)	Cakupan ATM BNI untuk Siswa Penerima Dana PIP (Rasio Siswa/ATM)	Cakupan Luas Kantor Cabang BNI (Rasio Luas km ² /KC)	Cakupan Luas ATM BNI (Rasio Luas km ² /ATM)
111	TOMOHON	KOTA	181.9	2546.0	8.2	114.2
112	AMBON	KOTA	72.4	956.2	4.5	59.7
113	TERNATE	KOTA	96.0	1408.0	2.5	37.1
114	JAYAPURA	KOTA	20.7	413.5	11.7	234.0

Keterangan: Kolom 3: Dibaca: jumlah siswa yang dilayani pada satu Kantor Cabang BNI

Kolom 4: Dibaca: jumlah siswa yang dilayani pada satu ATM BNI

Kolom 5: Dibaca: satu Kantor Cabang BNI mencakup luas wilayah (km²)

Kolom 6: Dibaca: satu ATM mencakup luas wilayah (km²)

2. Strategi Implementasi Model Penyaluran dan Pencairan Dana PIP

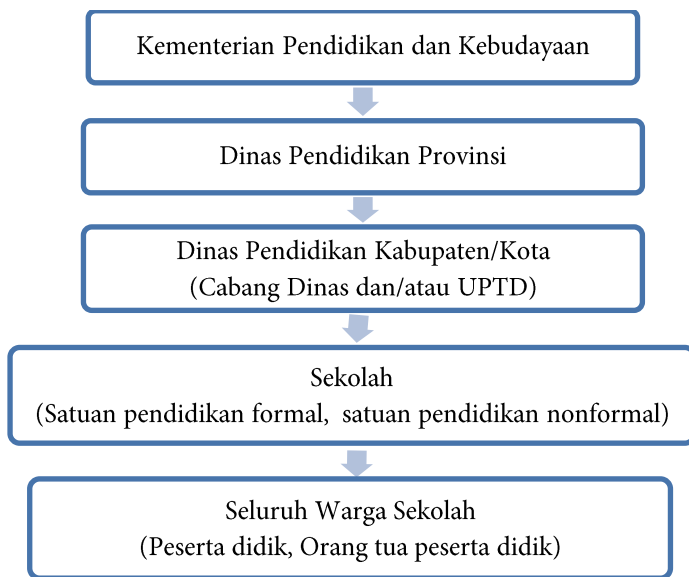
Agar model penyaluran dan pencairan dana PIP dapat efektif, maka perlu strategi yang dilakukan secara sinergis di antara semua institusi terkait dengan menjalankan tugas dan fungsinya. Kemendikbud sebagai regulator melakukan sosialisasi dan koordinasi dalam pelaksanaan PIP terkait dengan pendataan dan keuangan PIP sehingga KPPN mengetahui bahwa PIP merupakan program prioritas pemerintah. Dinas pendidikan baik provinsi maupun kabupaten/kota kurang optimal dalam melakukan *update* data di Dapodik sebagai acuan penerima PIP. Selama ini terkesan bahwa dinas pendidikan tidak mengetahui data penerima PIP di Dapodik. Dinas pendidikan pun harus bekerja sama mendorong kepala sekolah mengidentifikasi peserta didik yang memiliki PIP dan memutakhirkan datanya. Dinas pendidikan pun memfasilitasi sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga penyalur. Begitu pula lembaga penyalur memberitahukan kepada sekolah untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pencairan dana PIP.

Selanjutnya agar model penyaluran dan pencairan dana PIP bisa terlaksana dengan baik, dan efektif baik dari sisi tepat waktu, tepat sasaran dan juga tepat dalam penggunaannya maka diperlukan strategi yang bersinergi antarsemua unsur pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan PIP melalui langkah-langkah berikut: a) melakukan identifikasi

permasalahan secara umum; yaitu terkait dalam permasalahan penyaluran dan pencairan dana PIP yang ada selama ini terjadi; b) *mapping* cabang BNI dan BRI untuk penyaluran dan pencairan; dilakukan untuk mengetahui lokasi *outlet*, ATM dan Agen 46 dan Agen BRI (BriLink); c) sosialisasi dan edukasi bersama BNI, BRI, Kemendikbud dan dinas pendidikan; setelah dilakukan penentuan/*mapping* cabang BNI/BRI untuk penyaluran dan pencairan PIP serta pengkategorian wilayah penerima PIP selesai maka penting untuk dilakukan sosialisasi PIP. Tujuan dari sosialisasi adalah untuk berbagi informasi mengenai PIP kepada pihak terkait sehingga diharapkan dapat meminimalisir kekeliruan atau kesalahan ketika program dijalankan.

Sosialisasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: a) **sosialisasi langsung**; mengundang perwakilan Wilayah/Cabang BNI dan BRI ke Jakarta; Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengundang perwakilan Wilayah/Cabang BNI dan BRI ke Jakarta untuk melakukan sosialisasi Program Indonesia Pintar. Dalam kegiatan sosialisasi, dipaparkan materi terkait PIP dan manfaatnya. Nantinya perwakilan Wilayah/Cabang BNI dan BRI inilah yang akan meneruskan informasi yang didapatkan kepada siswa penerima PIP; b) **sosialisasi berjenjang**; sosialisasi berjenjang juga merupakan salah satu cara efektif untuk melakukan sosialisasi sebuah program. Sosialisasi berjenjang dapat mengatasi masalah keterbatasan waktu dan tempat. Dalam program PIP sosialisasi

berjenjang dapat dilakukan mulai dari tingkat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (direktorat teknis pengelola PIP, Direktorat Pembinaan SD, Direktorat Pembinaan SMP, Direktorat Pembinaan SMA, Direktorat Pembinaan SMK, dan Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan) hingga ke tingkat satuan pendidikan. Koordinasi antarkementerian, Pemerintah Daerah dan bank penyalur dapat dilakukan bersamaan dengan kegiatan sosialisasi.



Gambar 4.2 Alur dalam Sosialisasi Berjenjang

Selanjutnya, pelaksanaan edukasi kepada penerima bantuan oleh bank penyalur melekat pada kegiatan sosialisasi. Dalam

sosialisasi pelaksanaan PIP ini di dalamnya mencakup edukasi. Dalam Perpres Nomor 63 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Sosial Non-Tunai disebutkan bahwa Bank Penyalur bersama-sama dan berkoordinasi dengan Pemberi Bantuan Sosial (Kemendikbud) melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Penerima dan Pendamping Bantuan Sosial. Materi kegiatan edukasi ini mencakup produk dan tata cara penggunaan/penarikan rekening bantuan sosial, manfaat menabung dan perencanaan keuangan keluarga, dan tata cara penyampaian pengaduan yang ditetapkan oleh pemberi bantuan sosial, serta penggunaan manfaat bantuan sosial. Bentuk sosialisasi dan edukasi ini dapat dilakukan dalam bentuk apa saja sesuai dengan kondisi setempat yang memungkinkan. Bisa dalam bentuk pertemuan-pertemuan, diskusi, dan melalui media-media lain, di antaranya video, poster/*leaflet*, iklan, SMS, serta media-media sosial (Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain-lain).

Materi edukasi yang diberikan adalah informasi seputar pembukaan rekening di bank. Untuk pembukaan rekening harus diinformasikan dengan jelas apa saja persyaratan yang harus dilengkapi dan dibawa pada saat pembukaan rekening. Hal ini mengingat masih adanya informasi yang tidak tersampaikan dengan baik kepada penerima bantuan. Masih banyak yang belum memenuhi kelengkapan administrasi pada saat pembukaan rekening. Koordinasi dengan sekolah sebagai pihak yang bersentuhan langsung dengan penerima bantuan

perlu terus dijalin, sehingga sinergi antarpemangku kepentingan terwujud. Proses edukasi ini diharapkan tidak hanya berhenti pada saat sosialisasi saja, melainkan proses yang terus-menerus agar informasi dan pengetahuan tentang tata cara penggunaan produk-produk perbankan ini tersampaikan dengan baik kepada penerima manfaat program PIP.

Penyaluran dan pencairan dana PIP saat ini tidak hanya dilakukan melalui buku rekening semata. Perkembangan pelaksanaan PIP telah memungkinkan penerima manfaat untuk mencairkan dana PIP melalui kartu ATM, bahkan untuk daerah-daerah tertentu sudah bisa dimanfaatkan dengan model uang elektronik (*e-wallet*). Untuk itu, pihak penyalur (BNI dan BRI) diharapkan dapat bersinergi dengan Pemberi Bantuan (Kemendikbud) juga dengan pelaksana di daerah (Dinas Pendidikan dan Sekolah) untuk selalu mengedukasi penerima manfaat PIP tentang model-model produk perbankan tersebut. Begitu pula untuk toko-toko, *merchant*, hingga koperasi-koperasi sekolah yang menggunakan EDC juga termasuk bagian dari pihak yang perlu diajak berkoordinasi.

Semua institusi tersebut hendaknya memiliki kesamaan bahasa dalam penyaluran dan pencairan dana PIP, artinya melakukan sesuai dengan Juklak yang ada. Selanjutnya dari tahapan tersebut dapat digambarkan dalam pola sinergitas sebagai berikut.



Gambar 4.3 Sinergitas dalam Penyaluran dan Pencairan

5

SIMPULAN DAN OPSI KEBIJAKAN

A. Simpulan

1. Model Penyaluran dan Pencairan

- a. Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan dalam kajian ini maka dapat disimpulkan: ada 3 model penyaluran dan pencairan dana PIP yaitu: 1) Rekening Tabungan: Tabungan SimPel dan ATM; 2) KIP Plus/KIP ATM (Anjungan Tunai Mandiri); dan 3) *Smart KIP (e-wallet)*.
- b. Pencairan model tabungan SimPel dan ATM dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu dilakukan: 1) di *outlet* (Kantor Cabang, Kapal Si Pintar, dan Mobil Layanan Gerak dan *Weekend Banking*); 2) ATM; 3) Agen Laku Pandai; 4) Toko/*Merchant*/Koperasi Sekolah (Tunai/Non-tunai).
- c. Implementasi model berdasarkan kategori wilayah.

Rekening tabungan diberikan pada setiap siswa penerima dana PIP. Maka dari itu, model ini dapat digunakan oleh

semua jenjang penerima dana PIP (SD, SMP, SMA/SMK) di seluruh wilayah di Indonesia. Rekening Tabungan Simpanan Pelajar dapat digunakan bertransaksi di seluruh *Outlet* BNI dan BRI (KC, ATM, dan Layanan Gerak). Sementara model penyaluran dan pencairan *e-wallet* PIP, KIP yang dilengkapi dengan fitur *e-wallet* akan menjadi sarana penyimpanan dana PIP. Model ini diperuntukkan bagi siswa penerima dana PIP yang sudah memasuki usia cakap hukum, yaitu siswa di jenjang SMA/SMK. Untuk wilayah yang dapat menggunakan model penyaluran dan pencairan *e-wallet* PIP ditentukan berdasarkan: 1) jumlah Kantor Cabang BNI pada tiap kabupaten/kota; 2) jumlah ATM BNI pada tiap kabupaten/kota; 3) jumlah penerima dana PIP jenjang SMA/SMK di tiap kabupaten/kota; dan 4) luas wilayah per kabupaten/kota.

d. Wilayah terpilih untuk implementasi *e-wallet*.

Terdapat 114 dari 514 (22%) wilayah kabupaten/kota yang ada di Indonesia yang bisa menerapkan model *e-wallet*. Wilayah tersebut dipilih berdasarkan kriteria Rasio Siswa/KC, Rasio Siswa/ATM, Rasio Luas km²/KC dan Rasio Luas km²/ATM. Di mana suatu wilayah dikatakan memenuhi kriteria apabila: 1) Rasio Siswa/KC berada pada jangkauan kuartil 1, 2, 3 dan 4; 2) Rasio Siswa/ATM berada pada jangkauan kuartil 1, 2, 3 dan 4; 3) Rasio Luas km²/KC

berada pada jangkauan kuartil 1; dan 4) Rasio Luas km^2/ATM berada pada jangkauan kuartil 1.

2. Strategi Implementasi Model Penyaluran dan Pencairan Dana PIP

Untuk menjamin pelaksanaan PIP berjalan secara efektif, maka setiap instansi terkait harus dapat bersinergi satu sama lain. Bentuk sinergitas di antara setiap instansi tersebut dapat diwujudkan tidak hanya melalui pelaksanaan peran masing-masing sesuai dengan yang terdapat dalam petunjuk pelaksanaan PIP, tetapi harus ada komunikasi yang terus dijaga di antara setiap instansi. Dengan adanya komunikasi yang intensif, permasalahan-permasalahan yang ada akan lebih cepat diketahui dan ditangani. Selanjutnya agar model penyaluran dan pencairan dana PIP bisa terlaksana dengan baik dan efektif baik dari sisi tepat waktu, tepat sasaran dan juga tepat dalam penggunaannya maka diperlukan strategi yang bersinergi antarsemua unsur pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan PIP melalui langkah-langkah berikut: a) melakukan identifikasi permasalahan secara umum; yaitu terkait dalam permasalahan penyaluran dan pencairan dana PIP yang ada selama ini terjadi; b) *mapping* cabang BNI dan BRI untuk penyaluran dan pencairan; dilakukan untuk mengetahui lokasi *outlet*, ATM dan Agen 46 dan Agen BRI (Brilink); c) sosialisasi dan edukasi bersama BNI, BRI, Kemendikbud dan dinas pendidikan.

B. Opsi Kebijakan

Ada 3 opsi Model Penyaluran dan Pencairan Dana PIP, yaitu:

Opsi 1: Model Rekening Tabungan (Buku Tabungan SimPel)

Kelebihan:

- 1) Tidak membebani siswa;
- 2) Bebas pajak dan administrasi;
- 3) Saldo awal dan saldo minimal sebesar 0 rupiah; dan
- 4) Masa *dormant* (rekening pasif) selama 720 hari.

Kekurangan:

- 1) Buku tabungan SimPel hanya bisa dicetak dan dicairkan di unit kerja bank yang sama dengan unit kerja pemilik rekening (cabang padanan);
- 2) Ketersediaan *outlet* yang sedikit;
- 3) Waktu layanan dibatasi dengan jam operasional; dan
- 4) Menimbulkan antrian di perbankan.

Opsi 2: Model KIP ATM

Kelebihan:

- 1) Kemudahan dalam penarikan uang (tidak perlu lagi ke bank untuk mencairkan dana PIP);
- 2) Bisa ditarik kapan dan di mana saja tanpa pembatasan waktu operasional;
- 3) Lokasi (jumlah mesin ATM) lebih banyak dibandingkan *outlet* perbankan;

- 4) KIP ATM menggunakan kode untuk melakukan transaksi atau yang dikenal dengan istilah *Personal Identification Number* (PIN) yang terdiri dari rangkaian angka yang hanya diketahui oleh pemegang kartu saja;
- 5) Dapat diintegrasikan dengan agen perbankan yang ada sehingga memudahkan dalam akses.

Kekurangan:

- 1) Bagi daerah yang belum memiliki fasilitas ATM yang memadai tidak dapat menggunakan KIP ATM;
- 2) Ketentuan tentang tata cara penggunaan KIP ATM perlu diperjelas;
- 3) Dibutuhkan waktu yang lama untuk mengurus KIP ATM yang hilang karena pencetakan dan personifikasi kartu dilakukan di Jakarta;
- 4) Kartu ATM akan terblokir jika salah memasukkan PIN hingga 3 kali;
- 5) Ada kemungkinan ATM hilang atau tertelan di mesin ATM;
- 6) Memudahkan pihak ke-3 yang tidak bertanggung jawab mengakses dana PIP; dan
- 7) Ada biaya tambahan jika ATM digunakan di jaringan ATM perbankan lain (Prima, Bersama, Link, dan lain-lain).

Opsi 3: Model Smart KIP (e-Wallet)

Merupakan gabungan antara model rekening tabungan dan *e-wallet*. Artinya model ini mempunyai dua fitur yaitu fungsi untuk mengakses rekening Tabungan Simpanan Pelajar (SimPel) dan rekening *e-wallet*. Sebagai tabungan, **model *e-wallet* ini merupakan model yang dianggap efektif untuk penyaluran dan pencairan dana PIP**. Hal ini dikarenakan penggunaan/pemanfaatan dana PIP bisa dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan siswa guna memenuhi kebutuhan sekolahnya. Artinya dana yang nontunai bisa dimanfaatkan dengan benar langsung di koperasi sekolah atau *merchant* yang ditunjuk oleh bank penyalur. Sehingga dana nontunai tersebut tidak dapat dibelanjakan untuk hal-hal lain di luar dari kebutuhan untuk sekolah. Dana nontunai tersebut langsung dibelanjakan sesuai dengan jumlah yang diberikan dalam *saving account*-nya *e-wallet*.

Kelebihan:

- 1) Pembelian/transaksi menjadi praktis (tidak perlu membawa uang tunai dengan jumlah yang banyak).
- 2) Pemanfaatan dana PIP menjadi lebih tepat guna karena hanya bisa dibelanjakan untuk keperluan sekolah saja di toko-toko tertentu.

Kekurangan:

- 1) Ketersediaan toko yang bekerja sama dengan bank penyalur masih sedikit.
- 2) Ketersediaan dan harga barang yang disediakan oleh *merchant* perlu diatur dan tidak boleh melebihi harga barang di pasaran.
- 3) Pemilihan toko sebagai *merchant* harus mempertimbangkan seberapa jauh lokasi toko dan jika koperasi sekolah ditunjuk menjadi toko yang bekerja sama maka perlu diatur juga ketentuannya.
- 4) Ketentuan tentang tata cara penggunaan perlu diperjelas (apa saja yang bisa dibelanjakan).

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad. 2018. Kinerja Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar: Survey pada 6 Provinsi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 19 (1) 532-534.
- Badan Pusat Statistik. 2017. Potret Pendidikan Indonesia Statistik Pendidikan. Jakarta: BPS.
- Bank Negara Indonesia. 2018. <http://www.bni.co.id/id-id/ebanking/agen46>
- Haryanti, V. 2016. Kesiapan Institusi Pelaksana dalam Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) untuk Tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) di Wilayah Jakarta Selatan. *Kenegaraan: Jurnal Kebijakan Publik dan Birokrasi*, 1 (2).
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2015. Renstra Kemendikbud 2015-2019. Jakarta: Kemendikbud.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2016. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar. Jakarta: Kemendikbud.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. <https://pip.kemdikbud.go.id/wilayah/data2017> diakses 2017.

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jakarta: Kemendikbud.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. *Majalah Jendela Pendidikan & Kebudayaan, Media Komunikasi dan Inspirasi*, Edisi IX, Maret 2017. Jakarta: Biro Komunikasi & Layanan Masyarakat (BKLM).
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. Panduan Pelaksanaan PIP. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2018. Panduan Pelaksanaan PIP. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2018a. <http://sipintar.kemdikbud.go.id> diakses Agustus 2018.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2018b. <http://sipintar.kemdikbud.go.id> diakses 24 Juli 2018.
- Lusiana, L. 2017. Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) di Desa Sukomulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara: Studi Kasus di SDN 011 dan SDN 013. *Jurnal Administrasi Negara*, 6 (1), 6991-7005.

- Puslitjakdikbud. 2017. Kajian Implementasi Program Indonesia Pintar. Jakarta: Balitbang, Kemendikbud.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia. 2014. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar dan Program Indonesia Sehat. Jakarta: Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. 2017. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial. Jakarta: Republik Indonesia.
- Saraswati, L.N. 2017. Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) pada Jenjang Sekolah Dasar di Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda. *Jurnal Administrasi Negara*, 5 (4), 6737-6750.
- Satori, Djam'an dan Komariah, Aan. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Susenas. 2017. Angka Partisipasi Kasar Jenjang Pendidikan Dasar.
- UNESCO. 2016. Rangkuman Laporan Pemantauan Pendidikan Global. Paris Organisasi Pendidikan, Ilmu dan Budaya PBB 7, Place de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP, Prancis.

Salah satu permasalahan dalam implementasi PIP adalah pada aspek penyaluran dan pencairan dana. Penyaluran dan pencairan yang mudah, lancar dan tepat merupakan tantangan yang harus diatasi. Pencairan dana PIP masih mengalami sedikit keterlambatan. Data total alokasi penyaluran dana PIP mencapai target 17.985.657 anak. Namun dari yang sudah disalurkan itu, penerima dana PIP yang telah melakukan pencairan baru mencapai 8.119.851 siswa. (Kemendikbud, 2017). Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis: (i) model penyaluran dan pencairan dana PIP; dan (ii) strategi implementasi model penyaluran dan pencairan dana PIP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 3 model penyaluran dan pencairan dana PIP yaitu model Rekening Tabungan Sempel, model KIP Plus (KIP ATM), dan model *e-wallet* (model smart KIP). Secara umum model yang banyak digunakan adalah rekening tabungan dan sebagian kecil dengan model *e-wallet*. Untuk penerapan model KIP Plus (KIP ATM) dan *e-wallet*, pada umumnya bank penyalur menyatakan siap untuk menerapkan apabila infrastrukturnya dapat dipenuhi. Hasil temuan berikutnya yaitu terdapat 4 cara pencairan PIP, yaitu: (i) di outlet (kantor cabang, kapal Si Pintar, dan Mobil Layanan Gerak dan *Weekend Banking*); (ii) di ATM; (iii) Agen Laku Pandai; (iv) toko/*merchant*/koperasi sekolah (tunai/non-tunai). Pencairan dengan model tabungan Sempel dan KIP ATM dapat dilakukan dengan keempat cara pencairan tersebut.



Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan
Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2019

ISBN 978-602-0792-24-8

